



Pemerintah Kota Bima  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga  
melayani  
bangsa

**DUKCAPIL**  
**GO**  
**DIGITAL**

**ZONA**  
**INTEGRITAS**  
**NO KORUPSI**

264,2  
JUATA  
JIWA

Indonesia memasuki  
*ageing population*  
Penduduk berusia 65 tahun ke atas



# PROFIL

## PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

# TAHUN 2023



GET IT ON  
Google play

AYO SEGERA AKTIVASI !

# IKD

IDENTITAS  
KEPENDUDUKAN  
DIGITAL



dis  
duk  
capil  
KOTA BIMA



DUKCAPIL Kota Bima



dukcapilkotabima



DukcapilKota Bima



@BimaDukcapil



+6282340649368



<https://dukcapil.bimakota.go.id/>

# **PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA BIMA TAHUN 2023**



**Disusun Oleh:  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Bima  
2024**

# Kata Pengantar



Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 guna peningkatan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan di Kota Bima. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2023 merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Kota Bima pada tahun 2023.

Sumber utama data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2023 adalah Data Konsolidasi Bersih status 31 Desember 2023.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi penduduk, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Bima pada khususnya dan penduduk Indonesia secara keseluruhan pada umumnya.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 ini.

Kota Bima,        Februari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil

Hj.MARIAMAH, SH.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670311 199303 2 013

# Daftar Isi

<b>Halaman Depan</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	vii
<b>Daftar Gambar</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Pengertian Umum .....	3



<b>BAB II GAMBARAN UMUM KOTA BIMA</b> .....	5
A. Kondisi Geografis Kota Bima.....	5
B. Kondisi Demografis Kota Bima.....	10
C. Gambaran Ekonomi Kota Bima .....	11
D. Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.....	14
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan .....	14
2. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	15
3. Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.....	16
<b>BAB III SUMBER DATA</b> .....	23
<b>BAB IV KOMPONEN KEPENDUDUKAN</b> .....	25
A. Kuantitas Penduduk.....	25
1. Komposisi dan Persebaran Penduduk .....	25
2. Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan .....	30
3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan.....	32
B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi .....	35
1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	35
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Sosial .....	48



3. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Keluarga .....	65
4. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	88
5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian.....	91

**BAB V KUALITAS DAN MOBILITAS PENDUDUK .....** 96

A. Tingkat Kesehatan Penduduk .....	97
1. Aspek Kelahiran.....	98
2. Aspek Kematian.....	102
3. Sosial .....	107
B. Aspek Pendidikan .....	111
C. Aspek Ekonomi .....	114

**BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN .....** 129

A. Kepemilikan Kartu Keluarga .....	130
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	133
C. Penerbitan Akta.....	140
D. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak.....	152
E. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).....	153



<b>BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>156</b>
A. Kesimpulan .....	156
1. Aspek Kuantitas .....	156
2. Aspek Kualitas .....	157
3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan .....	158
4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan.....	159
B. Implikasi Kebijakan .....	160

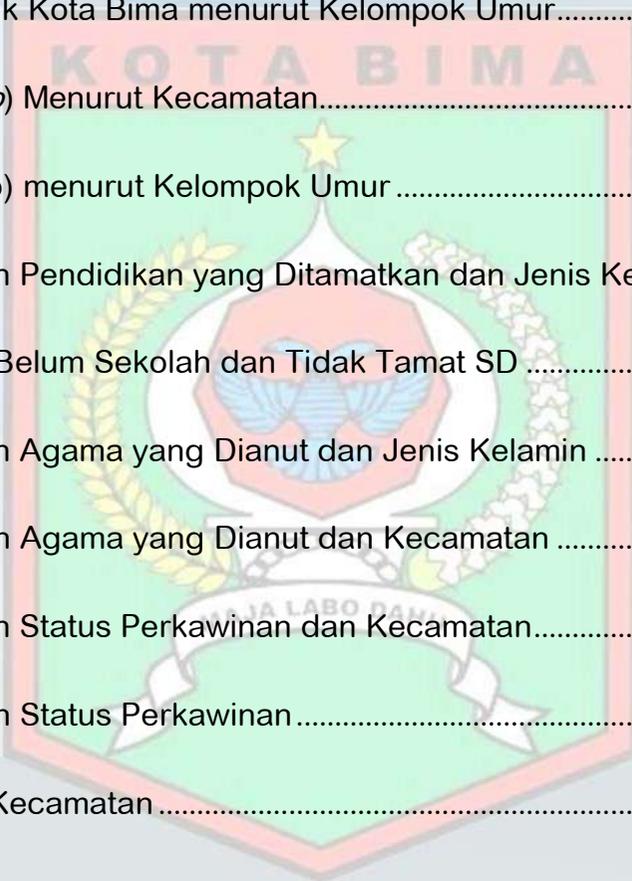


# Daftar Tabel

Tabel II.1 Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan .....	8
Tabel II.2 Keadaan Geografi Kota Bima.....	10
Tabel II.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima (Persen).....	12
Tabel II.4 PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bima (Milyar Rupiah) .....	13
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Jenis Kelamin .....	26
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Barat.....	27
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Timur .....	27
Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Asakota .....	28
Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Raba.....	28
Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Mpunda .....	29
Tabel IV.7 Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan.....	30
Tabel IV.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan.....	34



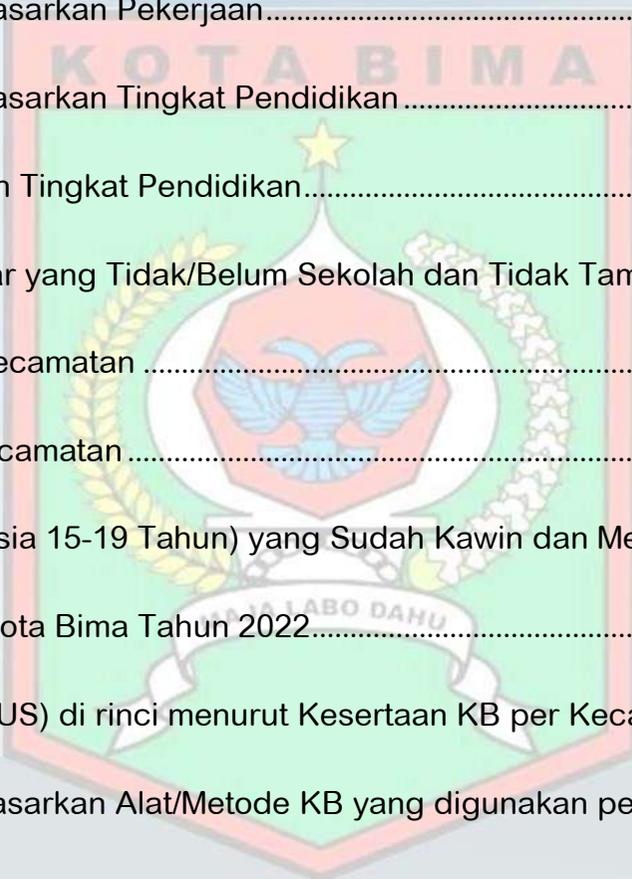
Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	36
Tabel IV.10 Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2022 .....	39
Tabel IV.11 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bima Tahun 2022.....	40
Tabel IV.12 Persentase Kumulatif Penduduk Kota Bima menurut Kelompok Umur.....	43
Tabel IV.13 Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> ) Menurut Kecamatan.....	45
Tabel IV.14 Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> ) menurut Kelompok Umur .....	47
Tabel IV.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin .....	49
Tabel IV.16 Jumlah Penduduk yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD .....	51
Tabel IV.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin .....	52
Tabel IV.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Kecamatan .....	53
Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan.....	54
Tabel IV.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	55
Tabel IV.21 Angka Perkawinan Kasar per Kecamatan.....	57



Tabel IV.22 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan.....	58
Tabel IV.23 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	60
Tabel IV.24 Jumlah Perempuan (Usia 15-49 Tahun) menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2022.....	62
Tabel IV.25 Angka Perceraian Kasar per Kecamatan.....	63
Tabel IV.26 Angka Perceraian Umum per Kecamatan.....	64
Tabel IV.27 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan.....	67
Tabel IV.28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dalam Keluarga.....	68
Tabel IV.29 Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan.....	70
Tabel IV.30 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Barat.....	71
Tabel IV.31 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Timur.....	72
Tabel IV.32 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Asakota.....	73
Tabel IV.33 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Raba.....	73
Tabel IV.34 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Mpunda.....	74



Tabel IV.35 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	76
Tabel IV.36 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan .....	77
Tabel IV.37 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan.....	80
Tabel IV.38 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan.....	81
Tabel IV.39 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	87
Tabel IV.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	89
Tabel IV.41 Jumlah Penduduk Wajib Belajar yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD.....	91
Tabel IV.42 Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan .....	92
Tabel IV.43 Angka Kelahiran Kasar per Kecamatan.....	93
Tabel IV.44 Jumlah Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun) yang Sudah Kawin dan Melahirkan Tahun 2022.....	95
Tabel V.1 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Bima Tahun 2022.....	98
Tabel V.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di rinci menurut Kesertaan KB per Kecamatan .....	100
Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan.....	100



Tabel V.4 Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita.....	103
Tabel V.5 Jumlah Kematian Ibu (yang dilaporkan) dirinci per kecamatan .....	104
Tabel V.6 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi (yang dilaporkan) dirinci per Kecamatan.....	104
Tabel V.7 Jumlah Bayi di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022 .....	105
Tabel V.8 Jumlah Anak Balita, dan Balita di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022.....	105
Tabel V.9 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (yang dilaporkan) di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022 .....	106
Tabel V.10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dirinci per Kecamatan Tahun 2022.....	107
Tabel V.11 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng berdasarkan Data Terpadu FM-OTM Kota Bima Tahun 2022.....	108
Tabel V.12 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Menerima Paket Sandang.....	108
Tabel V.13 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.....	109
Tabel V.14 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar .....	109

Tabel V.15 Jumlah Penyandang Disabilitas .....	111
Tabel V.16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Bima, 2021 dan 2022.	112
Tabel V.17 Angka Partisipasi Jenjang TK, KB/PAUD, SD, dan SMP di Kota Bima Tahun Pelajaran 2021/2022.....	113
Tabel V.18 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur.....	115
Tabel V.19 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja .....	121
Tabel V.20 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Bukan Angkatan Kerja.....	122
Tabel V.21 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.....	122
Tabel V.22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Total Angkatan Kerja dan Total Bukan Angkatan Kerja.....	123
Tabel V.23 Jumlah Penduduk Usia Kerja.....	123
Tabel V.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	124
Tabel VI.1 Cakupan Kepemilin Kartu Keluarga Per Kelurahan.....	131
Tabel VI.2 Jumlah dan Capaian Perekaman KTP Elektronik Per Kelurahan .....	134
Tabel VI.3 Jumlah dan Capaian Pencetakan KTP Elektronik per Kelurahan .....	137

Tabel VI.4 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir per Kelurahan.....	141
Tabel VI.5 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun per Kelurahan.....	143
Tabel VI.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan.....	146
Tabel VI.7 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perkawinan per Kelurahan.....	147
Tabel VI.8 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perceraian per Kelurahan.....	150
Tabel VI.9 Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan & Pengangkatan Anak.....	152
Tabel VI.10 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak per Kelurahan.....	154



# Daftar Gambar

Gambar II.1 Peta Wilayah Kota Bima .....	7
Gambar IV.1 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan .....	26
Gambar IV.2 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	32
Gambar IV.3 Piramida Penduduk Kota Bima .....	38
Gambar IV.4 Grafik Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2022 .....	41
Gambar IV.5 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk .....	42
Gambar IV.6 Grafik Rasio Jenis Kelamin .....	46
Gambar IV.7 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	56
Gambar IV.8 Grafik Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan .....	71
Gambar IV.9 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan.....	78
Gambar IV.10 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	88



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perjalanan bangsa dalam mencapai tujuannya, yakni menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan pembangunan akan berhasil apabila aspek-aspeknya diperhatikan dan diperhitungkan. Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan, sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan yang berkesinambungan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada di suatu wilayah. Oleh sebab itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kota Bima, untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Bima.

## B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2023 yakni untuk menyajikan data kependudukan serta memberikan gambaran kondisi, perkembangan, dan proses kependudukan Kota Bima Tahun 2023. Secara umum, Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2023 dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah, perencanaan tolak ukur kinerja pembangunan daerah dan penentuan target kinerja pembangunan, sedangkan secara khusus pemanfaatan informasi perkembangan kependudukan tahun 2023 dimanfaatkan sebagai rujukan data untuk:

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kota;
2. Perencanaan kebijakan kependudukan daerah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
3. Penentuan target kinerja dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program-program pembangunan dalam rangka usaha penanggulangan tingkat kemiskinan daerah;
4. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial masyarakat;
5. Pengembangan kelembagaan dalam partisipasi pembangunan masyarakat;
6. Penelitian lembaga dan Mahasiswa dalam mencapai tujuannya.

## C. Ruang Lingkup

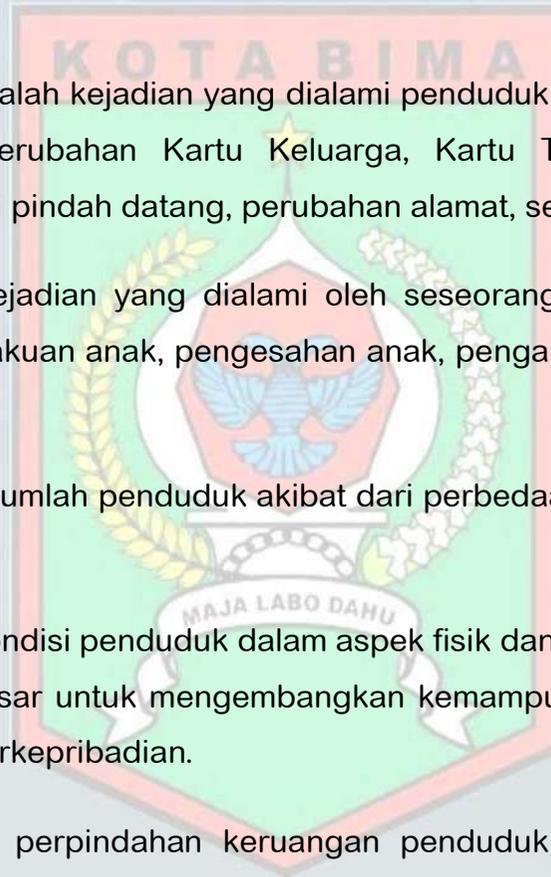
Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima 2023 memuat deskripsi data dan analisis implikasi atas data :

1. Kuantitas penduduk meliputi jumlah dan komposisi beserta persebaran penduduk, dan penduduk menurut demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial;
3. Mobilitas (Migrasi) penduduk baik migrasi keluar maupun migrasi masuk;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP-el, KIA, dan Akta-Akta.

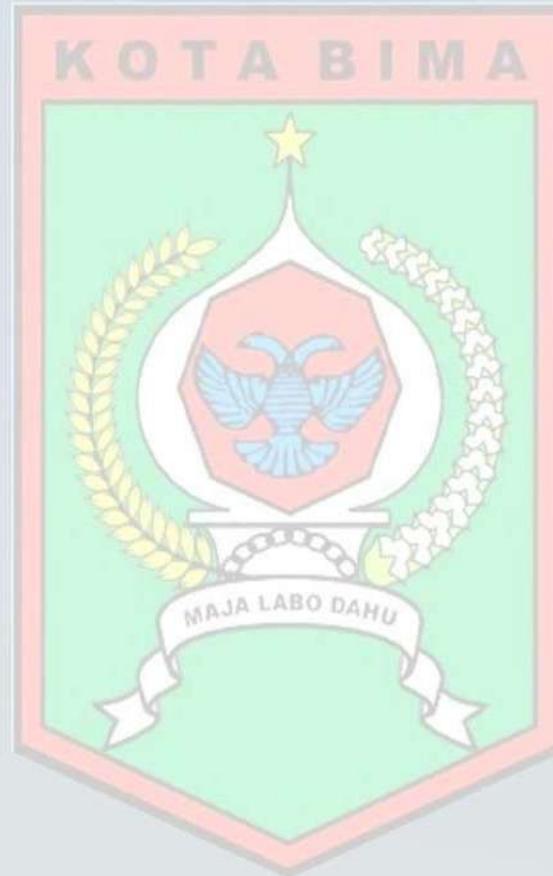
## D. Pengertian Umum

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Bima.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk Kota Bima.
3. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan.
4. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan.

6. **Pendaftaran penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
7. **Pencatatan sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
8. **Peristiwa kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. **Peristiwa penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, pindah, datang, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah datang tempat tinggal.
11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang layak, berbudaya, dan berkepribadian.
12. **Mobilitas penduduk** adalah perpindahan keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.



13. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.



# BAB II

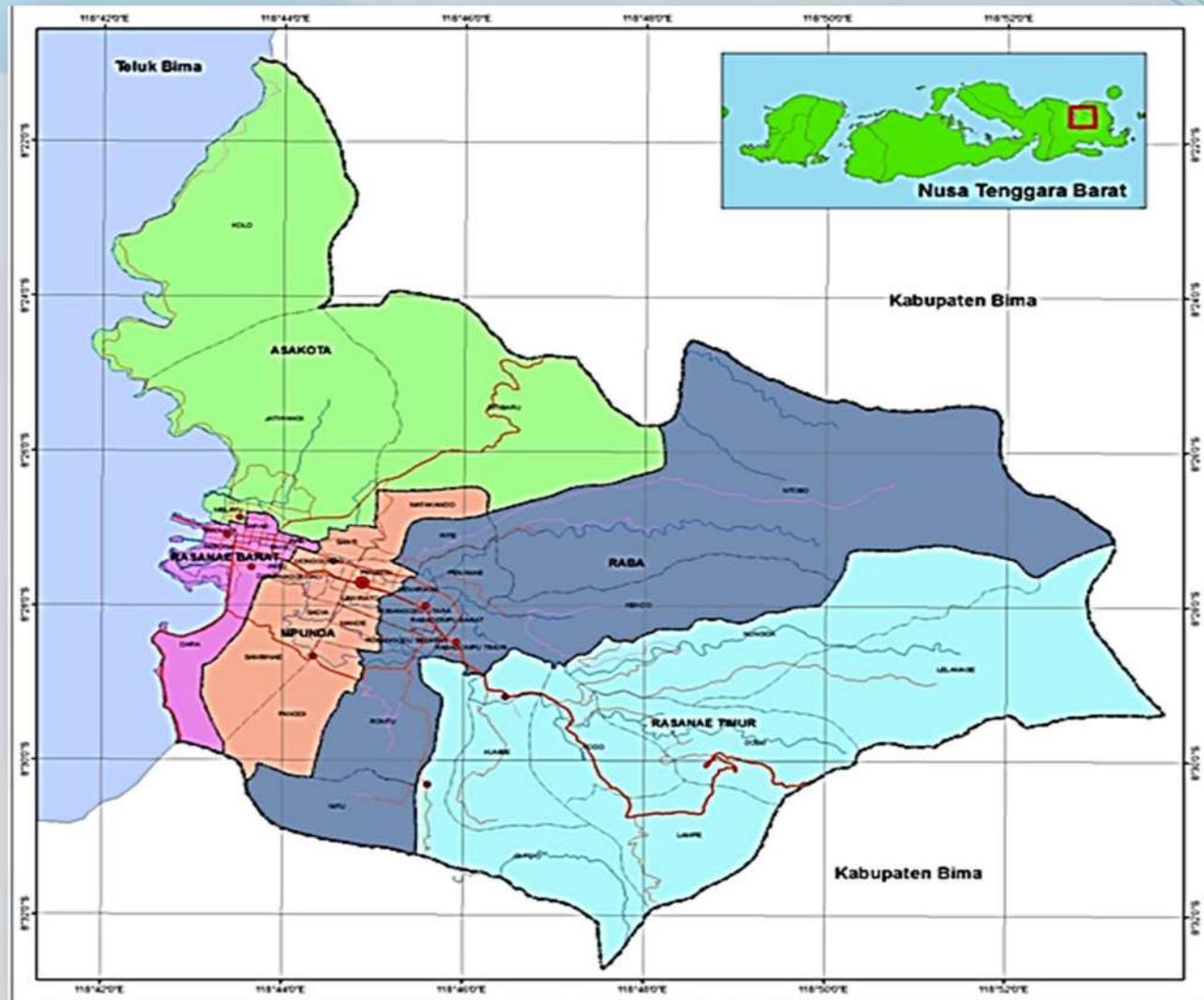
## GAMBARAN UMUM KOTA BIMA

### A. Kondisi Geografis Kota Bima

Kota Bima yang dikenal sebagai “Kota Tepian Air” merupakan kota yang diuntungkan secara geografis, selain berada di ujung timur Pulau Sumbawa, Kota Bima juga memiliki satu pelabuhan laut yaitu PT. Pelindo III. Selain itu, pelabuhan Sape dan Bandar Udara Muhammad Salahudin juga merupakan penunjang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Posisi strategis Kota Bima dapat menunjang perwujudan kota ini sebagai kota pusat perdagangan barang dan jasa.

Secara geografis Kota Bima merupakan salah satu Kota dari 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Bagian Timur Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 222,25 km<sup>2</sup> dan berada pada 118° 41' – 118°, 48' Bujur Timur dan 8°, 30' - 8°, 20' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

Sebelah Utara	:	Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
Sebelah Timur	:	Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
Sebelah Barat	:	Teluk Bima.



**Gambar II.1 : Peta Wilayah Kota Bima**

## **B. Kondisi Geomorfologi Kota Bima**

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi berdasarkan morfometri dan morfogenesis, dapat dibedakan menjadi 4 satuan geomorfologi yaitu:

### **1. Satuan Geomorfologi Dataran Fluvial**

Terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan Kota Bima, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Rabangodu, Rabadompu, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Kemiringan lereng rata-rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

### **2. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai**

Terhampar luas pada bagian barat Kota Bima, meliputi daerah Tanjung, Melayu, dan sekitarnya. Kemiringan lereng rata-rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

### **3. Satuan Geomorfologi Bergelombang Lemah Denudasional**

Terhampar luas pada bagian tengah Kota Bima, meliputi daerah Doro Oimbo, Doro Oi Si'i, Doro Jati Oi Fo'o, Nitu, dan sekitarnya. Kemiringan lereng rata-rata sebesar 6%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batu gamping dan batu pasir.

### **4. Satuan Geomorfologi Bergelombang Lemah – Kuat Vulkanik**

Terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan Kota Bima, meliputi daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa, dan sekitarnya. Kemiringan lereng rata-rata sebesar 13%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.

## C. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan kategori iklim, Kota Bima memiliki iklim Sabana Tropis (Aw). Tingkat curah hujan tahunan Kota Bima berkisar antara 1.000 – 2.000 mm per tahun dengan jumlah curah hujan bervariasi antara 80 – 140 hari hujan per tahun. Sementara itu, matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 71,1%. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Bima sebesar 21°C sampai 32,8°C. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan suhu berkisar 37,2°C sampai 38°C. Hal ini menyebabkan Kota Bima ditetapkan sebagai salahsatu kota terpanas di Indonesia.

Sumber daya Alam baik yang terkandung di daratan, sungai, maupun dilaut merupakan potensi ekonomi yang besar. Pengelolaan dan peningkatan sumber daya secara efisien dan efektif akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kependudukan.

Kota Bima memiliki banyak potensi sebagaimana kota dan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat seperti potensi pariwisata, perikanan, kelautan, kehutanan, pertanian, dan industri. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan adalah sektor perikanan. Sebagai contoh, Kelurahan Dodu, Ntobo, Nungga, dan Mande dapat dikembangkan menjadi kawasan sentral industri ikan air tawar. Beberapa kelurahan tersebut memiliki potensi dan sumber mata air yang melimpah untuk menjadi sentral industri ikan air tawar. Jenis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan antara lain manila, karper, mujair, lele, dan lain-lain. Potensi air yang melimpah pada kawasan tersebut harus dapat diberdayagunakan. Pemerintah Kota Bima melalui kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUBE), melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan, memberikan bantuan bibit ikan, dan memberikan dana stimulan modal usaha.

Selain itu, masyarakat di kawasan potensial tersebut diberikan pandangan dan pemahaman agar dapat memanfaatkan potensi air yang ada untuk pembudidayaan ikan air tawar. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup, menyuplai dan memenuhi kebutuhan ikan air tawar masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bima.

Di Kota Bima terdapat berbagai sumber daya alam (SDA), diantaranya yang menjadi andalan adalah sebagai berikut :

- Pertanian
- Perdagangan.
- Wisata Pantai dan Wisata Alam.

Rencana tata ruang Kota Bima yang berwawasan lingkungan harus dijadikan pedoman terpadu Pembangunan agar tatanan lingkungan lingkup dan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumber daya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna, berhasil guna secara berkelanjutan. Berhubungan dengan rencana tata ruang tersebut khususnya yang berkaitan dengan pembangunan perlu diperhatikan hal-hal antara lain :

- Lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih fungsikan atau dipinjamkan menjadi kawasan apapun;
- Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi perkembangan kependudukan.

## D. Kondisi Demografis Kota Bima

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2023 adalah 161.577 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 80.311 jiwa dan perempuan 81.266 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kota Bima sebesar 98,82, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan, meskipun secara nasional penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Kondisi Kota Bima pada tahun 2022 mengalami “Bonus Demografi” dimana usia produktif jumlahnya melebihi dari usia tidak produktif dengan rentang usia produktif yaitu 15 – 64 tahun. Penduduk Kota Bima pada tahun 2023 pada rentang usia produktif sejumlah 109.026 jiwa.

Pada kondisi “Bonus Demografi” yang sudah terjadi sejak tahun 2022 harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan ekonomi. Melimpahnya tenaga kerja merupakan peluang emas untuk menggenjot roda perekonomian sehingga sektor-sektor ekonomi riil terdongkrak memiliki peningkatan daya saing. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba yaitu sebanyak 40.416 jiwa dan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur yaitu sebanyak 19.833 jiwa. Angka kepadatan penduduk Kota Bima cukup tinggi yaitu mencapai 727 jiwa/km<sup>2</sup>, sehingga apabila laju penambahan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Bima akan menjadi semakin padat.

## E. Gambaran Ekonomi Kota Bima

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Berikut tabel Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima Tahun 2019-2023. Pemahaman sektor andalan adalah sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Berdasarkan data perkembangan PDRB per sektor, dapat dihitung besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bima yang mengandalkan sektor 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 4) Transportasi dan Pergudangan; dan 5) Konstruksi.

**Tabel II.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima (Persen)**

Kategori	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.68	13,43	13,74	14,03	13,38
B	Pertambangan dan Penggalian	0.36	0,35	0,38	0,39	0,40
C	Industri Pengolahan	2.95	2,94	3	3,08	2,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.20	0,21	0,20	0,20	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	8.24	8,33	9,11	8,61	9,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26.04	25,40	24,60	24,64	25,13
H	Transportasi dan Pergudangan	9.21	9,11	8,51	8,46	10,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.51	3,52	3,01	3,05	3,09
J	Informasi dan Komunikasi	1.73	1,75	1,78	1,75	1,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.60	2,72	2,50	2,49	2,35
L	Real Estate	5.21	5,39	5,39	5,52	5,25
M, N	Jasa Perusahaan	0.38	0,37	0,35	0,36	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.91	11,36	11,86	11,93	11,05
P	Jasa Pendidikan	7.87	7,93	8,44	8,48	7,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.39	3,39	3,48	3,37	3,16
R, S, T, U	Jasa lainnya	3.71	3,76	3,61	3,63	3,66
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2023

**Tabel II,4 PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bima (Milyar Rupiah)**

Kategori	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	426.76	416,55	410,79	410,77	412,92
B	Pertambangan dan Penggalian	11.98	11,43	12,14	11,99	12,91
C	Industri Pengolahan	108.74	105,84	103,81	103,20	103,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.25	9,06	8,27	7,67	7,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.95	0,97	0,96	0,96	0,98
F	Konstruksi	276.49	262,18	284,10	266,80	305,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	796.68	739,34	711,18	695,71	740,10
H	Transportasi dan Pergudangan	304.52	289,34	263,95	260,35	326,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.28	91,09	75,01	73,98	78,07
J	Informasi dan Komunikasi	73.22	69,85	67,97	64,64	56,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	80.45	78,87	73,37	73,36	71,96
L	Real Estate	170.82	164,10	157,37	155,58	153,60
M, N	Jasa Perusahaan	12.02	11,14	10,37	10,35	10,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289.51	282,05	283,97	279,44	280,51
P	Jasa Pendidikan	259.95	246,04	248,06	244,61	241,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.00	116,40	113,17	107,06	106,18
R, S, T, U	Jasa lainnya	130.48	124,17	114,64	112,75	119,91
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>3.174,09</b>	<b>3.018,40</b>	<b>2.939,13</b>	<b>2.879,22</b>	<b>3.029,04</b>

Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2023

## **F. Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima merupakan lembaga pemerintah daerah yang memberikan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil berlokasi pada Jalan Sokarno Hatta No,2 Raba-Bima, Pelayanan yang diberikan yaitu terkait dengan dokumen pendaftaran penduduk (Kartu Keluarga, KTP-el, Pindah Datang, KIA) dan dokumen pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan/Pengesahan/Pengangkatan Anak,

### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bima merupakan salah satu wujud dari pelayanan publik yang secara operasional pelaksanaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

## **2. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tertuang dalam Peraturan WaliKota Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Pengelolaan administrasi kependudukan;
- d. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- g. Penyelenggaraan sosialisasi;
- h. Pembinaan jabatan fungsional,

### 3. Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang mempunyai *tagline* “Melayani dengan Penuh Keikhlasan” berusaha untuk selalu membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bima, Berikut adalah inovasi-inovasi dalam yang telah dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dalam rangka membahagiakan masyarakat:

#### A. Warda Warta (Wara Bidan Wara Akta) Ada Bidan Ada Akta

Untuk membantu mencapai target cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka Dinas Dukcapil Kota Bima berinovasi membuat sebuah sistem layanan yang bernama WARDA WARTA (*wara bidan wara akta*) “ada bidan ada akta”, hasil kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bidan seluruh Polindes se-Kota Bima, Inovasi ini dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran, baik akta kelahiran usia 0-17 tahun, maupun akta kelahiran di atas 17 tahun, sehingga proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan langsung oleh Bidan, Dokumen yang akan diterima pun tidak hanya akta kelahiran, tetapi disertai Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi pemohon akta kelahiran bayi yang baru lahir, Dengan demikian, Layanan Inovasi Warda Warta adalah sebuah layanan penerbitan akta kelahiran yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan masyarakat,



Penyerahan Akta Kelahiran, Inovasi Warda Warta Ke Bidan Polindes Kelurahan Lelamase

Inovasi "WARDA WARTA" Dinas Dukcapil Kota Bima mendapatkan Juara Harapan 1 kategori umum, Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil pada pagelaran "Malam Apresiasi Inovasi Daerah Kota Bima" yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Bima,

## B. Kartu Identitas Anak (KIA) Masuk Sekolah

Merupakan program pemberian identitas bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari, Di Kota Bima, pemegang kartu ini mendapatkan diskon belanja di beberapa mitra KIA, Dengan KIA, anak-anak sudah bisa mengakses pelayanan publik, misal: membuka tabungan, *check-in* pesawat, akses bantuan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya,

Dalam mewujudkan Pelayanan dengan Ikhlas dan Membahagiakan Masyarakat, Disdukcapil Kota Bima menandatangani PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan beberapa pihak swasta seperti **Outdoormu Adventure Store, Kolam Renang Bima Tirta, Bimbingan Belajar Prime Generation Cabang Kota Bima, Global Mart Kota Bima** yang mana warga Kota Bima yang menggunakan pelayanan dan fasilitas pihak swasta tersebut akan mendapatkan potongan harga, Ke depannya Disdukcapil Kota Bima bertekad untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi lain demi membahagiakan warga Kota Bima,



### C. Lao Wa'a Tauma (LAWATA)

Inovasi "LAWATA" merupakan inovasi kerjasama dengan PT, POS Indonesia, Dengan hadirnya inovasi ini, PT, POS sebagai mitra dinas dukcapil akan mengantarkan dokumen kependudukan masyarakat ke seluruh wilayah kota Bima, Inovasi ini diambil dari nama Pantai di Kota Bima yaitu Pantai LAWATA,

LAWATA merupakan singkatan dari LAO WA'A TA UMA (Bahasa Bima) yang artinya Pergi Antar Sampai Rumah,



## D. Lalapan Ikan (Layanan Langsung Pengaktivasian Identitas Kependudukan Digital)

Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, KTP Elektronik ikut serta bertransformasi ke dalam bentuk digital, Permendagri No, 72 Tahun 2022 tersebut menjelaskan identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan,

Dengan *Identitas Kependudukan Digital* (IKD), masyarakat tidak perlu lagi menyimpan KTP dalam bentuk fisik, cukup menunjukkan *QR Code* yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi, Guna akselerasi penerapan penggunaan IKD bagi seluruh kalangan, Dinas Dukcapil Kota Bima menghadirkan Inovasi yang dikemas dalam “**LALAPAN IKAN**” yang merupakan singkatan dari **PELAYANAN LANGSUNG PENGAKTIVASIAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL**, Pelaksanaan Inovasi LALAPAN IKAN ini dengan cara membuka pelayanan mobile pada tiap-tiap OPD, kampus, dan tempat-tempat umum lainnya,



## E. Seseherahan Dinas Dukcapil Bagi Pasangan Baru Nikah (Handuk Basah)

**HANDUK BASAH** yang merupakan akronim dari “**H**adiah **A**dminduk **B**agi **P**asangan **B**aru **S**ah **M**enikah” adalah inovasi pelayanan jemput bola dikhususkan kepada warga yang baru melaksanakan pernikahan secara resmi dengan tujuan terciptanya tertib administrasi kependudukan dengan cepat,

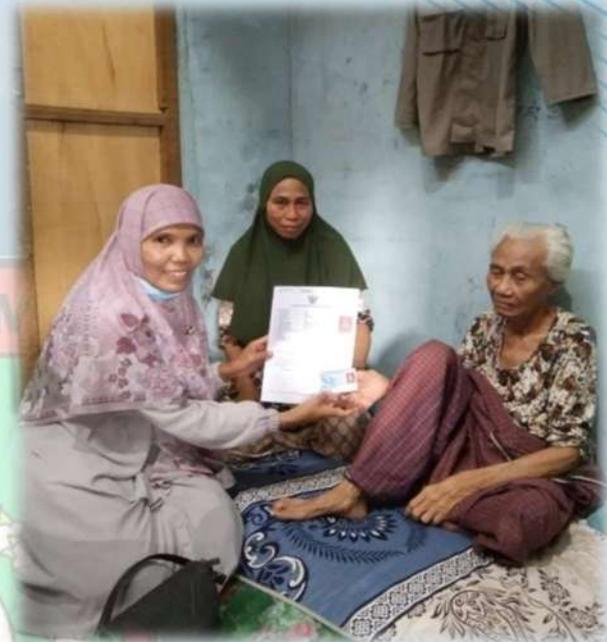
Adapun paket layanan adminduk pada inovasi ini, kepada pasangan yang baru menikah tersebut akan mendapatkan 5 (Lima) produk dukcapil yaitu KK baru bagi pengantin, KTP baru bagi pengantin dengan status menikah, KK baru bagi kedua orangtua pengantin,

Dalam pelaksanaan Inovasi ini Dinas Dukcapil Kota Bima berkoordinasi dengan seluruh Kantor Urusan Agama di 5 (Lima) Kecamatan se Kota Bima untuk mendapatkan informasi warga yang akan melaksanakan pernikahan,



## F. Pelayanan Penduduk Rentan (LADURENTA)

**Inovasi Pelayanan Penduduk Rentan (LADURENTA)** merupakan pelayanan yang dilaksanakan dan diberikan khusus kepada seluruh penduduk rentan, baik itu warga lanjut usia (Lansia), penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Pelayanan tersebut meliputi pelayanan perekaman biometrik KTP-EL, penyerahan KK, penyerahan biodata, dan penyerahan KTP-EL yang langsung dilaksanakan di masing-masing kediaman penduduk rentan, Dalam pelaksanaan pelayanan ini, sebelumnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAFDUK) mendapat pemberitahuan atau permintaan dari berbagai komponen seperti sanak famili, LSM, Babinkamtibmas dan Babinsa di setiap kelurahan yang kemudian akan ditugaskan pejabat fungsional bersama tim untuk terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan, Dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima mendatangi rumah-rumah penduduk menggunakan Mobil Pelayanan yang sudah dilengkapi berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam proses perekaman maupun pencetakan dokumen kependudukan,



## G. Spasiduk Rakit (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit)

Sejak Tahun 2022, Dinas Dukcapil Kota Bima membangun kemitraan dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima, Inovasi kerja sama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak,

Kerjasama yang dihadirkan tersebut yaitu penerbitan adminduk bagi bayi yang baru dilahirkan di Rumah Sakit Muhammadiyah, Produk dukcapil yang akan didapatkan yaitu Kartu Keluarga baru, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak,

Bagi Ibu yang melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima, untuk mendapatkan dokumen adminduk yang baru tidak perlu repot melakukan pengurusan sendiri ke Kantor Dinas Dukcapil, Karena dengan adanya Inovasi **Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit "SPASIDUK RAKIT"**, kepemilikan dokumen adminduk baru tersebut akan langsung diterima atau diserahkan oleh pihak Rumah Sakit,



## BAB III SUMBER DATA

Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Dalam salah satu klausulnya disebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari data registrasi, non registrasi, dan lintas sektoral.

Data registrasi penduduk merupakan data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Registrasi kependudukan tersebut diadministrasi ketika penduduk melakukan pencatatan status kependudukannya di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data non registrasi adalah data bukan hasil registrasi yang menunjang data kependudukan. Sedangkan data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menanganibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial. Data lintas sektor ini dipergunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan data kependudukan untuk pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk.

Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati

kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang mempunyai tanggung-jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data Konsolidasi Bersih diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dua kali dalam setahun. Dan untuk penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Bila ada perbedaan data antara Data Konsolidasi Bersih (DKB) dengan data di daerah, maka data DKB yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan data resmi kependudukan.

Kerangka berfikir serta dasar metode analisis data dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2023 adalah:

1. Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga jelas peristiwa kependudukan yang terjadi di wilayah;
2. Mengidentifikasi segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk menanganinya;
3. Mengidentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
4. Mendorong percepatan terwujudnya database penduduk yang valid dan analisa untuk pembangunan daerah yang berwawasan aspek kependudukan.

# BAB IV

## KOMPONEN KEPENDUDUKAN

### A. Kuantitas Penduduk

#### 1. Komposisi dan Persebaran Penduduk

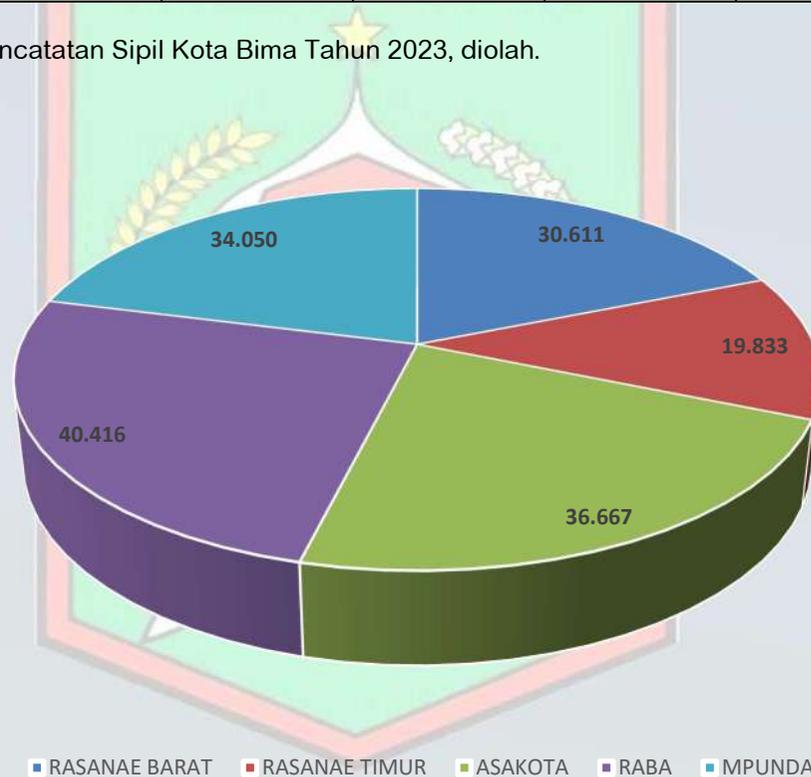
Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota. Kota Bima dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi jika tidak serius ditangani akan menjadi masalah yang krusial, apalagi jika jumlah ini dikaitkan dengan luas wilayah, maka permasalahan kepadatan penduduk di Kota Bima sangat riskan. Karena semakin padatnya suatu wilayah, maka akan berakibat tidak terpenuhinya fasilitas umum, padatnya daerah pemukiman dan timbulnya masalah sosial lainnya. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bima didalam menyelesaikan permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial budaya dan ekonomi.

Pada dekade tujuh puluhan hampir setiap daerah menghadapi masalah yang sama yaitu besarnya jumlah penduduk akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta masalah tidak meratanya penduduk disetiap daerah. Terutama antara lain daerah pedesaan dan perkotaan. Masalah jumlah penduduk perlu diperhatikan karena penduduk sebagai sumber daya ekonomi, selain sebagai modal dasar pembangunan, juga merupakan objek bagi pembangunan.

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Jenis Kelamin**

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	52.72.01	Rasanae Barat	15.178	18,90	15.433	18,99	30.611	18,95
2	52.72.02	Rasanae Timur	9.839	12,25	9.994	12,30	19.833	12,27
3	52.72.03	Asakota	18.443	22,96	18.224	22,43	36.667	22,69
4	52.72.04	Raba	19.997	24,90	20.419	25,13	40.416	25,01
5	52.72.05	Mpunda	16.854	20,99	17.196	21,16	34.050	21,07
Jumlah			<b>80.311</b>	<b>100,00</b>	<b>81.266</b>	<b>100,00</b>	<b>161.577</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.



**Gambar IV.1 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan**

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Barat**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.01</b>	<b>Rasanae Barat</b>		<b>15.178</b>	<b>100,00</b>	<b>15.433</b>	<b>100,00</b>	<b>30.611</b>	<b>100,00</b>
1	1001	Paruga	2.596	17,10	2.654	17,20	5.250	17,15
2	1002	Nae	2.102	13,85	2.217	14,37	4.319	14,11
3	1003	Sarae	2.568	16,92	2.554	16,55	5.122	16,73
4	1004	Tanjung	3.184	20,98	3.195	20,70	6.379	20,84
5	1013	Pane	1.288	8,49	1.383	8,96	2.671	8,73
6	1014	Dara	3.440	22,66	3.430	22,23	6.870	22,44

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Timur**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.02</b>	<b>Rasanae Timur</b>		<b>9.839</b>	<b>100,00</b>	<b>9.994</b>	<b>100,00</b>	<b>19.833</b>	<b>100,00</b>
1	1004	Kumbe	1.939	19,71	1.983	19,84	3.922	19,78
2	1008	Lampe	792	8,05	835	8,36	1.627	8,20
3	1009	Dodu	1.639	16,66	1.657	16,58	3.296	16,62
4	1011	Nungga	1.268	12,89	1.253	12,54	2.521	12,71
5	1018	Kodo	1.097	11,15	1.156	11,57	2.253	11,36
6	1019	Oi Fo'o	1.142	11,61	1.120	11,21	2.262	11,41
7	1020	Lelamase	1.028	10,45	1.054	10,55	2.082	10,50
8	1021	Oimbo	934	9,49	936	9,37	1.870	9,43

**Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Asakota**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.03</b>		<b>Asakota</b>	<b>18.443</b>	<b>100,00</b>	<b>18.224</b>	<b>100,00</b>	<b>36.667</b>	<b>100,00</b>
1	1001	Melayu	2.901	15,73	2.932	16,09	5.833	15,91
2	1002	Jatiwangi	3.846	20,85	3.813	20,92	7.659	20,89
3	1003	Jatibaru	3.101	16,81	2.997	16,45	6.098	16,63
4	1004	Kolo	3.164	17,16	3.070	16,85	6.234	17,00
5	1005	Jatibaru Timur	2.073	11,24	2.115	11,61	4.188	11,42
6	1006	Ule	3.358	18,21	3.297	18,09	6.655	18,15

**Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Raba**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.04</b>		<b>Raba</b>	<b>19.997</b>	<b>100,00</b>	<b>20.419</b>	<b>100,00</b>	<b>40.416</b>	<b>100,00</b>
1	1001	Penaraga	2.569	12,85	2.650	12,98	5.219	12,91
2	1002	Rontu	1.650	8,25	1.673	8,19	3.323	8,22
3	1003	Penanae	2.134	10,67	2.116	10,36	4.250	10,52
4	1004	Kendo	1.794	8,97	806	3,95	1.600	3,96
5	1005	Ntobo	1.968	9,84	1.985	9,72	3.953	9,78
6	1006	Nitu	775	3,88	786	3,85	1.561	3,86
7	1007	Rabangodu Selatan	2.000	10,00	2.072	10,15	4.072	10,08
8	1008	Rabadompu Timur	1.863	9,32	1.947	9,54	3.810	9,43
9	1009	Rite	1.250	6,25	1.193	5,84	2.443	6,04
10	1010	Rabadompu Barat	2.555	12,78	2.723	13,34	5.278	13,06
11	1011	Rabangodu Utara	2.439	12,20	2.468	12,09	4.907	12,14

**Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Mpunda**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.05</b>		<b>Mpunda</b>	<b>16.854</b>	<b>100,00</b>	<b>17.196</b>	<b>100,00</b>	<b>34.050</b>	<b>100,00</b>
1	1001	Monggonao	2.044	12,13	2.051	11,93	4.095	12,03
2	1002	Sadia	1.882	11,17	1.908	11,10	3.790	11,13
3	1003	Santi	1.395	8,28	1.433	8,33	2.828	8,31
4	1004	Sambinae	1.799	10,67	1.813	10,54	3.612	10,61
5	1005	Penatoi	2.322	13,78	2.503	14,56	4.825	14,17
6	1006	Lewirato	1.027	6,09	987	5,74	2.014	5,91
7	1007	Mande	1.407	8,35	1.501	8,73	2.908	8,54
8	1008	Panggi	1.386	8,22	1.392	8,09	2.778	8,16
9	1009	Manggemaci	2.067	12,26	2.107	12,25	4.174	12,26
10	1010	Matakando	1.525	9,05	1.501	8,73	3.026	8,89

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Perkembangan kependudukan merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subjek dalam pembangunan suatu wilayah. Secara umum penduduk Kota Bima yang terbagi pada 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan lebih banyak didominasi pada jenis kelamin perempuan, meskipun secara nasional penduduk Indonesia didominasi jenis kelamin laki-laki.

Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Raba yaitu sejumlah 40.416 jiwa yang terdiri dari 19.997 laki-laki dan 20.419 perempuan atau 25,01% dari total penduduk, disusul Kecamatan Asakota dengan 22,69%. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur yaitu sejumlah 19.833 jiwa dimana 9.839 laki-laki dan 9.994 perempuan atau 12,27% dari total penduduk.

Sedangkan proporsi penduduk perempuan disetiap kecamatan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki, kecuali di kecamatan Asakota yang terdiri dari 18.443 laki-laki dan 18.224 perempuan. Sedangkan untuk tingkat kelurahan, jumlah penduduk tertinggi di Kelurahan Jatiwangi dengan jumlah penduduk 7.659 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di kelurahan Nitu dengan jumlah 1.561 jiwa.

## 2. Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Rasio kepadatan penduduk (*density ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk perkilometer persegi pada periode tahun tertentu.

**Tabel IV.7 Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	n	%		
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.611	18,95	10,14	3.019
2	52.72.02	Rasanae Timur	19.833	12,27	64,07	310
3	52.72.03	Asakota	36.667	22,69	69,03	531
4	52.72.04	Raba	40.416	25,01	63,73	634
5	52.72.05	Mpunda	34.050	21,07	15,28	2.228
Jumlah			<b>161.577</b>	<b>100,00</b>	<b>222,25</b>	<b>727</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Angka kepadatan penduduk Kota Bima adalah 727 artinya setiap km<sup>2</sup> dihuni oleh 727 jiwa. Ditinjau dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kota Bima dengan kepadatan mencapai 3.019 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Rasanae Timur yaitu 310 jiwa/km<sup>2</sup>.

Informasi kepadatan penduduk tiap daerah perlu diketahui untuk mengetahui gejala kelebihan penduduk (*overpopulation*), untuk mengetahui pusat-pusat aglomerasi penduduk, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun budaya. Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah tidak merata karena ada lahan atau wilayah yang kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, daerah yang memiliki akses mudah ke pusat industri dan memiliki tanah yang subur cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960, ada 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu *tidak padat* dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa per kilometer persegi, *kurang padat* dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa per kilometer persegi, *cukup padat* dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa per kilometer persegi dan *sangat padat* dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/kilometer persegi.

Menurut ketentuan tersebut, tingkat kepadatan penduduk Kota Bima tergolong sangat padat. Rata-rata setiap km<sup>2</sup> Kota Bima didiami sebanyak 727 jiwa. Tingkat kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Rasanae Barat dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar IV.2 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan**

### 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran) maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.

Penggolongan angka pertumbuhan penduduk merupakan suatu cara untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Ini berfungsi untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduknya. Penggolongan ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *pertumbuhan penduduk positif, negatif, dan nol*.

Pertumbuhan penduduk positif terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah bertambah ( $r > 0$ ). Hal ini terjadi karena jumlah kelahiran di wilayah tersebut melebihi jumlah kematian. Ini adalah tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kehidupan yang baik dan masyarakatnya dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Namun, pertumbuhan penduduk positif juga dapat menyebabkan masalah, seperti kelangkaan sumber daya alam, kepadatan penduduk, dan masalah lingkungan.

Pertumbuhan penduduk negatif terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah berkurang ( $r < 0$ ). Hal ini terjadi karena jumlah kematian di wilayah tersebut melebihi jumlah kelahiran. Ini dapat menjadi tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, dan masalah sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk negatif juga dapat menyebabkan masalah, seperti kekurangan tenaga kerja, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

Pertumbuhan penduduk nol terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah tidak bertambah atau berkurang ( $r = 0$ ). Ini menunjukkan bahwa jumlah kelahiran dan kematian di wilayah tersebut sama. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan yang baik, sehingga tidak ada masalah sosial yang berarti. Namun, pertumbuhan penduduk nol juga dapat menyebabkan masalah, seperti kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman, masalah pendanaan, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Kesimpulannya, penggolongan angka pertumbuhan penduduk ini sangat penting untuk menentukan tingkat kebutuhan suatu wilayah dan membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduk. Dengan mengetahui jenis pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduknya.

**Tabel IV.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk 2023		Jumlah Penduduk 2022		Laju Pertumbuhan Penduduk
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.611	18,95	30.128	19,09	1,59
2	52.72.02	Rasanae Timur	19.833	12,27	19.184	12,15	3,33
3	52.72.03	Asakota	36.667	22,69	35.388	22,42	3,55
4	52.72.04	Raba	40.416	25,01	39.786	25,20	1,57
5	52.72.05	Mpunda	34.050	21,07	33.365	21,14	2,03
<b>Jumlah</b>			<b>161.577</b>	<b>100,00</b>	<b>157.851</b>	<b>100,00</b>	<b>2,33</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Dapat dilihat angka pertumbuhan penduduk Kota Bima dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang dihitung berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2023 Semester II (DKB 202302) hasil pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP Elektronik didapatkan nilai sebesar 2,33 persen. Angka ini termasuk sangat tinggi (di atas Laju Pertumbuhan Nasional yakni 1,13 %).

Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Jika dilihat menurut kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Asakota yaitu 3,55 persen. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kecamatan Asakota dikarenakan banyaknya dibangun perumahan di tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Asakota sehingga arus migrasi masuk lebih besar.

Ditambah lagi dengan adanya sarana transportasi yang cukup mendukung, sehingga memudahkan arus keluar masuk barang dan juga mobilitas penduduk. Untuk Kota Bima, jumlah penduduk pada tahun 2023 sejumlah 161.577 jiwa artinya mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sejumlah 3.726 jiwa. Kenaikan 3.726 penduduk menunjukkan *trend positif* secara keseluruhan pada Kota Bima. Secara laju pertumbuhan pada kecamatan terdapat trend laju pertumbuhan yang negatif pada kecamatan Rasanae Barat. Laju pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi, serta faktor-faktor non demografis antara lain kesehatan, tingkat pendidikan dan lain-lain.

## **B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi**

### **1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan.

Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

**Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	6.867	8,55	6.158	7,58	13.025	8,06
2	5-9	7.823	9,74	7.330	9,02	15.153	9,38
3	10-14	7.594	9,46	7.112	8,75	14.706	9,10
4	15-19	6.697	8,34	6.340	7,80	13.037	8,07
5	20-24	6.386	7,95	6.730	8,28	13.116	8,12
6	25-29	6.280	7,82	6.277	7,72	12.557	7,77
7	30-34	6.092	7,59	6.326	7,78	12.418	7,69
8	35-39	6.399	7,97	6.396	7,87	12.795	7,92
9	40-44	5.976	7,44	6.424	7,90	12.400	7,67
10	45-49	5.202	6,48	5.609	6,90	10.811	6,69
11	50-54	4.483	5,58	4.621	5,69	9.104	5,63
12	55-59	3.461	4,31	3.871	4,76	7.332	4,54
13	60-64	2.651	3,30	2.805	3,45	5.456	3,38
14	65-69	1.841	2,29	2.129	2,62	3.970	2,46
15	70-74	1.261	1,57	1.416	1,74	2.677	1,66
16	>=75	1.298	1,62	1.722	2,12	3.020	1,87
<b>Jumlah</b>		<b>80.311</b>	<b>100,00</b>	<b>81.266</b>	<b>100,00</b>	<b>161.577</b>	<b>100,00</b>

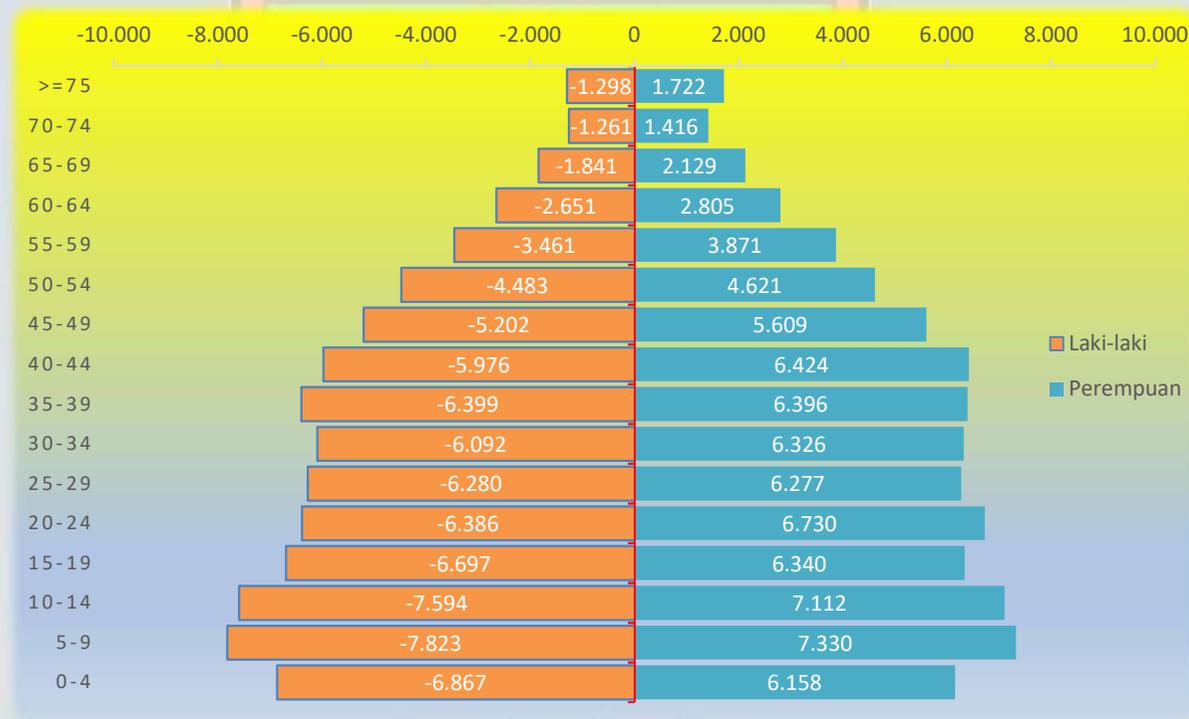
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Komposisi penduduk yang sering digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan yaitu komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Dari tabel IV.9 ini terlihat bahwa 8,06 persen penduduk Kota Bima merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota Bima dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan pemenuhan gizi balita serta investasi pendidikan usia dini. Adapun 26,54 persen penduduk Kota Bima adalah penduduk usia wajib mengenyam pendidikan dasar (0-14 tahun). Dimana pemerintah daerah perlu memperhatikan pendidikan bagi penduduk usia ini, terutama ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta ketersediaan lingkungan yang positif.

Komposisi penduduk usia kerja (produktif) terbesar berada pada penduduk berumur 20-24 sebesar 8,12 persen dan 35-39 tahun 7,92 persen. Tidak hanya ketersediaan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang positif di rumah maupun di masyarakat, tetapi pada kelompok umur ini pemerintah juga dituntut untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja.

Untuk komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun. Seperti telah dijelaskan di awal, penduduk usia inilah yang akan menjadi bonus demografi penduduk Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Jumlah penduduk Kota Bima, untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 80.311 jiwa atau 49,70% dan jumlah penduduk perempuan 81.266 jiwa atau 50,30%. Komposisi umur dan jenis kelamin penduduk dapat digambarkan secara grafik dengan piramida penduduk.

Piramida penduduk Kota Bima tahun 2023, komposisi penduduk tertinggi berada pada rentang umur 5-9 tahun dimana komposisi penduduk laki-laki sebesar 9,74% dan penduduk perempuan 9,02% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada rentang umur tersebut sebanyak 15.153 jiwa. Adapun komposisi penduduk terkecil berada pada rentang umur 70-74 tahun yakni 1,66% dari total penduduk Kota Bima dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 1.57% dari total penduduk Kota Bima berjenis kelamin laki-laki dan persentase penduduk perempuan 1,74% dari total penduduk Kota Bima berjenis kelamin perempuan.



**Gambar IV.3 Piramida Penduduk Kota Bima**

### a. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Tabel IV.10 berikut ini menunjukkan lebih dari setengah (67,48%) penduduk Kota Bima merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Kondisi ini sangat menguntungkan Pemerintah Kota Bima karena merupakan penduduk usia kerja dan 26,54 persen penduduk Kota Bima merupakan penduduk berusia kurang dari 15 tahun (penduduk usia muda) dan 5,98 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

**Tabel IV.10 Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2023**

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	22.284	27,75	20.600	25,35	42.884	26,54
2	15-64	53.627	66,77	55.399	68,17	109.026	67,48
3	>64	4.400	5,48	5.267	6,48	9.667	5,98
Jumlah		<b>80.311</b>	<b>100,00</b>	<b>81.266</b>	<b>100,00</b>	<b>161.577</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

**Tabel IV.11 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bima Tahun 2023**

No	Rasio Ketergantungan	%
1	Muda	39,33
2	Tua	8,87
3	Total	48,20

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

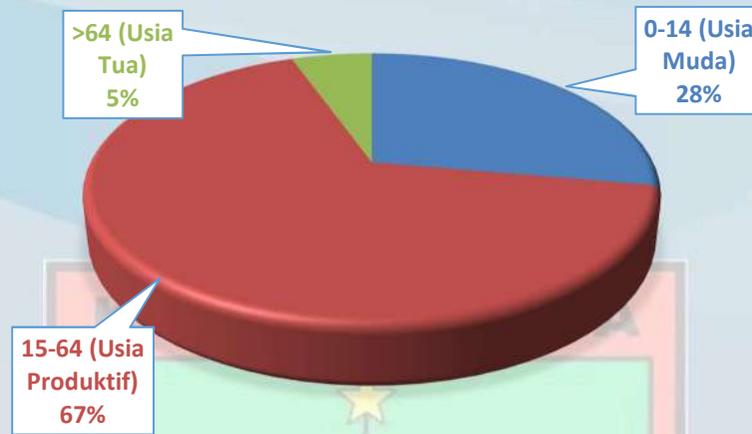
Rasio ini menunjukkan beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Dari tabel IV.10 dapat dihitung Rasio Ketergantungan Total sebesar 48,20 %, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan Total sebesar 48,20 % ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (39,33 %) dan rasio penduduk tua (8,87 %). Rasio ini memberikan gambaran tentang jumlah orang yang mengandalkan orang lain untuk kebutuhan mereka, terutama dalam hal keuangan dan pengasuhan. Dampak dari tingginya rasio ketergantungan adalah beban ekonomi yang semakin berat bagi penduduk usia produktif. Banyaknya penduduk yang tidak produktif memerlukan dukungan finansial dan pelayanan khusus, seperti pelayanan kesehatan dan perawatan lansia. Hal ini dapat mengganggu pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhan negara atau daerah. Dengan kata lain, rasio ketergantungan mengindikasikan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

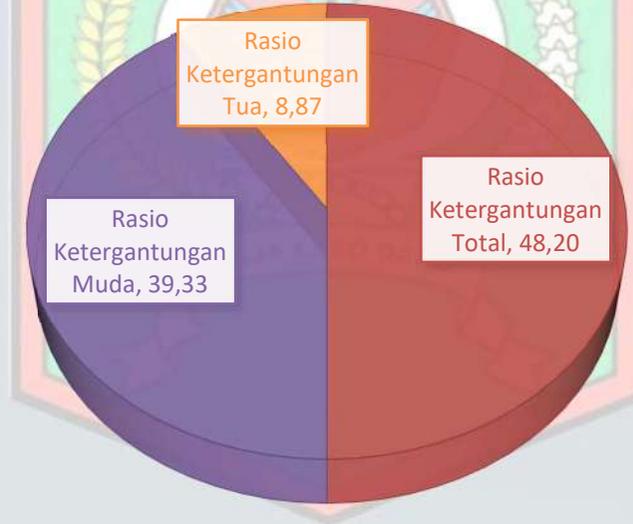
Rasio ketergantungan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Jika rasio ketergantungan tinggi, maka beban ekonomi akan semakin berat dan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, jika rasio ketergantungan rendah, maka potensi pembangunan ekonomi akan lebih besar karena jumlah penduduk usia produktif lebih dominan. Secara umum rasio ketergantungan Kota Bima tergolong masih rendah, kondisi ini sebenarnya menguntungkan bagi Kota Bima terutama untuk membuat kebijakan dalam memperbesar tabungan rumah tangga, investasi sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasio ketergantungan, antara lain:

- Mendorong kebijakan keluarga berencana yang bijaksana untuk mengurangi jumlah kelahiran yang tidak terkendali;
- Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang baik untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup lansia;
- Menggalakkan program pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif;
- Menerapkan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia produktif.



**Gambar IV.4 Grafik Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2023**



**Gambar IV.5 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk**

## b. Umur Median (*Median Age*)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun.
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

**Tabel IV.12 Persentase Kumulatif Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
0-4	13.025	13.025	8,06
5-9	15.153	28.178	17,44
10-14	14.706	42.884	26,54
15-19	13.037	55.921	34,61
20-24	13.116	69.037	42,73
25-29	12.557	81.594	50,50
30-34	12.418	94.012	58,18
35-39	12.795	106.807	66,10
40-44	12.400	119.207	73,78
45-49	10.811	130.018	80,47
50-54	9.104	139.122	86,10

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
55-59	7.332	146.454	90,64
60-64	5.456	151.910	94,02
65-69	3.970	155.880	96,47
70-74	2.677	158.557	98,13
>=75	3.020	161.577	100,00
<b>Total</b>	<b>161.577</b>		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah

Berdasarkan Tabel IV.12 dapat dihitung umur median (*median age*) di Kota Bima dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$Umur\ Median_{Md} = I_{Md} + \left[ \frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \times i \right]$$

Keterangan:

$I_{Md}$  : Batas bawah kelompok umur yang mengandung  $N/2$

$N$  : Jumlah penduduk total

$f_x$  : Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung  $N/2$

$f_{Md}$  : Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai  $N/2$

$i$  : Kelas interval umur

Dari rumus di atas didapatkan umur median penduduk Kota Bima tahun 2023 adalah 29,68 tahun dibulatkan 30 tahun. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Bima termasuk dalam kategori penduduk tua, yang berarti setengah penduduk Kota Bima pada tahun 2023 berusia di bawah 29 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29 tahun.

Dengan kata lain, penduduk Kota Bima dikategorikan sebagai penduduk tua yakni penduduk dalam kondisi transisi dari penduduk struktur intermediate (*intermediate population*) ke penduduk struktur tua (*old population*).

### c. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

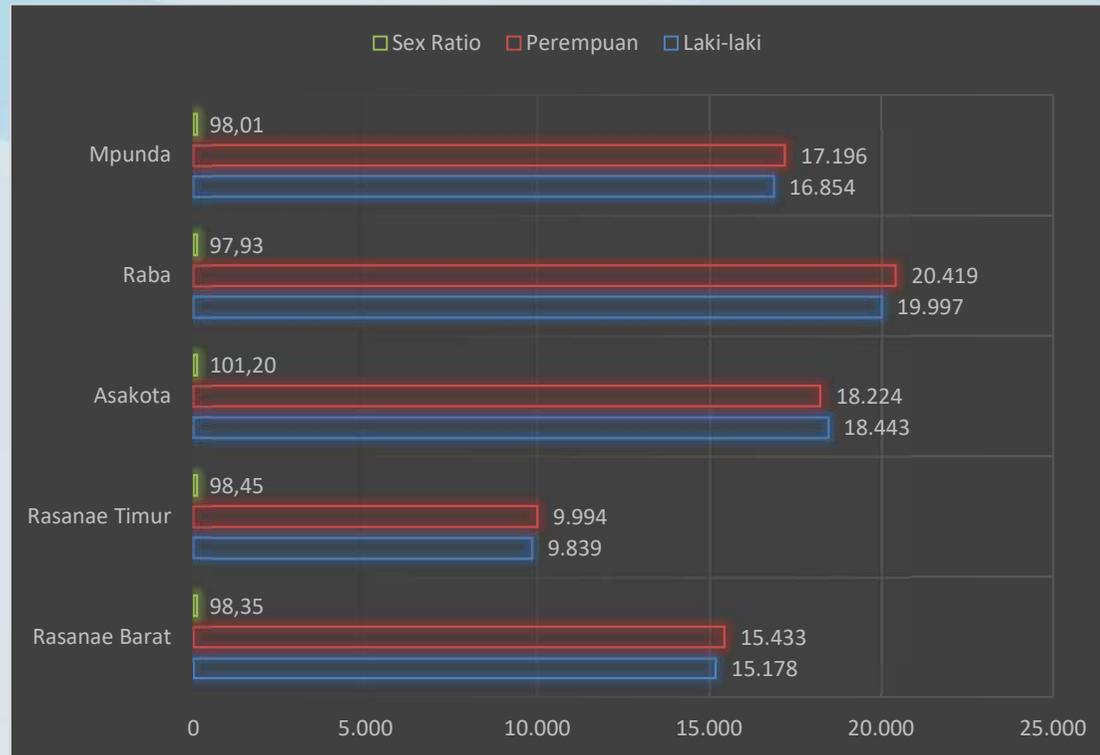
Dari tabel IV.13. berikut ini terlihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Kota Bima adalah 98,82 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 orang penduduk laki-laki.

**Tabel IV.13 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kecamatan**

Kecamatan		Jenis Kelamin		<i>Sex Ratio</i>
Kode	Nama	Laki-laki	Perempuan	
52.72.01	Rasanae Barat	15.178	15.433	98,35
52.72.02	Rasanae Timur	9.839	9.994	98,45
52.72.03	Asakota	18.443	18.224	101,20
52.72.04	Raba	19.997	20.419	97,93
52.72.05	Mpunda	16.854	17.196	98,01
<b>Jumlah</b>		<b>80.311</b>	<b>81.266</b>	<b>98,82</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, pada gambar di bawah, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tertinggi paling tinggi berada di Kecamatan Asakota dengan nilai 101,20 yang artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Jadi dapat dipahami bahwa di Kecamatan Asakota jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Rasanae Timur (98,45), Rasanae Barat (98,35), Mpuda (98,01), dan Raba dengan nilai rasio jenis kelamin terkecil (97,93).



**Gambar IV.6 Grafik Rasio Jenis Kelamin**

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, pada gambar diatas, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tertinggi paling tinggi berada di Kecamatan Asakota dengan nilai 101,20 yang artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Jadi dapat dipahami bahwa di Kecamatan Asakota jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Rasanae Timur (98,45), Rasanae Barat (98,35), Mpuda (98,01), dan Raba dengan nilai rasio jenis kelamin terkecil (97,93).

Secara nasional menurut Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni) oleh Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan. Adapun *Sex Ratio* penduduk Kota Bima menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.14 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin			<i>Sex Ratio</i>
		L	P	L+P	
1	0-4	6.867	6.158	13.025	111,51
2	5-9	7.823	7.330	15.153	106,73
3	10-14	7.594	7.112	14.706	106,78
4	15-19	6.697	6.340	13.037	105,63
5	20-24	6.386	6.730	13.116	94,89
6	25-29	6.280	6.277	12.557	100,05
7	30-34	6.092	6.326	12.418	96,30
8	35-39	6.399	6.396	12.795	100,05
9	40-44	5.976	6.424	12.400	93,03
10	45-49	5.202	5.609	10.811	92,74
11	50-54	4.483	4.621	9.104	97,01
12	55-59	3.461	3.871	7.332	89,41
13	60-64	2.651	2.805	5.456	94,51
14	65-69	1.841	2.129	3.970	86,47
15	70-74	1.261	1.416	2.677	89,05
16	>=75	1.298	1.722	3.020	75,38
<b>Jumlah</b>		<b>80.311</b>	<b>81.266</b>	<b>161.577</b>	<b>98,82</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Gambaran rasio jenis kelamin secara nasional dimana lebih banyak penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan berbanding terbalik dengan gambaran rasio jenis kelamin Kota Bima. Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (sex ratio at birth).
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok umur 00-19 tahun, 25-29 tahun, dan 35-39 tahun, sedangkan kelompok usia 50 tahun keatas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya.

Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 60 tahun ke atas dapat dilihat penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Ini menunjukkan teori yang mengatakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

## **2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Sosial**

### **a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Persentase penduduk Kota Bima menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada Tabel IV.15 di bawah ini terlihat bahwa kualitas penduduk Kota Bima menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 2023 relatif tinggi. Hampir dari sepertiga penduduk Kota Bima (29,21%) tamat SLTA/Sederajat. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk laki-laki lebih tinggi (30,36%) dibandingkan penduduk perempuan (28,08%).

**Tabel IV.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin**

No	Pendidikan Terakhir	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tdk/Blm Sekolah	22.137	27,56	20.958	25,79	43.095	26,67
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.593	11,94	9.842	12,11	19.435	12,03
3	Tamat SD/ Sederajat	7.441	9,27	8.521	10,49	15.962	9,88
4	SLTP/Sederajat	7.635	9,51	8.929	10,99	16.564	10,25
5	SLTA/Sederajat	24.380	30,36	22.820	28,08	47.200	29,21
6	D-I/II	379	0,47	759	0,93	1.138	0,70
7	Akademi/D-III/Sarjana Muda	833	1,04	1.600	1,97	2.433	1,51
8	D-IV/S-I	7.428	9,25	7.569	9,31	14.997	9,28
9	S-II	468	0,58	267	0,33	735	0,45
10	S-III	17	0,02	1	0,00	18	0,01
<b>Jumlah</b>		<b>80.311</b>	<b>100,00</b>	<b>81.266</b>	<b>100,00</b>	<b>161.577</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Untuk level pendidikan tamat SLTP/ sederajat, lebih banyak perempuan sebesar 10,99 % yang menamatkan pendidikannya dari pada penduduk laki-laki yang hanya 9,51 %. Sementara level pendidikan tinggi, mulai dari jenjang Diploma I sampai dengan jenjang Diploma IV, lebih banyak penduduk perempuan yang menamatkan pendidikannya dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Selisih angka yang tidak begitu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan *gender* dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Kota Bima. Ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan.

Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan. Yang tidak kalah penting adalah dalam upaya peningkatan peranan perempuan sebagai guru bagi anak-anaknya, baik di rumah tangga maupun di lingkungan sosial.

Dari Tabel IV.16 di bawah ini dapat dilihat jumlah penduduk Kota Bima usia 7- 15 tahun yang tidak/belum sekolah cukup banyak yakni 17.707 orang. Lebih banyak penduduk laki-laki yang tidak bersekolah dibandingkan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk yang tidak tamat SD cukup tinggi sebesar 7.580 orang (4,69 persen) dari total jumlah penduduk Kota Bima.

Angka 7.580 jiwa ini merupakan angka kumulatif dari pencatatan yang dilakukan petugas pelayanan terhadap penduduk yang mengurus Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Pada usia pendidikan dasar 14 dan 15 cukup banyak penduduk Kota Bima yang tidak menamatkan pendidikan dasar setingkat SD. Tentu saja ini menuntut perhatian dari Pemerintah Kota untuk merangkul anak usia ini untuk tetap dan mau melanjutkan pendidikan, apakah melalui paket belajar atau melalui program lain yang mendukung upaya peningkatan pendidikan dasar.

**Tabel IV.16 Jumlah Penduduk yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD**

Usia	Tidak/Belum Sekolah				Tidak Tamat SD			
	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%
7	1.363	1.327	2.690	15,19	112	120	232	3,06
8	1.400	1.233	2.633	14,87	179	164	343	4,53
9	1.244	1.231	2.475	13,98	278	237	515	6,79
10	1.155	1.097	2.252	12,72	408	424	832	10,98
11	1.067	1.023	2.090	11,80	537	461	998	13,17
12	977	790	1.767	9,98	550	514	1.064	14,04
13	710	714	1.424	8,04	557	566	1.123	14,82
14	671	583	1.254	7,08	639	606	1.245	16,42
15	607	515	1.122	6,34	645	583	1.228	16,20
<b>Jumlah</b>	<b>9.194</b>	<b>8.513</b>	<b>17.707</b>	<b>100,00</b>	<b>3.905</b>	<b>3.675</b>	<b>7.580</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

### **b. Komposisi Penduduk Menurut Agama**

Komposisi penduduk menurut agama menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu kota pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan gambar tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

**Tabel IV.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin**

No	Agama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Islam	79.199	98,62	80.199	98,69	159.398	98,65
2	Kristen	615	0,77	606	0,75	1.221	0,76
3	Katholik	389	0,48	376	0,46	765	0,47
4	Hindu	96	0,12	74	0,09	170	0,11
5	Budha	12	0,01	11	0,01	23	0,01
6	Khonghucu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Kepercayaan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.311</b>	<b>100,00</b>	<b>81.266</b>	<b>100,00</b>	<b>161.577</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Informasi ini diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Bima memeluk agama Islam (98,65 persen), disusul kemudian pemeluk agama Kristen 0,76 persen, Katholik 0,47 persen, Hindu 0,11 persen dan penganut Budha hanya 0,01 persen.

Indikator ini digunakan untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait kehidupan beragama dan sarana peribadatan yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan. Sekaligus juga dapat melihat sejauh mana penerapan toleransi masing-masing individu di lingkungan masyarakat dalam menghargai keberagaman terutama dalam perbedaan agama yang dianut.

**Tabel IV.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Kecamatan**

Kecamatan	Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Khonghucu		Kepercayaan	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rasanae Barat	29.403	18,45	693	56,76	467	61,05	29	17,06	19	82,61	0	0,00	0	0,00
Rasanae Timur	19.818	12,43	12	0,98	3	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Asakota	36.290	22,77	218	17,85	104	13,59	52	30,59	3	13,04	0	0,00	0	0,00
Raba	40.077	25,14	169	13,84	100	13,07	70	41,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mpunda	33.810	21,21	129	10,57	91	11,90	19	11,18	1	4,35	0	0,00	0	0,00
Jumlah	<b>159.398</b>	<b>100,00</b>	<b>1.221</b>	<b>100,00</b>	<b>765</b>	<b>100,00</b>	<b>170</b>	<b>100,00</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

### **c. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan**

#### **1) Angka Perkawinan Kasar**

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya seorang perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi di masa datang. Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.

**Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan**

Kecamatan	Belum Kawin				Kawin			
	L	%	P	%	L	%	P	%
Rasanae Barat	8.036	19,86	7.053	19,64	6.497	17,54	6.637	17,56
Rasanae Timur	4.541	11,23	4.136	11,52	4.924	13,30	5.021	13,29
Asakota	9.435	23,32	8.186	22,79	8.449	22,81	8.568	22,67
Raba	9.860	24,37	8.735	24,32	9.418	25,43	9.659	25,56
Mpunda	8.582	21,21	7.805	21,73	7.747	20,92	7.905	20,92
Jumlah	<b>40.454</b>	<b>100,00</b>	<b>35.915</b>	<b>100,00</b>	<b>37.035</b>	<b>100,00</b>	<b>37.790</b>	<b>100,00</b>

**Lanjutan Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan**

Kecamatan	Cerai Hidup				Cerai Mati			
	L	%	P	%	L	%	P	%
Rasanae Barat	338	23,85	611	23,85	307	21,85	1.132	22,64
Rasanae Timur	152	10,73	256	9,99	222	15,80	581	11,62
Asakota	298	21,03	556	21,70	261	18,58	914	18,28
Raba	343	24,21	631	24,63	376	26,76	1.394	27,89
Mpunda	286	20,18	508	19,83	239	17,01	978	19,56
Jumlah	<b>1.417</b>	<b>100,00</b>	<b>2.562</b>	<b>100,00</b>	<b>1.405</b>	<b>100,00</b>	<b>4.999</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di semua kecamatan persentase penduduk perempuan dengan status kawin lebih tinggi dari pada penduduk laki-laki dengan status kawin. Hal ini berbanding terbalik dengan penduduk status belum kawin, dimana laki-laki yang belum kawin lebih banyak dari pada perempuan yang belum kawin.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk dengan status cerai hidup, hanya separuh penduduk laki-laki yang berstatus cerai hidup apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini menandakan beberapa saat setelah perceraian kebanyakan laki-laki kembali melakukan perkawinan kembali.

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk dalam jangka waktu dan wilayah tertentu juga berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam usaha meningkatkan kualitas keluarga.

**Tabel IV.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan**

No	Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	40.454	50,37	35.915	44,19	76.369	47,26
2	Kawin	37.035	46,11	37.790	46,50	74.825	46,31
3	Cerai Hidup	1.417	1,76	2.562	3,15	3.979	2,46
4	Cerai Mati	1.405	1,75	4.999	6,15	6.404	3,96
<b>Jumlah</b>		<b>80.311</b>	<b>100,00</b>	<b>81.266</b>	<b>100,00</b>	<b>161.577</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Di Kota Bima, status belum kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 47,26 % atau 76.369 jiwa dimana komposisi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yang kedua yaitu kategori kawin sebesar 46,31 % atau 74.825 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Untuk status cerai mati persentasenya sebesar 3,96 %. Adapun status perkawinan yang terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 2,46 % atau sebanyak 3.979 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.



**Gambar IV.7 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan**

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan kasar merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

**Tabel IV.21 Angka Perkawinan Kasar per Kecamatan**

No	Kecamatan		Status Kawin	Jumlah Penduduk			Angka Perkawinan Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Akhir Tahun	Pertengahan Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	13.134	30.128	30.611	30.370	432,47
2	52.72.02	Rasanae Timur	9.945	19.184	19.833	19.509	509,78
3	52.72.03	Asakota	17.017	35.388	36.667	36.028	472,33
4	52.72.04	Raba	19.077	39.786	40.416	40.101	475,72
5	52.72.05	Mpunda	15.652	33.365	34.050	33.708	464,35
Jumlah			<b>74.825</b>	<b>157.851</b>	<b>161.577</b>	<b>159.714</b>	<b>468,49</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Pernikahan adalah kemitraan atau hubungan yang mengikat yang disahkan oleh hukum antara dua orang dewasa tanpa adanya paksaan. Di Indonesia pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang yang baru, batas minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan dipersamakan 19 tahun. Batas usia tersebut, dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, mengurangi resiko perceraian dan mengurangi laju kelahiran serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Angka perkawinan kasar Kota Bima adalah 468,49 artinya dari 1.000 penduduk Kota Bima terdapat 468 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk status kawin tanpa memperdulikan urutan perkawinan dan umur pelaku perkawinan tersebut, baik yang usianya sudah pantas maupun yang belum. Jika dilihat dari setiap kecamatan di Kota Bima, Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 509,78 dibandingkan dengan kecamatan lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kecamatan Rasanae Barat yaitu dengan 432,47.

## 2) Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun. Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karna dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebab. Sementara penduduk berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Dengan kata lain, angka perkawinan umum merupakan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu. Seperti angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembagiannya adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin.

**Tabel IV.22 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan**

No	Kecamatan		Status Kawin	Jumlah Penduduk Umur >= 15	Angka Perkawinan Umum
	Kode	Nama			
1	52.72.01	Rasanae Barat	13.134	22.599	581,18
2	52.72.02	Rasanae Timur	9.945	14.605	680,93
3	52.72.03	Asakota	17.017	26.322	646,49
4	52.72.04	Raba	19.077	30.104	633,70
5	52.72.05	Mpunda	15.652	25.063	624,51
Jumlah			<b>74.825</b>	<b>118.693</b>	<b>630,41</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Untuk Kota Bima, angka perkawinan umum sebesar 630,41 yang artinya dari 1.000 penduduk terdapat 630 penduduk usia di atas 15 tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di kecamatan Rasanae Timur dengan 680,93 dan yang terendah berada di kecamatan Rasanae Barat dengan 581,18.

### **3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur**

Indikator angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja. angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka perkawinan spesifik merupakan angka perkawinan berdasarkan umur dan jenis kelamin berfungsi untuk menginformasikan perbandingan perkawinan antar kelompok umur dan antar jenis kelamin. Berdasarkan Tabel IV.23 berikut ini memperlihatkan jumlah penduduk laki-laki usia 15-19 tahun adalah 6.697 jiwa dan jumlah penduduk berstatus kawin untuk kelompok umur yang sama adalah sebesar 109 jiwa, maka angka perkawinan spesifik yang didapat adalah 16,28 yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk laki-laki usia 15-19 tahun terdapat 16 orang berstatus kawin. Adapun angka perkawinan spesifik dari 260 jiwa berjenis kelamin perempuan dari 6.340 jiwa penduduk perempuan usia 15-19 tahun adalah 41,01 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun terdapat 41 orang berstatus kawin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cepat menikah dibandingkan laki-laki. Meskipun kecil, angka ini harus menjadi perhatian semua pihak karna seharusnya kelompok usia ini masih berada di bangku sekolah.

Salah satu tujuan diubahnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, adalah untuk menunda usia kawin bagi anak perempuan. Diketuinya angka perkawinan menurut umur dan jenis kelamin dapat memberikan gambaran kepada pemerintah untuk pengembangan program-program yang ditujukan kepada remaja terutama tentang penundaan perkawinan.

**Tabel IV.23 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Penduduk Berstatus Kawin			<i>Age Specific Marriage Rate</i>		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	15-19	6.697	6.340	13.037	109	260	369	16,28	41,01	28,30
2	20-24	6.386	6.730	13.116	970	1.838	2.808	151,89	273,11	214,09
3	25-29	6.280	6.277	12.557	2.980	4.046	7.026	474,52	644,58	559,53
4	30-34	6.092	6.326	12.418	4.481	5.244	9.725	735,55	828,96	783,14
5	35-39	6.399	6.396	12.795	5.403	5.487	10.890	700,27	857,88	851,11
6	40-44	5.976	6.424	12.400	5.324	5.426	10.750	904,12	844,65	866,94
7	45-49	5.202	5.609	10.811	4.679	4.664	9.343	1.023,45	831,52	864,21
8	50-54	4.483	4.621	9.104	4.092	3.682	7.774	1.043,72	796,80	853,91
9	55-59	3.461	3.871	7.332	3.144	2.933	6.077	1.182,32	757,69	828,83
10	60-64	2.651	2.805	5.456	2.366	1.872	4.238	1.185,97	667,38	776,76
11	65-69	1.841	2.129	3.970	1.571	1.196	2.767	1.285,17	561,77	696,98
12	70-74	1.261	1.416	2.677	1.020	632	1.652	808,88	446,33	617,11
13	>=75	1.298	1.722	3.020	896	510	1.406	690,29	296,17	465,56
Jumlah		<b>58.027</b>	<b>60.666</b>	<b>118.693</b>	<b>37.035</b>	<b>37.790</b>	<b>74.825</b>	<b>638,24</b>	<b>622,92</b>	<b>630,41</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

#### 4) Rata-rata Usia Kawin Pertama/ *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)*

Definisi *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)* adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah. Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan serta program lainnya untuk pendewasaan usia perkawinan.

Untuk memperoleh rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur. Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)*. Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan keturunan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut. Status Lajang yakni keadaan dimana seorang laki-laki ataupun perempuan berstatus belum pernah kawin atau belum berumah tangga. Terdapat 14.684 jiwa perempuan yang belum pernah menikah atau berstatus lajang di Kota Bima. Persentase lajang tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dengan angka 95,84 %, hal itu dipicu karena pada kelompok umur tersebut belum matang untuk melakukan pernikahan dan menjadi kepala keluarga. Pada kelompok umur 45-49 menjadi persentase lajang terendah dengan angka 284 jiwa atau 5,06 %.

**Tabel IV.24 Jumlah Perempuan (Usia 15-49 Tahun) menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2023**

No	Kelompok Umur	Status Perkawinan Perempuan Usia 15-45 Tahun				Jumlah Penduduk Perempuan (15-49 Tahun)	Proporsi Perempuan Belum Kawin (%)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (15-49 tahun)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) (25-49 Tahun)
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati				
1	15-19	6.076	260	3	1	6.340	95,84	36 tahun	38 tahun
2	20-24	4.807	1.838	78	7	6.730	71,43		
3	25-29	2.021	4.046	193	17	6.277	32,20		
4	30-34	737	5.244	311	34	6.326	11,65		
5	35-39	403	5.487	402	104	6.396	6,30		
6	40-44	356	5.426	476	166	6.424	5,54		
7	45-49	284	4.664	358	303	5.609	5,06		
<b>Jumlah</b>		<b>14.684</b>	<b>26.965</b>	<b>1.821</b>	<b>632</b>	<b>44.102</b>	<b>33,30</b>	<b>36 tahun</b>	<b>38 tahun</b>

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Dari table di atas dapat dihitung angka perkawinan umur pertama/SMAM (*Singulate Mean Age at Marriage*) perempuan di Kota Bima pada tahun 2023 yakni 36, ini berarti bahwa perkawinan pertama rata-rata perempuan di Kota Bima dilakukan pada usia 36 tahun. Angka ini cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan di Kota Bima telah menunda umur kawin pertama mereka.

## 5) Angka Perceraian Kasar (*Divorce*)

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin. Bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

**Tabel IV.25 Angka Perceraian Kasar per Kecamatan**

No	Kecamatan		Status Cerai Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Perceraian Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Akhir Tahun	Tengah Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	949	30.128	30.611	30.370	31,25
2	52.72.02	Rasanae Timur	408	19.184	19.833	19.509	20,91
3	52.72.03	Asakota	854	35.388	36.667	36.028	23,70
4	52.72.04	Raba	974	39.786	40.416	40.101	24,29
5	52.72.05	Mpunda	794	33.365	34.050	33.708	23,56
<b>Jumlah</b>			<b>3.979</b>	<b>157.851</b>	<b>161.577</b>	<b>159.714</b>	<b>24,91</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Secara keseluruhan ada sebanyak 24,91 yang artinya terdapat perceraian sebanyak 25 per seribu penduduk pada tahun 2023 di Kota Bima. Angka perceraian kasar tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan angka 31,25 yang berarti terdapat 31-32 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2023.

## 6) Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Umum ini merupakan salah satu indikator angka perceraian yang lebih cermat karna dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang terkena resiko perceraian yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

**Tabel IV.26 Angka Perceraian Umum per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Angka Perceraian Umum
	Kode	Nama	Status Cerai Hidup	Umur >= 15	
1	52.72.01	Rasanae Barat	949	22.599	41,99
2	52.72.02	Rasanae Timur	408	14.605	27,94
3	52.72.03	Asakota	854	26.322	32,44
4	52.72.04	Raba	974	30.104	32,35
5	52.72.05	Mpunda	794	25.063	31,68
Jumlah			<b>3.979</b>	<b>118.693</b>	<b>33,52</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah

Informasi data tersebut dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai hidup. Penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan, karena pada umumnya usia tersebut belum termasuk usia perkawinan dan mereka tidak beresiko bercerai.

Angka perceraian umum di Kota Bima sebesar 33,52 artinya dari seribu penduduk terdapat 34 penduduk berstatus cerai hidup pada tahun 2023. Kecamatan Rasanae Barat memiliki angka perceraian tertinggi 41,99 yang berarti terdapat 42 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2023. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan yang angka perceraianya terendah yaitu 27,94 yang berarti terdapat 28 status cerai hidup dalam seribu penduduk pada tahun 2023.

Berdasarkan data yang ada salah satu faktor penyebab perceraian yang dicatatkan di Pengadilan Agama Kota Bima adalah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta dikarenakan meninggalkan salah satu pihak. Meskipun kecil, angka perceraian ini menunjukkan kualitas perkawinan individu di Kota Bima, sehingga perlu keikutsertaan semua pihak dalam mewujudkan perkawinan yang berkualitas. Sehingga ketika ada permasalahan dalam rumah tangga pasangan suami istri tidak cepat dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

### **3. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Keluarga**

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penanganan kemiskinan, dan kesehatan. Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya.

Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga Inti (*Nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin;

- Keluarga Luas (*Extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

- Jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
- Status hubungan dalam keluarga;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
- Karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan;
- Karakteristik kepala keluarga menurut status bekerja.

#### **a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.**

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan, dan lain sebagainya.

**Tabel IV.27 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Jumlah Keluarga		Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.611	18,95	9.942	19,27	3
2	52.72.02	Rasanae Timur	19.833	12,27	6.619	12,83	3
3	52.72.03	Asakota	36.667	22,69	11.226	21,76	3
4	52.72.04	Raba	40.416	25,01	13.244	25,67	3
5	52.72.05	Mpunda	34.050	21,07	10.567	20,48	3
Jumlah			<b>161.577</b>	<b>100,00</b>	<b>51.598</b>	<b>100,00</b>	<b>3</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk dari adanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri satu sama lain yang dinamakan perkawinan. Keluarga dipimpin oleh kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan keluarga yakni kesejahteraan keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari sudut pandang banyaknya anggota keluarga. Dari tabel IV.27 terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Bima sebanyak 3 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Bima merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap kecamatan juga terdiri dari 3 orang per keluarga. Jumlah kepala keluarga di Kota Bima sebanyak 51.598 kepala keluarga yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Raba memiliki jumlah kepala keluarga paling banyak yaitu 13.244 (25,67 %) kemudian disusul oleh kecamatan Asakota sebanyak 11.226 kepala keluarga (21,76 %) dan Kecamatan Mpunda sebanyak 10.567 kepala keluarga (20,48 %), lalu Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 9.942 kepala keluarga (19,27 %). Sedangkan jumlah kepala keluarga terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 6.619 kepala keluarga (12,83 %).

## b. Status Hubungan dalam Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*), dan pola pengasuhan anak. Anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga atau family lainnya.

**Tabel IV.28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dalam Keluarga**

No	SHDK	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Kepala Keluarga	40.932	50,967	10.666	13,125	51.598	31,934
2	Suami	3	0,004	0	0,000	3	0,002
3	Istri	0	0,000	35.318	43,460	35.318	21,858
4	Anak	38.224	47,595	33.896	41,710	72.120	44,635
5	Menantu	0	0,000	1	0,001	1	0,001
6	Cucu	487	0,606	422	0,519	909	0,563
7	Orang Tua	15	0,019	118	0,145	133	0,082
8	Mertua	10	0,012	79	0,097	89	0,055
9	Family Lain	626	0,779	737	0,907	1.363	0,844
10	Pembantu	0	0,000	3	0,004	3	0,002
11	Lainnya	14	0,017	26	0,032	40	0,025
<b>Jumlah</b>		<b>80.311</b>	<b>100,000</b>	<b>81.266</b>	<b>100,000</b>	<b>161.577</b>	<b>100,000</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Tabel IV.28 di atas menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah. Dapat dilihat bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri, yakni 40.932 kepala keluarga, 35.318 diantaranya memiliki istri. Perempuan yang menjadi kepala keluarga angkanya cukup tinggi yakni 10.666 jiwa, salah satu penyebabnya adalah perceraian dan kematian kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup, cerai mati, maupun nikah dibawah tangan. Faktor mutasi pun ikut mempengaruhi angka tersebut, karena fakta di lapangan bahwa banyak kepala keluarga laki-laki yang harus merantau atau tidak tinggal bersama dalam waktu yang lama yang mengharuskan mereka terdata dalam kartu keluarga berbeda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki. Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (extended family) di Kota Bima jumlahnya tidak besar.

Status hubungan dalam keluarga dipergunakan untuk mengetahui posisi anggota keluarga dengan kepala keluarga. Dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dalam keluarga, status terbesar adalah anak yaitu sebanyak 72.120 jiwa atau sebesar 44,635 %, dengan jumlah anak laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 38.224 jiwa dibandingkan dengan jumlah anak perempuan yaitu sebesar 33.896 jiwa.

### **c. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kecamatan**

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan berstatus menikah maupun tidak yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara

ekonomi, sosial, maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui karena berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

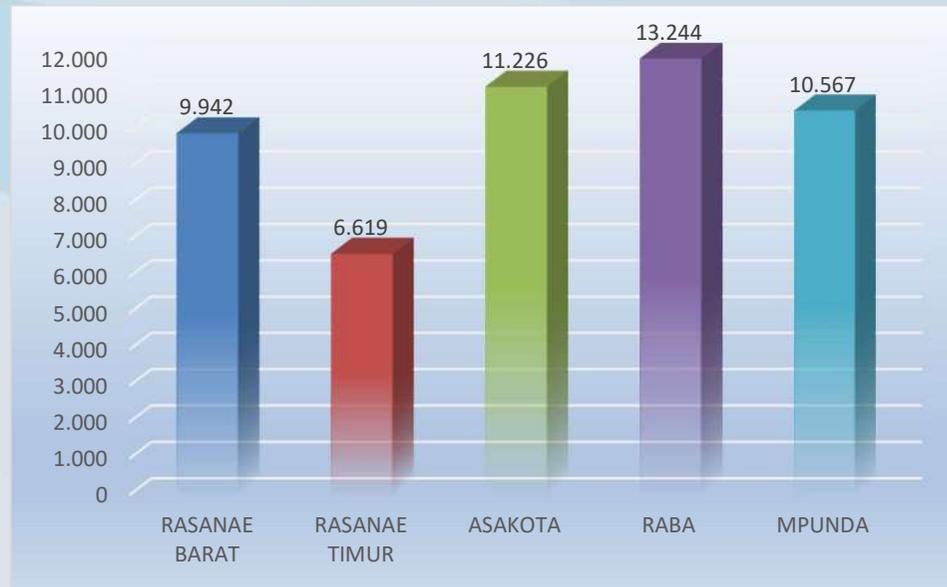
Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Dari Tabel IV.29 berikut ini dapat dilihat jumlah dan proporsi kepala keluarga Kota Bima tahun 2023 menurut kecamatan dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Bima adalah laki-laki yaitu 40.932 orang (79,33%).

**Tabel IV.29 Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan**

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	52.72.01	Rasanae Barat	7.454	18,21	2.488	23,33	9.942	19,27
2	52.72.02	Rasanae Timur	5.408	13,21	1.211	11,35	6.619	12,83
3	52.72.03	Asakota	9.188	22,45	2.038	19,11	11.226	21,76
4	52.72.04	Raba	10.417	25,45	2.827	26,50	13.244	25,67
5	52.72.05	Mpunda	8.465	20,68	2.102	19,71	10.567	20,48
Jumlah			<b>40.932</b>	<b>79,33</b>	<b>10.666</b>	<b>20,67</b>	<b>51.598</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.



**Gambar IV.8 Grafik Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan**

Tabel IV.29 juga menunjukkan banyaknya kepala keluarga yang ada di lima wilayah kecamatan di Kota Bima. Ada sebanyak 51.598 kepala keluarga yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Bima. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga tertinggi berada di Kecamatan Raba yaitu 13.244 kepala keluarga, sedangkan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terendah berada di Kecamatan Rasanae Timur dengan 6.619 kepala keluarga.

Sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 10.666 orang (20,67 %) atau dengan perbandingannya sekitar 4 : 1, yang artinya dari 4 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan. Tabel IV.29 juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai, atau sebab-sebab yang lain.

**Tabel IV.30 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Barat**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.01</b>		<b>Rasanae Barat</b>	<b>7.454</b>	<b>74,97</b>	<b>2.488</b>	<b>25,03</b>	<b>9.942</b>	<b>100,00</b>
1	1001	Paruga	1.301	17,45	456	18,33	1.757	17,67
2	1002	Nae	1.015	13,62	360	14,47	1.375	13,83
3	1003	Sarae	1.230	16,50	406	16,32	1.636	16,46
4	1004	Tanjung	1.560	20,93	500	20,10	2.060	20,72
5	1013	Pane	641	8,60	283	11,37	924	9,29
6	1014	Dara	1.707	22,90	483	19,41	2.190	22,03

**Tabel IV.31 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Timur**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.02</b>		<b>Rasanae Timur</b>	<b>5.408</b>	<b>81,70</b>	<b>1.211</b>	<b>18,30</b>	<b>6.619</b>	<b>100,00</b>
1	1004	Kumbe	1.050	19,42	295	24,36	1.345	20,32
2	1008	Lampe	436	8,06	89	7,35	525	7,93
3	1009	Dodu	901	16,66	202	16,68	1.103	16,66
4	1011	Nungga	676	12,50	126	10,40	802	12,12
5	1018	Kodo	599	11,08	155	12,80	754	11,39
6	1019	Oi Fo'o	624	11,54	96	7,93	720	10,88
7	1020	Lelamase	610	11,28	113	9,33	723	10,92
8	1021	Oimbo	512	9,47	135	11,15	647	9,77

**Tabel IV.32 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Asakota**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.03</b>		<b>Asakota</b>	<b>9.188</b>	<b>81,85</b>	<b>2.038</b>	<b>18,15</b>	<b>11.226</b>	<b>100,00</b>
1	1001	Melayu	1.344	14,63	440	21,59	1.784	15,89
2	1002	Jatiwangi	1.924	20,94	409	20,07	2.333	20,78
3	1003	Jatibaru	1.603	17,45	387	18,99	1.990	17,73
4	1004	Kolo	1.556	16,94	311	15,26	1.867	16,63
5	1005	Jatibaru Timur	1.155	12,57	233	11,43	1.388	12,36
6	1006	Ule	1.606	17,48	258	12,66	1.864	16,60

**Tabel IV.33 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Raba**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
<b>52.72.04</b>		<b>Raba</b>	<b>10.417</b>	<b>78,65</b>	<b>2.827</b>	<b>21,35</b>	<b>13.244</b>	<b>100,00</b>
1	1001	Penaraga	1.248	11,98	400	14,15	1.648	12,44
2	1002	Rontu	865	8,30	242	8,56	1.107	8,36
3	1003	Penanae	1.063	10,20	288	10,19	1.351	10,20
4	1004	Kendo	455	4,37	89	3,15	544	4,11
5	1005	Ntobo	1.092	10,48	222	7,85	1.314	9,92
6	1006	Nitu	446	4,28	66	2,33	512	3,87
7	1007	Rabangodu Selatan	1.029	9,88	270	9,55	1.299	9,81
8	1008	Rabandompu Timur	1.002	9,62	287	10,15	1.289	9,73
9	1009	Rite	619	5,94	143	5,06	762	5,75
10	1010	Rabandompu Barat	1.379	13,24	439	15,53	1.818	13,73
11	1011	Rabangodu Utara	1.219	11,70	381	13,48	1.600	12,08

**Tabel IV.34 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Mpunda**

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
	<b>52.72.05</b>	<b>Mpunda</b>	<b>8.465</b>	<b>80,11</b>	<b>2.102</b>	<b>19,89</b>	<b>10.567</b>	<b>100,00</b>
1	1001	Monggonao	1.022	12,07	283	13,46	1.305	12,35
2	1002	Sadia	922	10,89	212	10,09	1.134	10,73
3	1003	Santi	693	8,19	154	7,33	847	8,02
4	1004	Sambinae	950	11,22	185	8,80	1.135	10,74
5	1005	Penatoi	1.152	13,61	333	15,84	1.485	14,05
6	1006	Lewirato	512	6,05	128	6,09	640	6,06
7	1007	Mande	705	8,33	220	10,47	925	8,75
8	1008	Panggi	707	8,35	161	7,66	868	8,21
9	1009	Manggemaci	1.029	12,16	290	13,80	1.319	12,48
10	1010	Matakando	773	9,13	136	6,47	909	8,60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Banyaknya jumlah kepala keluarga di setiap kelurahan ditunjukkan pada informasi data jumlah kepala keluarga per kelurahan pada tabel IV.30-34. Ada 41 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan dalam wilayah Kota Bima. Jumlah kepala keluarga di Kota Bima ada sebanyak 51.598 KK dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 40.932 KK dan kepala keluarga perempuan ada 10.666 KK. Adapun jumlah kepala keluarga terbesar berada di Kelurahan Jatiwangi yang terletak di Kecamatan Asakota sebanyak 2.333 KK atau ada 4,52 % dari jumlah KK seluruh Kota Bima, sedangkan jumlah kepala keluarga terkecil berada di Kelurahan Nitu yang terletak di Kecamatan Raba dengan angka 512 KK atau 0,99 % dari jumlah KK seluruh Kota Bima.

#### **d. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur**

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Informasi data jumlah kepala keluarga berdasarkan kelompok umur dapat digunakan untuk mengetahui gambaran keadaan sosial dan ekonomi keluarga yang dikepalai oleh laki-laki ataupun perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga tertinggi berada pada umur 40-44 tahun yaitu sebanyak 6.772 KK atau ada 13,125 %, yang mana jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi berada pada umur 55-59 tahun dengan angka sebesar 1.076 jiwa (10,088 %). Hal ini menunjukkan bahwa mereka menjadi kepala keluarga karena telah ditinggal suaminya sebab kematian atau hal lainnya. Kepala keluarga terendah berada pada umur 10-14 dengan angka 1 atau ada 0,002% serta sebanyak 2.474 KK atau 5,795 % kepala keluarga yang berumur  $\geq 75$ , hal itu dapat menunjukkan bahwa angka harapan hidup kepala keluarga di Kota Bima tergolong tinggi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan hidup perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, dimana pada kelompok umur 55-59 tahun jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki justru mengalami penurunan. Untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan tangguh dengan memiliki keterampilan-ketrampilan yang dapat menunjang kehidupannya dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologi, apabila kelak sudah tidak memiliki suami lagi, baik yang disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati.

Dari table IV.35 berikut ini juga dapat dilihat kepala keluarga pada kelompok umur 10-14 tahun dan 15-19 tahun (usia mengenyam pendidikan) tentu perlu menjadi perhatian seluruh pihak, karena seharusnya pada usia ini berada pada bangku sekolah.

**Tabel IV.35 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2	5-9	0	0,000	0	0,000	0	0,000
3	10-14	1	0,002	0	0,000	1	0,002
4	15-19	144	0,352	47	0,441	191	0,370
5	20-24	1.156	2,824	269	2,522	1.425	2,762
6	25-29	3.320	8,111	432	4,050	3.752	7,272
7	30-34	4.881	11,925	649	6,085	5.530	10,717
8	35-39	5.836	14,258	868	8,138	6.704	12,993
9	40-44	5.712	13,955	1.060	9,938	6.772	13,125
10	45-49	5.051	12,340	1.028	9,638	6.079	11,781
11	50-54	4.408	10,769	1.061	9,947	5.469	10,599
12	55-59	3.434	8,390	1.076	10,088	4.510	8,741
13	60-64	2.637	6,442	1.062	9,957	3.699	7,169
14	65-69	1.834	4,481	1.047	9,816	2.881	5,584
15	70-74	1.250	3,054	861	8,072	2.111	4,091
16	>=75	1.268	3,098	1.206	11,307	2.474	4,795
Jumlah		<b>40.932</b>	<b>100,000</b>	<b>10.666</b>	<b>100,000</b>	<b>51.598</b>	<b>100,000</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

### e. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin

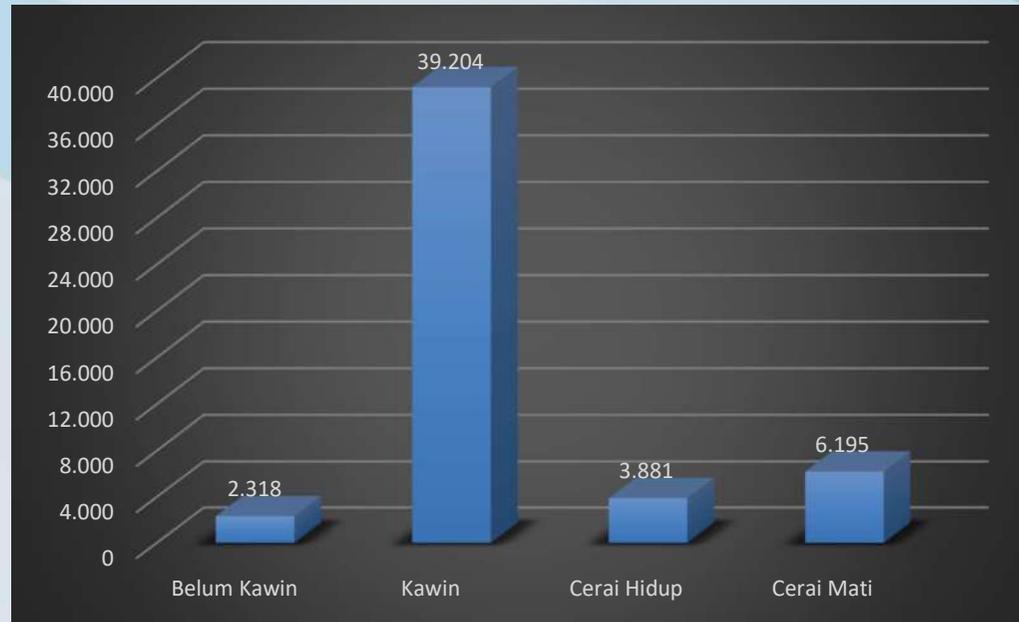
Kepala keluarga merupakan seseorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Informasi kepala keluarga berdasarkan status perkawinan, dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam bidang sosial yang hubungannya dengan status perkawinan dan jenis kelamin penduduk.

Pada umumnya kepala keluarga di Kota Bima sebanyak 39.204 (75,98 %) berstatus kawin. Di samping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 2.318 jiwa setara 4,49 persen.

**Tabel IV.36 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan**

No	Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	1.211	2,96	1.107	10,38	2.318	4,49
2	Kawin	36.959	90,29	2.245	21,05	39.204	75,98
3	Cerai Hidup	1.381	3,37	2.500	23,44	3.881	7,52
4	Cerai Mati	1.381	3,37	4.814	45,13	6.195	12,01
Jumlah		<b>40.932</b>	<b>100,00</b>	<b>10.666</b>	<b>100,00</b>	<b>51.598</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.



**Gambar IV.9 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan**

Berdasarkan Tabel IV.36 ada sebanyak 51.598 kepala keluarga di Kota Bima dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 40.932 KK dan ada 10.666 kepala keluarga perempuan. Hal tersebut menunjukkan kepala keluarga yang dikepalai oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Hal yang menarik adalah kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin tampak tinggi, hal ini kemungkinan juga dikarenakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Selain itu juga disebabkan laki-laki yang berpoligami secara sah. Dari tabel di atas dapat dilihat, persentase perempuan yang menjadi kepala keluarga dan berstatus kawin adalah sebanyak 2.245 atau 21,05 persen dari total kepala keluarga berjenis kelamin perempuan dengan status kawin .

Perbedaan mencolok terlihat pada proporsi jenis kelamin, perbandingan jumlah kepala keluarga dengan status cerai mati yang didominasi perempuan, sebanyak 1.381 KK atau ada 3,37 % dari total kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki dan 4.814 KK perempuan atau 45,13 % dari total kepala keluarga berjenis kelamin perempuan. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa perempuan bisa bertahan menjadi kepala keluarga setelah ditinggal mati suami.

Adapun 2.318 kepala keluarga berstatus belum kawin biasanya merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian. Namun hal ini perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau hidup sendirian.

#### **f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Status Perkawinan**

Dari tabel IV.37 berikut ini terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 35-39 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga di Kota Bima berada pada kelompok produktif. Oleh sebab itu kiranya perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana.

Sedangkan kepala keluarga yang berstatus belum kawin terbesar berada pada kelompok umur 25-29 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun.

**Tabel IV.37 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan**

No	Kelompok Umur	Status Perkawinan								Jumlah	
		Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	0-4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	5-9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	10-14	1	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
4	15-19	69	2,98	118	0,30	3	0,08	1	0,02	191	0,37
5	20-24	301	12,99	1.021	2,60	96	2,47	7	0,11	1.425	2,76
6	25-29	347	14,97	3.089	7,88	294	7,58	22	0,36	3.752	7,27
7	30-34	299	12,90	4.676	11,93	501	12,91	54	0,87	5.530	10,72
8	35-39	241	10,40	5.677	14,48	648	16,70	138	2,23	6.704	12,99
9	40-44	221	9,53	5.642	14,39	698	17,99	211	3,41	6.772	13,12
10	45-49	209	9,02	4.932	12,58	570	14,69	368	5,94	6.079	11,78
11	50-54	180	7,77	4.318	11,01	436	11,23	535	8,64	5.469	10,60
12	55-59	175	7,55	3.346	8,53	253	6,52	736	11,88	4.510	8,74
13	60-64	96	4,14	2.524	6,44	168	4,33	911	14,71	3.699	7,17
14	65-69	78	3,36	1.718	4,38	105	2,71	980	15,82	2.881	5,58
15	70-74	46	1,98	1.123	2,86	54	1,39	888	14,33	2.111	4,09
16	>=75	55	2,37	1.020	2,60	55	1,42	1.344	21,69	2.474	4,79
<b>Jumlah</b>		<b>2.318</b>	<b>100,00</b>	<b>39.204</b>	<b>100,00</b>	<b>3.881</b>	<b>100,00</b>	<b>6.195</b>	<b>100,00</b>	<b>51.598</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

## g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Dari tabel IV.38 berikut dapat dilihat persentase terbesar pekerjaan kepala keluarga yaitu wiraswasta yaitu 12.047 KK dan petani/pekebun sebesar 7.249 KK. Untuk kelompok perempuan proporsi terbesar adalah mengurus rumah tangga yakni 7.277 KK. Data tersebut mengindikasikan bahwa peran usaha swasta dan pertanian/perkebunan di Kota Bima sangat berkontribusi pada pembentukan pendapatan perkapita penduduk Kota Bima dengan demikian sektor industri kecil dan perdagangan masih sebagai lahan penyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk Kota Bima.

**Tabel IV.38 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	2.975	7,268	764	7,163	3.739	7,246
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	5	0,012	7.272	68,179	7.277	14,103
3	PELAJAR/MAHASISWA	363	0,887	202	1,894	565	1,095
4	PENSIUNAN	1.232	3,010	245	2,297	1.477	2,863
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3.741	9,140	493	4,622	4.234	8,206
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	296	0,723	0	0,000	296	0,574
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	659	1,610	1	0,009	660	1,279
8	PERDAGANGAN	200	0,489	79	0,741	279	0,541
9	PETANI/PEKEBUN	7.192	17,571	57	0,534	7.249	14,049

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
10	PETERNAK	26	0,064	0	0,000	26	0,050
11	NELAYAN/PERIKANAN	1.064	2,599	2	0,019	1.066	2,066
12	INDUSTRI	6	0,015	1	0,009	7	0,014
13	KONSTRUKSI	12	0,029	1	0,009	13	0,025
14	TRANSPORTASI	301	0,735	0	0,000	301	0,583
15	KARYAWAN SWASTA	3.134	7,657	183	1,716	3.317	6,429
16	KARYAWAN BUMN	390	0,953	13	0,122	403	0,781
17	KARYAWAN BUMD	68	0,166	2	0,019	70	0,136
18	KARYAWAN HONORER	2.104	5,140	268	2,513	2.372	4,597
19	BURUH HARIAN LEPAS	1.276	3,117	5	0,047	1.281	2,483
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.362	3,327	11	0,103	1.373	2,661
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	60	0,147	0	0,000	60	0,116
22	BURUH PETERNAKAN	13	0,032	0	0,000	13	0,025
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0,002	31	0,291	32	0,062
24	TUKANG CUKUR	9	0,022	0	0,000	9	0,017
25	TUKANG LISTRIK	15	0,037	0	0,000	15	0,029
26	TUKANG BATU	525	1,283	0	0,000	525	1,017
27	TUKANG KAYU	460	1,124	0	0,000	460	0,892
28	TUKANG SOL SEPATU	3	0,007	1	0,009	4	0,008
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	37	0,090	0	0,000	37	0,072
30	TUKANG JAHIT	37	0,090	19	0,178	56	0,109
31	TUKANG GIGI	1	0,002	0	0,000	1	0,002
32	PENATA RIAS	2	0,005	1	0,009	3	0,006
33	PENATA BUSANA	0	0,000	1	0,009	1	0,002
34	PENATA RAMBUT	3	0,007	1	0,009	4	0,008

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
35	MEKANIK	105	0,257	0	0,000	105	0,203
36	SENIMAN	9	0,022	1	0,009	10	0,019
37	TABIB	2	0,005	0	0,000	2	0,004
38	PARAJI	1	0,002	0	0,000	1	0,002
39	PERANCANG BUSANA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
40	PENTERJEMAH	1	0,002	0	0,000	1	0,002
41	IMAM MASJID	5	0,012	0	0,000	5	0,010
42	PENDETA	7	0,017	0	0,000	7	0,014
43	PASTOR	1	0,002	0	0,000	1	0,002
44	WARTAWAN	41	0,100	1	0,009	42	0,081
45	USTADZ/MUBALIGH	2	0,005	1	0,009	3	0,006
46	JURU MASAK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
47	PROMOTOR ACARA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
48	ANGGOTA DPR RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
49	ANGGOTA DPD RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
50	ANGGOTA BPK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
51	PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
52	WAKIL PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
55	DUTA BESAR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
56	GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
57	WAKIL GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
58	BUPATI	0	0,000	1	0,009	1	0,002
59	WAKIL BUPATI	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
60	WALIKOTA	1	0,002	0	0,000	1	0,002
61	WAKIL WALIKOTA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
62	ANGGOTA DPRD PROP.	3	0,007	0	0,000	3	0,006
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	16	0,039	0	0,000	16	0,031
64	DOSEN	171	0,418	11	0,103	182	0,353
65	GURU	522	1,275	131	1,228	653	1,266
66	PILOT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
67	PENGACARA	30	0,073	1	0,009	31	0,060
68	NOTARIS	6	0,015	0	0,000	6	0,012
69	ARSITEK	1	0,002	0	0,000	1	0,002
70	AKUNTAN	1	0,002	0	0,000	1	0,002
71	KONSULTAN	11	0,027	0	0,000	11	0,021
72	DOKTER	39	0,095	9	0,084	48	0,093
73	BIDAN	0	0,000	20	0,188	20	0,039
74	PERAWAT	53	0,129	10	0,094	63	0,122
75	APOTEKER	6	0,015	0	0,000	6	0,012
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0,000	0	0,000	0	0,000
77	PENYIAR TELEVISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
78	PENYIAR RADIO	1	0,002	0	0,000	1	0,002
79	PELAUT	74	0,181	0	0,000	74	0,143
80	PENELITI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
81	SOPIR	656	1,603	0	0,000	656	1,271
82	PIALANG	1	0,002	0	0,000	1	0,002
83	PARANORMAL	0	0,000	0	0,000	0	0,000
84	PEDAGANG	242	0,591	124	1,163	366	0,709

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
85	PERANGKAT DESA	1	0,002	0	0,000	1	0,002
86	KEPALA DESA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,000	3	0,028	3	0,006
88	WIRASWASTA	11.348	27,724	699	6,554	12.047	23,348
89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	1	0,002	0	0,000	1	0,002
90	ARTIS	0	0,000	0	0,000	0	0,000
91	ATLIT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
92	CHEFF	0	0,000	0	0,000	0	0,000
93	MANAJER	0	0,000	0	0,000	0	0,000
94	TENAGA TATA USAHA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
95	OPERATOR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
97	TEKNISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
98	ASISTEN AHLI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
99	PEKERJAAN LAINNYA	2	0,005	1	0,009	3	0,006
Jumlah		<b>40.932</b>	<b>100,000</b>	<b>10.666</b>	<b>100,000</b>	<b>51.598</b>	<b>100,000</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis pekerjaan digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang bekerja di sektor pekerjaan tertentu yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai. Dapat diindikasikan kepala keluarga yang tidak bekerja, biasanya ini dikarenakan kepala keluarga yang berusia lanjut dan tidak kuat bekerja.

Selain Kepala Keluarga yang tidak bekerja, juga ditemukan kepala keluarga yang pekerjaannya pelajar/mahasiswa. Hal ini dikarenakan perkawinan di usia sekolah, dan tidak melakukan pemutakhiran Kartu Keluarga setelah menikah. Selain itu juga disebabkan oleh kepala keluarga pindah atau meninggal. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan data yang dilaporkan oleh penduduk.

#### **h. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan**

Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga serta semakin tinggi juga tingkat pendidikan anggota keluarganya terutama anak-anaknya kelak. Karena Kepala Keluarga adalah contoh dan panutan bagi anak-anaknya. Jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

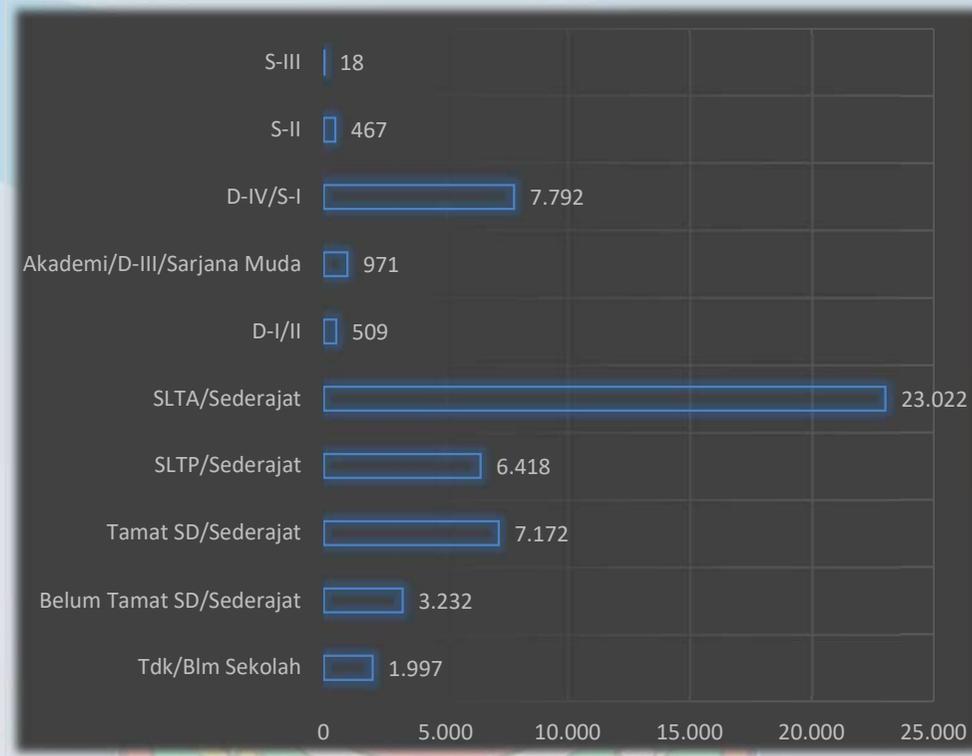
Tingkat pendidikan seorang kepala keluarga mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki seorang kepala keluarga bisa menjadi salah satu faktor kepala keluarga untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi keperluan hidup keluarganya. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan data di atas kepala keluarga didominasi oleh tamatan SLTA/Sederajat yakni 23.022 KK atau 44,62 %. Angka tersebut terdiri atas laki-laki dengan angka 19.139 (46,76 %) yang lebih banyak dibanding perempuan dengan angka 3.883 (36,41 %). Tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga yang rendah mengindikasikan pendapatan yang juga rendah, sehingga mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dari tabel IV.39, juga terlihat bahwa untuk kepala keluarga tamat SD/Sederajat sebesar 13,90 persen, tamat SLTP/sederajat 12,44 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,87 persen dan S1/S2/S3 Sebesar 16,04 persen. Sangat disayangkan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD yang persentasenya 10,13 persen. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, kebanyakan kepala keluarga perempuan berpendidikan rendah yaitu belum tamat SD dan tamat SD dengan angka 30,06 persen dari keseluruhan penduduk perempuan dengan status kepala keluarga. Proporsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki yang berpendidikan rendah yakni hanya 17,58 persen.

**Tabel IV.39 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	1.186	2,90	811	7,60	1.997	3,87
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.065	5,04	1.167	10,94	3.232	6,26
3	Tamat SD/Sederajat	5.133	12,54	2.039	19,12	7.172	13,90
4	SLTP/Sederajat	4.883	11,93	1.535	14,39	6.418	12,44
5	SLTA/Sederajat	19.139	46,76	3.883	36,41	23.022	44,62
6	Diploma I/II	365	0,89	144	1,35	509	0,99
7	Akademi/Diploma III	779	1,90	192	1,80	971	1,88
8	Siploma IV/Strata I	6.926	16,92	866	8,12	7.792	15,10
9	Strata II	439	1,07	28	0,26	467	0,91
10	Strata III	17	0,04	1	0,01	18	0,03
<b>Jumlah</b>		<b>40.932</b>	<b>100,00</b>	<b>10.666</b>	<b>100,00</b>	<b>51.598</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah



**Gambar IV.10 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

#### **4. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk melihat kualitas penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.

**Tabel IV.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	22.137	27,56	20.958	25,79	43.095	26,67
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.593	11,94	9.842	12,11	19.435	12,03
3	Tamat SD/Sederajat	7.441	9,27	8.521	10,49	15.962	9,88
4	SLTP/Sederajat	7.635	9,51	8.929	10,99	16.564	10,25
5	SLTA/Sederajat	24.380	30,36	22.820	28,08	47.200	29,21
6	Diploma I/II	379	0,47	759	0,93	1.138	0,70
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	833	1,04	1.600	1,97	2.433	1,51
8	Diploma IV/Strata I	7.428	9,25	7.569	9,31	14.997	9,28
9	Strata II	468	0,58	267	0,33	735	0,45
10	Strata III	17	0,02	1	0,00	18	0,01
Jumlah		<b>80.311</b>	<b>100,00</b>	<b>81.266</b>	<b>100,00</b>	<b>161.577</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Pada Tabel IV.40 dapat diketahui bahwa jumlah tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kota Bima adalah pada jenjang SLTA/Sederajat yaitu 47.200 jiwa dimana penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permintaan tenaga kerja dengan kriteria minimal pendidikan SLTA/Sederajat menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut sehingga jumlah penduduk pada tingkat pendidikan SLTA/Sederajat tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, kemudian disusul SLTP/Sederajat dengan 16.564 jiwa dengan jumlah laki-laki 7.635 jiwa dan perempuan 8.929 jiwa. Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan relatif lebih tinggi dari penduduk laki-laki.

Sementara level pendidikan tinggi, mulai dari jenjang Diploma I sampai dengan jenjang Strata I, lebih banyak penduduk perempuan yang menamatkan pendidikannya dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan Diploma I sampai dengan strata I adalah 9.928 orang, sementara untuk pendidikan laki-laki hanya 8.640 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Kota Bima. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan. Yang tidak kalah penting adalah dalam upaya peningkatan peranan perempuan sebagai guru bagi anak-anaknya, baik di rumah tangga maupun di lingkungan sosial. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak sekolah menunjukkan angka yang cukup besar yakni 43.095 jiwa, sehingga perlu dianalisa seberapa besar porsi usia wajib belajar didalamnya.

Dari Tabel IV.41 dapat dilihat jumlah penduduk Kota Bima usia 7-15 tahun yang tidak/belum sekolah cukup banyak yakni 17.707 orang. Untuk persentase penduduk usia 7 tahun yang tidak sekolah/Belum sekolah sebesar 15,19 persen dari total jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah. Lebih banyak penduduk laki-laki yang tidak bersekolah dibandingkan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk wajib belajar yang tidak tamat SD cukup tinggi sebesar 7.580 orang (4,69 persen) dari total jumlah penduduk Kota Bima.

Angka 7.580 orang ini merupakan angka kumulatif dari pencatatan yang dilakukan petugas pelayanan terhadap penduduk yang mengurus Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Pada usia pendidikan dasar 14 dan 15 cukup banyak penduduk Kota Bima yang tidak menamatkan pendidikan dasar setingkat SD. Tentu saja ini menuntut perhatian dari Pemerintah Kota Bima untuk merangkul anak usia ini untuk tetap dan mau melanjutkan pendidikan, apakah melalui paket belajar atau melalui program lain yang mendukung upaya peningkatan pendidikan dasar.

**Tabel IV.41 Jumlah Penduduk Wajib Belajar yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD**

Usia	Tidak/Belum Sekolah				Tidak Tamat SD			
	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%
7	1.363	1.327	2.690	15,19	112	120	232	3,06
8	1.400	1.233	2.633	14,87	179	164	343	4,53
9	1.244	1.231	2.475	13,98	278	237	515	6,79
10	1.155	1.097	2.252	12,72	408	424	832	10,98
11	1.067	1.023	2.090	11,80	537	461	998	13,17
12	977	790	1.767	9,98	550	514	1.064	14,04
13	710	714	1.424	8,04	557	566	1.123	14,82
14	671	583	1.254	7,08	639	606	1.245	16,42
15	607	515	1.122	6,34	645	583	1.228	16,20
Jumlah	<b>9.194</b>	<b>8.513</b>	<b>17.707</b>	<b>100,00</b>	<b>3.905</b>	<b>3.675</b>	<b>7.580</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

## 5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian

### a. Angka Kelahiran Kasar/*Crude Birth Rate (CBR)*

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran dimasa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran dimasa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.

**Tabel IV.42 Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan**

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Rasanae Barat	354	23,76	297	22,36	651	23,10
2	Rasanae Timur	165	11,07	147	11,07	312	11,07
3	Asakota	317	21,28	260	19,58	577	20,48
4	Raba	313	21,01	291	21,91	604	21,43
5	Mpunda	341	22,89	333	25,08	674	23,92
	Jumlah	<b>1.490</b>	<b>52,87</b>	<b>1.328</b>	<b>47,13</b>	<b>2.818</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

Dari Tabel IV.42 dapat diketahui bahwa jumlah kelahiran di Kota Bima tahun 2023 adalah sebanyak 2.818 kelahiran hidup, dengan kelahiran hidup tertinggi berada di Kecamatan Mpunda yaitu 674 terdiri dari laki-laki 341 anak dan perempuan 333 anak atau sebesar 23,92 % disusul Kecamatan Raba sebanyak 604 kelahiran hidup atau 21,43 %. Adapun kecamatan yang memiliki angka kelahiran hidup terendah adalah Kecamatan Rasanae Timur dengan angka 312 kelahiran hidup atau 11,07 %.

Bila dilihat dari proporsi tersebut jumlah kelahiran hidup yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak bila dibandingkan kelahiran perempuan. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya. Adapun angka kelahiran kasar (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

**Tabel IV.43 Angka Kelahiran Kasar per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Kelahiran Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Tengah Tahun	Akhir Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	651	30.128	30.370	30.611	21,44
2	52.72.02	Rasanae Timur	312	19.184	19.509	19.833	15,99
3	52.72.03	Asakota	577	35.388	36.028	36.667	16,02
4	52.72.04	Raba	604	39.786	40.101	40.416	15,06
5	52.72.05	Mpunda	674	33.365	33.708	34.050	20,00
Jumlah			<b>2.818</b>	<b>157.851</b>	<b>159.714</b>	<b>161.577</b>	<b>17,64</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Pada Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Angka kelahiran kasar di Kota Bima ada 17,64 artinya terdapat 17-18 kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2023. Angka kelahiran kasar tertinggi terdapat di Kecamatan Rasanae Barat dengan angka 21,44 yang artinya bahwa terdapat 21-22 kelahiran per 1.000 penduduk dan pada Kecamatan Raba merupakan angka kelahiran kasar terendah sebanyak 15,06 kelahiran artinya 15-16 kelahiran per 1.000 penduduk.

#### **b. Angka Kelahiran Menurut umur (*Age Spesific Fertility Rate* /ASFR)**

Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda, sehingga tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok umur 35-39 tahun. Terutama dengan tingkat kelahiran yang terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Bima. Angka kelahiran ini sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap kelompok umur yang berbeda. Sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak serta perencanaan pelaksanaan program keluarga berencana (KB).

**Tabel IV.44 Jumlah Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun) yang Sudah Kawin dan Melahirkan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Status Perkawinan Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun)		Jumlah Penduduk Perempuan Remaja (15-19 Tahun)	Jumlah Perempuan Remaja (15-19 Tahun) yang Sudah Melahirkan	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) dalam %
		Belum Kawin	Kawin			
1	Rasanae Barat	1.256	40	1.296	0	0,00
2	Rasanae Timur	763	26	789	0	0,00
3	Asakota	1.406	40	1.446	0	0,00
4	Raba	1.429	62	1.491	0	0,00
5	Mpunda	1.342	8	1.350	0	0,00
Jumlah		<b>6.196</b>	<b>176</b>	<b>6.372</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2023



# BAB V

## KUALITAS DAN MOBILITAS PENDUDUK

Tingkat kualitas penduduk merupakan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kualitas penduduk tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu daerah. Jika kuantitas membicarakan tentang angka-angka yang berhubungan dengan jumlah penduduk, maka pada pembahasan kualitas ini kita akan berbicara tentang nilai atau mutu yang dimiliki penduduk. Kualitas penduduk tersebut sangat mempengaruhi terhadap tingkat kemajuan suatu daerah. Hal ini terkait dengan kemampuan penduduk dalam mengolah dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran warganya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk suatu daerah antara lain:

### 1. Tingkat kesehatan penduduk

Kesehatan merupakan hal yang utama dan berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa kesehatan, manusia tidak akan dapat melaksanakan aktivitas kehidupan apapun. Pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh kesehatannya, apalagi bila sejak kecil kesehatannya terganggu maka pertumbuhan psikologi/mental dan fisiknya akan terganggu juga, serta kinerja dan produktivitas penduduk akan berpengaruh.

## 2. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, yang menjadi modal mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan. Kemajuan suatu negara dan wilayah tergantung dengan kualitas pendidikan dan sumber dayanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin tinggi kualitas penduduk, sehingga akan meningkatkan kemampuan penduduk dalam usaha meningkatkan taraf kesejahteraan.

## 3. Tingkat kesejahteraan penduduk

Kesejahteraan penduduk ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Hal tersebut terkait dengan pendapatan yang diperoleh penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi pendapatannya maka akan semakin tinggi tingkat kesejahterannya. Tingkat kesejahteraan penduduk ini juga sangat berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

### **A. Tingkat kesehatan penduduk**

Kesehatan penduduk merupakan salah satu hal penting dalam menilai kualitas penduduk. Bila kesehatan tidak diperhatikan maka kualitas penduduk juga akan turut menurun. Hal tersebut dapat dilihat indikatornya dari aspek kelahiran dan kematian. Aspek kelahiran dapat dilihat dari data tentang angka kelahiran menurut umur, angka kelahiran total, rasio anak dan perempuan. Sedang aspek kematian dilihat dari data angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal, angka kematian anak, angka kematian balita, dan angka kematian ibu. Selain itu, jaminan dan program kesehatan penduduk Kota Bima harus diperhatikan sehingga produktivitas dan kinerja penduduk tetap terjaga.

## 1. Aspek Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Jumlah kelahiran di Kota Bima pada tahun 2023 sebanyak 2.818 kelahiran hidup yang tersebar dalam lima kecamatan.

**Tabel V.1 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Bima Tahun 2023**

No	Kecamatan		Jumlah Anak 0-4 Tahun		Jumlah Perempuan 15-49 Tahun		Rasio Anak dan Perempuan
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	2.227	17,10	8.367	18,97	26,62
2	52.72.02	Rasanae Timur	1.718	13,19	5.392	12,23	31,86
3	52.72.03	Asakota	3.224	24,75	10.189	23,10	31,64
4	52.72.04	Raba	3.204	24,60	10.789	24,46	29,70
5	52.72.05	Mpunda	2.652	20,36	9.365	21,23	28,32
Jumlah			<b>13.025</b>	<b>100,00</b>	<b>44.102</b>	<b>100,00</b>	<b>29,53</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Pada tabel di atas dilihat ada 13.025 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kota Bima, sedangkan jumlah perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 44.102 jiwa.

Hal di atas memperlihatkan bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 30 anak balita. Salah satu faktor yang menentukan tingkat laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah adalah tingkat kelahiran dan kematian, adanya perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian penduduk rendah, sedangkan laju tingkat kelahiran tetap tinggi. Hal inilah yang merupakan penyebab utama ledakan jumlah penduduk (Prawirohardjo, 2010). Tingginya angka kelahiran merupakan alasan utama diperlukannya pelayanan Keluarga Berencana (KB) (Kemenkes RI, 2014).

Keluarga Berencana (KB) adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval kehamilan, dan mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menemukan jumlah anak dalam keluarga (Suratun, dkk.,2008). Tujuan program KB adalah mewujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana, di antaranya:

- Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut;
- Menganangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak;
- Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini;
- Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua;
- Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Pengendalian kehamilan dalam program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi (Kemenkes RI, 2014). Penggunaan kontrasepsi merupakan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita sebagai pasangan, sehingga metode kontrasepsi yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan serta keinginan bersama. Dalam hal ini bisa saja pria yang memakai kontrasepsi seperti kondom, dan vasektomi. Sementara itu apabila istri yang menggunakan kontrasepsi suami mempunyai peranan penting dalam mendukung istri dan menjamin efektivitas pemakaian kontrasepsi. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pengguna Alat Kontrasepsi di masing-masing kecamatan se-Kota Bima pada tahun 2023.

**Tabel V.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di rinci menurut Kesertaan KB per Kecamatan**

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)				Jumlah PUS	% PUS belum ber-KB
		Jumlah PUS Peserta KB	PUS Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) yang ber-KB	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani	Jumlah PUS yang belum ber-KB		
1	Rasanae Barat	2.642	1.628	515	515	5.300	19,43
2	Rasanae Timur	2.656	2.005	272	272	5.205	10,45
3	Asakota	4.313	3.298	638	638	8.887	14,36
4	Raba	4.870	3.204	694	694	9.462	14,67
5	Mpunda	4.104	3.258	677	677	7.716	17,55
Jumlah		<b>18.585</b>	<b>12.393</b>	<b>2.796</b>	<b>2.796</b>	<b>36.570</b>	<b>15,29</b>

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat/Metode KB						
		Suntik KB	Obat/Pil KB	IUD/Spiral	Susuk/Implant	Kondom	Vagina Diafragma	Spermatisida
1	Rasanae Barat	1.447	94	194	815	63	0	0
2	Rasanae Timur	1.328	57	61	783	10	0	0
3	Asakota	3.056	65	205	1.068	55	0	0
4	Raba	2.044	101	204	1.293	57	0	0
5	Mpunda	1.642	149	372	997	78	0	0
Jumlah		<b>9.517</b>	<b>466</b>	<b>1.036</b>	<b>4.956</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lanjutan Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat/Metode KB				Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah FASYANKES yang siap melayani MKJP
		Vasektomi	Tubektomi	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Total Peserta KB		
1	Rasanae Barat	6	73	1.088	3.780	320	11
2	Rasanae Timur	2	27	873	3.141	191	9
3	Asakota	10	65	1.48	5.872	404	10
4	Raba	1	77	1.575	5.352	433	19
5	Mpunda	2	72	1.443	4.755	205	13
Jumlah		<b>21</b>	<b>314</b>	<b>6.327</b>	<b>22.900</b>	<b>1.553</b>	<b>62</b>

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2023

Dari tabel V.3 terlihat bahwa pemakai alat kontrasepsi jenis suntik lebih mendominasi dari pemakaian alat kontrasepsi jenis lainnya, hampir separuh pengguna alat kontrasepsi menggunakan alkon jenis suntik. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap alat kontrasepsi suntik lebih aman dibandingkan dari alat kontrasepsi lainnya, walaupun sebenarnya apabila ditinjau secara medis memiliki tingkat keamanan yang sama. Selain itu jenis alat kontrasepsi ini diminati oleh pasutri usia muda mengingat penggunaan dalam jangka pendek ketika ingin memiliki anak kembali.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi adalah pengetahuan, dukungan suami dan pengalaman ber-KB. Dukungan suami juga mempengaruhi penggunaan kontrasepsi, karena istri yang mendapat dukungan dari suami akan menggunakan kontrasepsi secara terus menerus sedangkan yang tidak mendapatkan dukungan akan sedikit yang menggunakan kontrasepsi.

## 2. Aspek Kematian

Pada umumnya tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari besar kecilnya angka kematian yang terjadi di suatu daerah, hal tersebut berkaitan dengan kualitas kesehatan. Bila suatu daerah angka kematiannya tinggi, maka perlu dilihat ketersediaan sarana kesehatan dan obat-obatan serta pola perilaku hidup penduduk tersebut. Hal itu akan berimplikasi terhadap kebijakan peningkatan sarana dan prasarana beserta SDM medisnya dan pelayanan Kesehatan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular serta pemahaman dan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan, maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit system pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Angka kematian bayi/*Infant Mortality* adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/*Neo Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur

satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan kematian *Post Neonatal* adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau *post-neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

**Tabel V.4 Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita**

No	Uraian	Jumlah
1	Lahir Hidup	2.818
2	Kematian Bayi	17
3	Kematian Anak Balita	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.5 Jumlah Kematian Ibu (yang dilaporkan) dirinci per kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu			Total Kematian Ibu
		Kematian Ibu Hamil	Kematian Ibu Bersalin	Kematian Ibu Nifas	
1	Rasanae Barat	1	0	0	1
2	Rasanae Timur	0	1	1	2
3	Asakota	1	0	0	1
4	Raba	0	0	1	1
5	Mpunda	0	0	0	0
Jumlah		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.6 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi (yang dilaporkan) dirinci per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran						Total Kelahiran (Laki-laki + Perempuan)		
		Bayi Laki-laki			Bayi Perempuan			Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah
		Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah	Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah			
1	Rasanae Barat	354	5	359	297	0	297	651	5	656
2	Rasanae Timur	165	3	168	147	1	148	312	4	316
3	Asakota	317	1	318	260	0	260	577	1	578
4	Raba	313	2	315	291	2	293	604	4	608
5	Mpunda	341	1	342	333	2	335	674	3	677
Jumlah		<b>1.490</b>	<b>12</b>	<b>1.502</b>	<b>1.328</b>	<b>5</b>	<b>1.333</b>	<b>2.818</b>	<b>17</b>	<b>2.835</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.7 Jumlah Bayi di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Bayi = Neonatal + Post Neonatal						Jumlah Bayi (Neonatal + Post Neonatal)		
		Neonatal (usia 0-28 hari)			Post Neonatal (usia 29 hari - 11 bulan)			L	P	L + P
		L	P	L + P	L	P	L + P			
1	Rasanae Barat	350	313	663	9	41	50	359	354	713
2	Rasanae Timur	180	161	341	3	19	22	183	180	363
3	Asakota	329	285	614	8	47	55	337	332	669
4	Raba	378	299	677	27	101	128	405	400	805
5	Mpunda	367	329	696	6	39	45	373	368	741
Jumlah		<b>1.604</b>	<b>1.387</b>	<b>2.991</b>	<b>53</b>	<b>247</b>	<b>300</b>	<b>1.657</b>	<b>1.634</b>	<b>3.291</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.8 Jumlah Anak Balita, dan Balita di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Anak Balita dan Balita					
		Anak Balita (Usia 12 Bulan - 59 Bulan)			Balita (Usia 0 Bulan - 59 Bulan)		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Rasanae Barat	1.412	1.392	2.804	1.771	1.746	3.517
2	Rasanae Timur	719	707	1.426	902	887	1.789
3	Asakota	1.322	1.303	2.625	1.659	1.635	3.294
4	Raba	1.590	1.570	3.160	1.995	1.970	3.965
5	Mpunda	1.465	1.446	2.911	1.838	1.814	3.652
Jumlah		<b>6.508</b>	<b>6.418</b>	<b>12.926</b>	<b>8.165</b>	<b>8.052</b>	<b>16.217</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.9 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (yang dilaporkan) di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Kematian Balita (yang dilaporkan)									Kematian Anak Balita (Usia 12 - 59 bulan)			Kematian Balita (Usia 0 - 59 bulan)		
		Neonatal (usia 0-28 hari)			Post Neonatal (usia 29 hari - 11 bulan)			Total (Usia 0 - 11 Bulan)			L	P	L+P	L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P						
1	Rasanae Barat	1	2	3	1	0	1	2	2	4	0	0	0	2	2	4
2	Rasanae Timur	3	2	5	0	0	0	3	2	5	0	0	0	3	2	5
3	Asakota	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
4	Raba	3	2	5	1	0	1	4	2	6	0	0	0	4	2	6
5	Mpunda	2	3	5	0	0	0	2	3	5	0	0	0	2	3	5
Jumlah		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
Angka Kematian per 1,000 KH (dilaporkan)		<b>AKN : 6,21</b>			<b>0,65</b>			<b>AKB : 6,86</b>			<b>AKABA : 0,00</b>			<b>6,86</b>		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

Dari tabel terlihat bahwa selama tahun 2023, angka kematian bayi di Kota Bima masih tergolong tinggi karena terdapat 17 kematian bayi. Dari data tersebut dapat dihitung dan disimpulkan nilai AKB sebesar 6,86 yang artinya terdapat 7 kematian bayi dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Persoalan kematian bayi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tapi ini menjadi persoalan bersama di Pemerintah Kota Bima dan semua unsur yang terlibat.

### 3. Sosial

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Namun begitu juga sebaliknya bahwa setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang ada, baik biaya maupun sumber dayanya menjadikan kinerja dan kualitas hidup penduduk menjadi meningkat.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019).

**Tabel V.10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dirinci per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jenis PMKS							Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar/ Anak Jalanan	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	Fakir Miskin	Pecandu Narkoba/ NAPZA	PMKS Lainnya	
1	Rasanae Barat	154	55	54	8	6.589	0	0	6.860
2	Rasanae Timur	98	35	34	4	4.195	0	0	4.366
3	Asakota	181	64	63	6	7.739	0	0	8.053
4	Raba	203	72	71	5	8.701	0	0	9.052
5	Mpunda	171	60	59	7	7.296	0	0	7.593
Jumlah		<b>807</b>	<b>286</b>	<b>281</b>	<b>30</b>	<b>34.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.924</b>

Sumber : Diskominfotik Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.11 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng berdasarkan Data Terpadu FM-OTM Kota Bima Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	145	70	140	0	355
2	Rasanae Timur	117	78	135	0	330
3	Asakota	154	114	172	0	440
4	Raba	316	136	212	0	664
5	Mpunda	208	116	139	0	463
Jumlah		<b>940</b>	<b>514</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>2.252</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.12 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Menerima Paket Sandang di Kota Bima Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	3	20	26	0	49
2	Rasanae Timur	3	17	20	0	40
3	Asakota	1	23	20	0	44
4	Raba	3	20	22	0	45
5	Mpunda	1	20	12	0	33
Jumlah		<b>11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>211</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.13 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar**

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	74	6	86	0	166
2	Rasanae Timur	23	3	24	0	50
3	Asakota	42	6	74	0	122
4	Raba	21	4	23	0	48
5	Mpunda	31	4	22	0	57
Jumlah		<b>191</b>	<b>23</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>443</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.14 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar**

No	Kecamatan	Penerima Manfaat PKH	Penerima Manfaat BPNT	Penerima Manfaat BPNT-PPKM	Penerima Manfaat PBI-JKN	Penerima Manfaat Jamkesda
1	Rasanae Barat	1.700	2.263	960	10.731	6.867
2	Rasanae Timur	2.154	2.854	852	10.589	4.028
3	Asakota	3.283	4.135	1.434	17.405	7.433
4	Raba	3.210	4.390	1.346	1.671	6.658
5	Mpunda	1.816	2.487	882	11.492	4.458
Jumlah		<b>12.163</b>	<b>16.129</b>	<b>5.474</b>	<b>51.888</b>	<b>29.444</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2023

Hambatan, kesulitan dan gangguan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Aspek yang dominan terlihat pada kelompok fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, dan lanjut usia terlantar serta anak terlantar.

Jumlah total penduduk pemerlu layanan kesejahteraan sosial bukan menggambarkan jumlah individu itu sendiri, karna satu orang penduduk bisa saja masuk ke dalam beberapa kategori PMKS. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Permensos nomor 5 tahun 2019).

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kedisabilitan (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bima 161.577 jiwa maka persentase jumlah penduduk penyandang disabilitas tahun 2023 adalah 0,34 persen. Aspek penyandang disabilitas yang dominan terlihat pada kelompok disabilitas netra. Kelompok penduduk ini perlu mendapat perhatian dan mendapat pelayanan penuh dari pemerintah, baik itu dari sisi pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Sehingga dengan keterbatasannya, penyandang disabilitas dapat mengembangkan dirinya melalui kemandirian yang bermartabat, memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik, dan inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan Indonesia

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang disabilitas dirinci menurut jenis kelamin. Distribusi penduduk Kota Bima menurut jenis kedisabilitan dan jenis kelamin per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel V.15.

**Tabel V.15 Jumlah Penyandang Disabilitas**

No	Jenis Disabilitas	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Disabilitas Fisik	28	8,81	24	10,08	52	9,35
2	Disabilitas Netra	115	36,16	101	42,44	216	38,85
3	Disabilitas Rungu	33	10,38	24	10,08	57	10,25
4	Disabilitas Mental	105	33,02	67	28,15	172	30,94
5	Disabilitas Fisik dan Mental	4	1,26	0	0,00	4	0,72
6	Disabilitas Lainnya	33	10,38	22	9,24	55	9,89
Jumlah		<b>318</b>	<b>57,19</b>	<b>238</b>	<b>42,81</b>	<b>556</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023

## B. Aspek Pendidikan

Profil penduduk Kota Bima dari aspek pendidikan akan dilihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk usia yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan sesuai dibagi dengan jumlah penduduk berusia seharusnya pada jenjang tersebut.

**Tabel V.16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Bima, 2022 dan 2023**

No	Kelompok Umur	2022	2023
1	15-19	100,00	100,00
2	20-24	100,00	99,27
3	25-29	100,00	100,00
4	30-34	98,04	99,61
5	35-39	94,72	100,00
6	40-44	92,60	98,25
7	45-49	95,36	97,56
8	50+	83,46	88,15
<b>Jumlah</b>			
	15-24	100,00	99,63
	15-44	97,68	99,54
	15+	93,70	96,35
	45+	86,46	90,50

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

**Tabel V.17 Angka Partisipasi Jenjang TK, KB/PAUD, SD, dan SMP di Kota Bima Tahun Pelajaran 2022/2023**

Angka Partisipasi Murni		APM, APK, dan APS				
Angka Partisipasi Kasar						
Angka Partisipasi Sekolah						
Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Siswa/Peserta Didik		Angka Partisipasi		
		Jumlah Seluruh Siswa	Siswa Usia Sekolah			
TK/KB/PAUD (5 – 6 Tahun)	6.199	TK	4.133	3.633	APM	58,61
		KB/PAUD	3.656	3.156	APM	50,91
		<b>Jumlah Siswa</b>	7.789	6.789	APK	125,65
SD (7 – 12 Tahun)	17.911	SD	15.291	6.691	APM	37,35
					APK	85,37
SMP (13 – 15 Tahun)	8.475	SMP	5.593	2.503	APM	29,53
					APK	65,99
<b>Kota Bima</b>	<b>32.585</b>		<b>28.673</b>	<b>-</b>	<b>APS</b>	<b>87,99</b>

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima Tahun 2023

Secara umum cakupan layanan pendidikan di Kota Bima telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Selisih APK dan APM mengindikasikan adanya kelompok yang lambat jenjang (misalnya tidak naik kelas) atau terlalu cepat melampaui jenjang seharusnya (misalnya akselerasi atau masuk sekolah pada usia yang lebih muda dari batas umurnya). Dengan arti lain bahwa APK dan APM mengindikasikan proporsi murid yang tinggal kelas atau terlalu cepat sekolah.

## C. Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi akan membahas tentang perbandingan dan jumlah tenaga kerja beserta angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja. Ekonomi yang dimiliki penduduk akan sangat berpengaruh pada kualitas penduduk suatu wilayah, semakin tinggi ekonomi maka kualitasnya juga akan semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupan.

Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Diperkirakan setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai ribuan orang. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan mampu men ghadirkan ketersediaan lapangan kerja yang banyak.

Tenaga kerja (*Manpower*) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah maka penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula

Batas usia kerja penduduk yang berlaku pada profil perkembangan kependudukan Kota Bima ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi Bergeraknya roda pembangunan.

Indikator ini berguna sebagai pertimbangan pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

**Tabel V.18 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
15-19	6.697	12,49	6.340	11,44	13.037	11,96
20-24	6.386	11,91	6.730	12,15	13.116	12,03
25-29	6.280	11,71	6.277	11,33	12.557	11,52
30-34	6.092	11,36	6.326	11,42	12.418	11,39
35-39	6.399	11,93	6.396	11,55	12.795	11,74
40-44	5.976	11,14	6.424	11,60	12.400	11,37
45-49	5.202	9,70	5.609	10,12	10.811	9,92
50-54	4.483	8,36	4.621	8,34	9.104	8,35
55-59	3.461	6,45	3.871	6,99	7.332	6,73
60-64	2.651	4,94	2.805	5,06	5.456	5,00
Jumlah	53.627	100,00	55.399	100,00	109.026	100,00
% Tenaga Kerja						

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023

Dari tabel V.18 di atas nampak bahwa persentase tenaga kerja laki-laki lebih rendah (33,52 %) dibandingkan tenaga kerja perempuan (34,83 %). Lebih dari separuh jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2022 merupakan tenaga kerja (usia produktif) yakni sebanyak 68,35 %.

Menurut Partanto (2001), tenaga kerja dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Penduduknya

Tenaga kerja berdasarkan jenis penduduk, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, yang mengelompokkan tenaga kerja merupakan mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan tenaga kerja

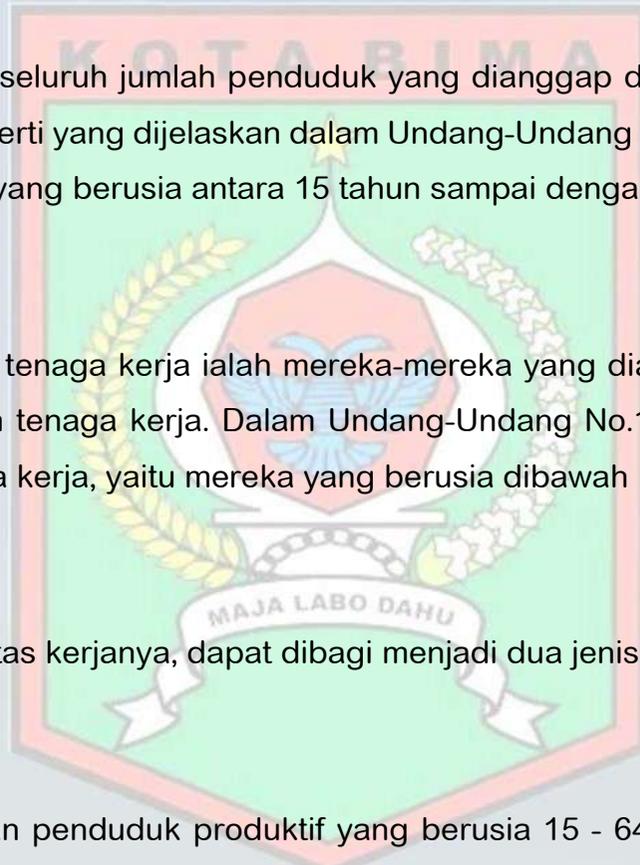
Dikatakan sebagai bukan tenaga kerja ialah mereka-mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja adalah penduduk yang diluar usia kerja, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun.

b. Berdasarkan Batas Kerja

Tenaga kerja berdasarkan batas kerjanya, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk produktif yang berusia 15 - 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan akan tetapi untuk sementara waktu tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan.



## 2. Bukan Angkatan Kerja

Dikatakan bukan angkatan kerja ialah mereka yang berumur 10 tahun keatas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Sebagai contoh anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, serta para pengangguran sukarela.

### c. Berdasarkan Kualitasnya

Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

#### 1. Tenaga Kerja Terdidik

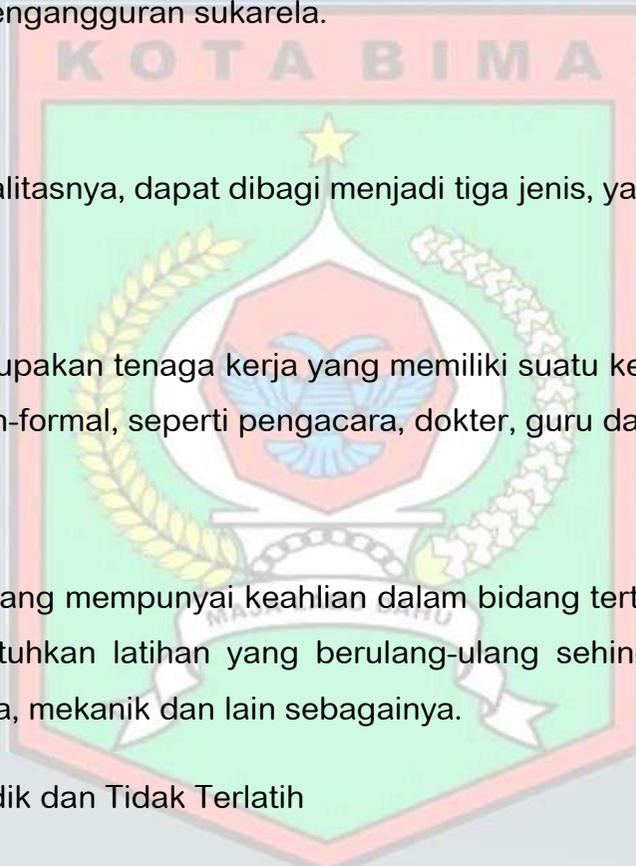
Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pendidikan formal dan non-formal, seperti pengacara, dokter, guru dan lain sebagainya.

#### 2. Tenaga Kerja Terlatih

Merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil tersebut membutuhkan latihan yang berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Seperti apoteker, ahli beda, mekanik dan lain sebagainya.

#### 3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Yakni tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja, seperti kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.



d. Berdasarkan Keahliannya

Tenaga kerja berdasarkan keahliannya, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tenaga kerja kasar

Merupakan merupakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.

2. Tenaga kerja terampil

Merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan tukang memperbaiki televisi dan radio.

3. Tenaga kerja terdidik

Yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi serta insinyur.

Menurut Simanjuntak (1985), aspek-aspek yang terkait dengan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa. Adapun dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang lalu mempunyai beberapa kegiatan seperti:

1. Sekolah, yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah.
2. Mengurus rumah tangga, yaitu yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu tanpa mendapatkan upah.
3. Penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan misalnya pensiunan, bunga simpanan dan sebagainya.
4. Mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani atau lainnya.

b. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat ditampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha, instansi, dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

c. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang di produksinya.

d. Pasar Tenaga Kerja

Pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha yang membutuhkan tenaga, pencari kerja, dan perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan.

e. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja ini merupakan turunan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan perubahan dari input atau masukan (faktor produksi) menjadi output atau keluaran.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Perluasan Lapangan Kerja

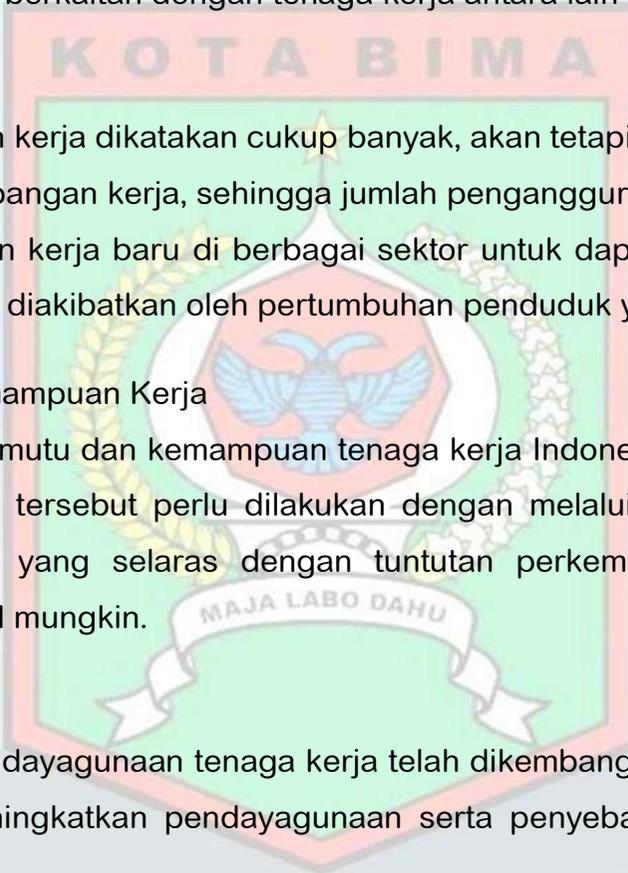
Penciptaan lapangan kerja dikatakan cukup banyak, akan tetapi, angkatan kerja semakin bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan setengah pengangguran masih cukup tinggi. Penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor untuk dapat menampung pertambahan angkatan kerja yang semakin banyak yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

b. Peningkatan Mutu dan Kemampuan Kerja

Secara keseluruhan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah. Sehingga dalam meningkatkan kemampuan tersebut perlu dilakukan dengan melalui berbagai upaya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar didayagunakan semaksimal mungkin.

c. Penyebaran Tenaga Kerja

Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang merata baik secara sektoral maupun regional.



Secara regional penyebaran angkatan kerja masih bertumpuk di pulau Jawa. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata baik secara sektoral maupun regional akan menyulitkan penyediaan tenaga kerja secara maksimal.

d. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja ialah tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat dan sejahtera, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai dengan keahlian serta minatnya dan bukan pekerjaan yang dipaksakan.

**Tabel V.19 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja**

No	Kecamatan		Bekerja		Pengangguran		Jumlah	
	Kode	Nama	L	P	L	P	L	P
1	52.72.01	Rasanae Barat	8.410	6.671	282	308	8.692	6.979
2	52.72.02	Rasanae Timur	5.389	4.146	193	212	5.582	4.358
3	52.72.03	Asakota	9.943	7.592	333	365	10.276	7.957
4	52.72.04	Raba	11.206	8.878	350	390	11.556	9.268
5	52.72.05	Mpunda	9.385	7.433	303	332	9.688	7.765
Jumlah			<b>44.333</b>	<b>34.720</b>	<b>1.461</b>	<b>1.607</b>	<b>45.794</b>	<b>36.327</b>

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

**Tabel V.20 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Bukan Angkatan Kerja**

No	Kecamatan		Sekolah		Mengurus Rumah Tangga		Lainnya		Jumlah	
	Kode	Nama	L	P	L	P	L	P	L	P
1	52.72.01	Rasanae Barat	966	1.065	497	3.398	778	224	2.241	4.687
2	52.72.02	Rasanae Timur	590	734	330	2.118	507	142	1.427	2.994
3	52.72.03	Asakota	1.172	1.234	539	3.645	852	193	2.563	5.072
4	52.72.04	Raba	1.244	1.294	717	4.623	1.084	328	3.045	6.245
5	52.72.05	Mpunda	1.039	1.146	558	3.709	863	224	2.460	5.079
Jumlah			5.011	5.473	2.641	17.493	4.084	1.111	11.736	24.077

Sumber : Dinas Kominfo Kota Bima 2023

**Tabel V.21 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja**

Kecamatan		Angkatan Kerja						Bukan Angkatan Kerja							
		Bekerja		Pengangguran		Jumlah		Sekolah		Mengurus Rumah Tangga		Lainnya		Jumlah	
Kode	Nama	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
52.72.01	Rasanae Barat	96,76	95,59	3,24	4,41	100,00	100,00	43,11	22,72	22,18	72,50	34,72	4,78	100,00	100,00
52.72.02	Rasanae Timur	96,54	95,14	3,46	4,86	100,00	100,00	41,35	24,52	23,13	70,74	35,53	4,74	100,00	100,00
52.72.03	Asakota	96,76	95,41	3,24	4,59	100,00	100,00	45,73	24,33	21,03	71,87	33,24	3,81	100,00	100,00
52.72.04	Raba	96,97	95,79	3,03	4,21	100,00	100,00	40,85	20,72	23,55	74,03	35,60	5,25	100,00	100,00
52.72.05	Mpunda	96,87	95,72	3,13	4,28	100,00	100,00	42,24	22,56	22,68	73,03	35,08	4,41	100,00	100,00
Jumlah		96,81	95,58	3,19	4,42	100,00	100,00	42,70	22,73	22,50	72,65	34,80	4,61	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kominfo Kota Bima Tahun 2023

**Tabel V.22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Total Angkatan Kerja dan Total Bukan Angkatan Kerja**

No	Kecamatan		Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			
	Kode	Nama	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
1	52.72.01	Rasanae Barat	96,24	3,76	100,00	29,32	56,22	14,46	100,00
2	52.72.02	Rasanae Timur	95,93	4,07	100,00	29,95	55,37	14,68	100,00
3	52.72.03	Asakota	96,17	3,83	100,00	31,51	54,80	13,69	100,00
4	52.72.04	Raba	96,45	3,55	100,00	27,32	57,48	15,20	100,00
5	52.72.05	Mpunda	96,36	3,64	100,00	28,98	56,60	14,42	100,00
Jumlah			<b>96,26</b>	<b>3,74</b>	<b>100,00</b>	<b>29,27</b>	<b>56,22</b>	<b>14,51</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

**Tabel V.23 Jumlah Penduduk Usia Kerja**

No	Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
1	< SD	99,01	0,99	100,00	6,28	69,68	24,04	100,00
2	SMP/Paket B	100,00	0,00	100,00	67,38	25,78	6,84	100,00
3	SMA/Paket C	95,40	4,60	100,00	23,27	62,20	14,53	100,00
4	SMK	95,98	4,02	100,00	0,00	88,28	11,72	100,00
5	Diploma I/II/III	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	Universitas	93,88	6,12	100,00	5,49	67,96	26,55	100,00
Kota Bima		<b>92,26</b>	<b>3,74</b>	<b>100,00</b>	<b>29,27</b>	<b>56,22</b>	<b>14,51</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

**Tabel IV.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	26.728	16,542	22.211	13,746	48.939	30,288
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	0,000	33.883	20,970	33.883	20,970
3	PELAJAR/MAHASISWA	14.609	9,042	13.164	8,147	27.773	17,189
4	PENSIUNAN	1.240	0,767	464	0,287	1.704	1,055
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3.778	2,338	3.093	1,914	6.871	4,252
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	317	0,196	0	0,000	317	0,196
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	706	0,437	11	0,007	717	0,444
8	PERDAGANGAN	207	0,128	190	0,118	397	0,246
9	PETANI/PEKEBUN	7.266	4,497	138	0,085	7.404	4,582
10	PETERNAK	27	0,017	3	0,002	30	0,019
11	NELAYAN/PERIKANAN	1.088	0,673	5	0,003	1.093	0,676
12	INDUSTRI	6	0,004	3	0,002	9	0,006
13	KONSTRUKSI	14	0,009	1	0,001	15	0,009
14	TRANSPORTASI	318	0,197	0	0,000	318	0,197
15	KARYAWAN SWASTA	3.360	2,080	1.031	0,638	4.391	2,718
16	KARYAWAN BUMN	409	0,253	166	0,103	575	0,356
17	KARYAWAN BUMD	70	0,043	39	0,024	109	0,067
18	KARYAWAN HONORER	2.229	1,380	2.554	1,581	4.783	2,960
19	BURUH HARIAN LEPAS	1.327	0,821	12	0,007	1.339	0,829
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.379	0,853	27	0,017	1.406	0,870
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	0,040	0	0,000	64	0,040
22	BURUH PETERNAKAN	13	0,008	2	0,001	15	0,009
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0,000	61	0,038	61	0,038

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
24	TUKANG CUKUR	9	0,006	0	0,000	9	0,006
25	TUKANG LISTRIK	15	0,009	0	0,000	15	0,009
26	TUKANG BATU	530	0,328	0	0,000	530	0,328
27	TUKANG KAYU	463	0,287	0	0,000	463	0,287
28	TUKANG SOL SEPATU	3	0,002	1	0,001	4	0,002
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	37	0,023	0	0,000	37	0,023
30	TUKANG JAHIT	37	0,023	48	0,030	85	0,053
31	TUKANG GIGI	2	0,001	0	0,000	2	0,001
32	PENATA RIAS	3	0,002	4	0,002	7	0,004
33	PENATA BUSANA	0	0,000	1	0,001	1	0,001
34	PENATA RAMBUT	4	0,002	3	0,002	7	0,004
35	MEKANIK	115	0,071	0	0,000	115	0,071
36	SENIMAN	9	0,006	2	0,001	11	0,007
37	TABIB	2	0,001	0	0,000	2	0,001
38	PARAJI	1	0,001	0	0,000	1	0,001
39	PERANCANG BUSANA	0	0,000	1	0,001	1	0,001
40	PENTERJEMAH	1	0,001	0	0,000	1	0,001
41	IMAM MASJID	6	0,004	0	0,000	6	0,004
42	PENDETA	7	0,004	0	0,000	7	0,004
43	PASTOR	1	0,001	0	0,000	1	0,001
44	WARTAWAN	41	0,025	1	0,001	42	0,026
45	USTADZ/MUBALIGH	2	0,001	2	0,001	4	0,002
46	JURU MASAK	0	0,000	2	0,001	2	0,001
47	PROMOTOR ACARA	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
48	ANGGOTA DPR RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
49	ANGGOTA DPD RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
50	ANGGOTA BPK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
51	PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
52	WAKIL PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
55	DUTA BESAR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
56	GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
57	WAKIL GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
58	BUPATI	0	0,000	1	0,001	1	0,001
59	WAKIL BUPATI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
60	WALIKOTA	1	0,001	0	0,000	1	0,001
61	WAKIL WALIKOTA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
62	ANGGOTA DPRD PROP.	3	0,002	0	0,000	3	0,002
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	17	0,011	2	0,001	19	0,012
64	DOSEN	178	0,110	118	0,073	296	0,183
65	GURU	530	0,328	947	0,586	1.477	0,914
66	PILOT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
67	PENGACARA	32	0,020	3	0,002	35	0,022
68	NOTARIS	6	0,004	5	0,003	11	0,007
69	ARSITEK	1	0,001	0	0,000	1	0,001
70	AKUNTAN	1	0,001	0	0,000	1	0,001
71	KONSULTAN	11	0,007	1	0,001	12	0,007

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
72	DOKTER	49	0,030	73	0,045	122	0,076
73	BIDAN	0	0,000	177	0,110	177	0,110
74	PERAWAT	57	0,035	155	0,096	212	0,131
75	APOTEKER	6	0,004	13	0,008	19	0,012
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0,000	1	0,001	1	0,001
77	PENYIAR TELEVISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
78	PENYIAR RADIO	1	0,001	0	0,000	1	0,001
79	PELAUT	78	0,048	0	0,000	78	0,048
80	PENELITI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
81	SOPIR	673	0,417	0	0,000	673	0,417
82	PIALANG	1	0,001	0	0,000	1	0,001
83	PARANORMAL	0	0,000	0	0,000	0	0,000
84	PEDAGANG	248	0,153	292	0,181	540	0,334
85	PERANGKAT DESA	1	0,001	2	0,001	3	0,002
86	KEPALA DESA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,000	3	0,002	3	0,002
88	WIRASWASTA	11.964	7,405	2.347	1,453	14.311	8,857
89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	1	0,001	0	0,000	1	0,001
90	ARTIS	0	0,000	0	0,000	0	0,000
91	ATLIT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
92	CHEFF	0	0,000	0	0,000	0	0,000
93	MANAJER	0	0,000	0	0,000	0	0,000
94	TENAGA TATA USAHA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
95	OPERATOR	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
97	TEKNISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
98	ASISTEN AHLI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
99	PEKERJAAN LAINNYA	9	0,006	3	0,002	12	0,007
<b>Jumlah</b>		<b>80.311</b>	<b>49,704</b>	<b>81.266</b>	<b>50,296</b>	<b>161.577</b>	<b>100,000</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah



## **BAB VI**

# **KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan dan sebagainya. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan.

Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database kependudukan sesuai dengan dokumen dan realitas yang dimiliki penduduk.

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan hukum secara sah, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

## **A. Kepemilikan Kartu Keluarga**

Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang syah dan mempunyai kedudukan hukum keluarga tersebut bertempat tinggal. Pada tahun 2023 ini penandatanganan Kartu Keluarga dan Akta-Akta menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), penandatanganan ini syah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk fotokopi dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan QR Code pada dokumen tersebut.

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Kartu Keluarga (KK) memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala ksantrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu rumah tangga boleh terdapat lebih dari satu Kepala Keluarga.

**Tabel VI.1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kelurahan**

Kode	Wilayah	Kepala Keluarga			Telah Cetak Kartu Keluarga				Belum Cetak Kartu Keluarga			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72	Kota Bima	40.932	10.666	51.598	40.901	10.635	51.536	99,88	31	31	62	0,12
52.72.01	Rasanae Barat	7.454	2.488	9.942	7.447	2.477	9.924	99,82	7	11	18	0,18
52.72.01.1001	Paruga	1.301	456	1.757	1.300	454	1.754	99,83	1	2	3	0,17
52.72.01.1002	Nae	1.015	360	1.375	1.014	359	1.373	99,85	1	1	2	0,15
52.72.01.1003	Sarae	1.230	406	1.636	1.228	404	1.632	99,76	2	2	4	0,24
52.72.01.1004	Tanjung	1.560	500	2.060	1.558	495	2.053	99,66	2	5	7	0,34
52.72.01.1013	Pane	641	283	924	641	282	923	99,89	0	1	1	0,11
52.72.01.1014	Dara	1.707	483	2.190	1.706	483	2.189	99,95	1	0	1	0,05
52.72.02	Rasanae Timur	5.408	1.211	6.619	5.403	1.207	6.610	99,86	5	4	9	0,14
52.72.02.1004	Kumbe	1.050	295	1.345	1.048	295	1.343	99,85	2	0	2	0,15
52.72.02.1008	Lampe	436	89	525	435	87	522	99,43	1	2	3	0,57
52.72.02.1009	Dodu	901	202	1.103	901	201	1.102	99,91	0	1	1	0,09
52.72.02.1011	Nungga	676	126	802	676	126	802	100,00	0	0	0	0,00
52.72.02.1018	Kodo	599	155	754	597	155	752	99,73	2	0	2	0,27
52.72.02.1019	Oi Fo'o	624	96	720	624	96	720	100,00	0	0	0	0,00
52.72.02.1020	Lelamase	610	113	723	610	112	722	99,86	0	1	1	0,14
52.72.02.1021	Oimbo	512	135	647	512	135	647	100,00	0	0	0	0,00
52.72.03	Asakota	9.188	2.038	11.226	9.181	2.030	11.211	99,87	7	8	15	0,13
52.72.03.1001	Melayu	1.344	440	1.784	1.343	438	1.781	99,83	1	2	3	0,17
52.72.03.1002	Jatiwangi	1.924	409	2.333	1.923	408	2.331	99,91	1	1	2	0,09
52.72.03.1003	Jatibaru	1.603	387	1.990	1.601	383	1.984	99,70	2	4	6	0,30
52.72.03.1004	Kolo	1.556	311	1.867	1.555	310	1.865	99,89	1	1	2	0,11
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.155	233	1.388	1.155	233	1.388	100,00	0	0	0	0,00
52.72.03.1006	Ule	1.606	258	1.864	1.604	258	1.862	99,89	2	0	2	0,11

Kode	Wilayah	Kepala Keluarga			Telah Cetak Kartu Keluarga				Belum Cetak Kartu Keluarga			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.04	Raba	10.417	2.827	13.244	10.412	2.821	13.233	99,92	5	6	11	0,08
52.72.04.1001	Penaraga	1.248	400	1.648	1.247	399	1.646	99,88	1	1	2	0,12
52.72.04.1002	Rontu	865	242	1.107	864	242	1.106	99,91	1	0	1	0,09
52.72.04.1003	Penanae	1.063	288	1.351	1.062	287	1.349	99,85	1	1	2	0,15
52.72.04.1004	Kendo	455	89	544	455	89	544	100,00	0	0	0	0,00
52.72.04.1005	Ntobo	1.092	222	1.314	1.092	222	1.314	100,00	0	0	0	0,00
52.72.04.1006	Nitu	446	66	512	446	66	512	100,00	0	0	0	0,00
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.029	270	1.299	1.029	269	1.298	99,92	0	1	1	0,08
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.002	287	1.289	1.002	287	1.289	100,00	0	0	0	0,00
52.72.04.1009	Rite	619	143	762	619	142	761	99,87	0	1	1	0,13
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.379	439	1.818	1.379	437	1.816	99,89	0	2	2	0,11
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.219	381	1.600	1.217	381	1.598	99,88	2	0	2	0,13
52.72.05	Mpunda	8.465	2.102	10.567	8.458	2.100	10.558	99,91	7	2	9	0,09
52.72.05.1001	Monggonao	1.022	283	1.305	1.022	283	1.305	100,00	0	0	0	0,00
52.72.05.1002	Sadia	922	212	1.134	920	212	1.132	99,82	2	0	2	0,18
52.72.05.1003	Santi	693	154	847	692	154	846	99,88	1	0	1	0,12
52.72.05.1004	Sambinae	950	185	1.135	949	184	1.133	99,82	1	1	2	0,18
52.72.05.1005	Penatoi	1.152	333	1.485	1.150	333	1.483	99,87	2	0	2	0,13
52.72.05.1006	Lewirato	512	128	640	512	128	640	100,00	0	0	0	0,00
52.72.05.1007	Mande	705	220	925	705	220	925	100,00	0	0	0	0,00
52.72.05.1008	Panggi	707	161	868	707	161	868	100,00	0	0	0	0,00
52.72.05.1009	Manggemaci	1.029	290	1.319	1.028	289	1.317	99,85	1	1	2	0,15
52.72.05.1010	Matakando	773	136	909	773	136	909	100,00	0	0	0	0,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Dikatakan Kepemilikan Kartu keluarga apabila Kepala Keluarga melakukan pencetakan pertama Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing Kabupaten/Kota. Tabel VI.1 menunjukkan jumlah kepala keluarga memiliki Kartu Keluarga berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Bima 99,88 %. Salah satu penyebabnya kepemilikan kartu keluarga ini tidak 100 % dikarenakan pada saat pencatatan peristiwa kematian kepala keluarga akan mengakibatkan pemecahan kepala keluarga. Dalam pencatatan peristiwa kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan tidak hanya dari laporan ahli waris (keluarga) saja tetapi juga berdasarkan Laporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID) yang disampaikan oleh Kelurahan setiap bulannya. Sementara untuk penerbitan akta kematian dan pembaharuan Kartu Keluarga dilakukan apabila ahli waris dan kader yang telah ditunjuk melengkapi bahan dan persyaratan penerbitan kedua dokumen tersebut

Pada tabel VI.1 di atas, jumlah keluarga di Kota Bima sebanyak 51.598 keluarga, yang terdiri dari kepala keluarga laki-laki 40.932 kepala keluarga dan kepala keluarga perempuan berjumlah 10.666 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kelurahan Jatiwangi yaitu sebesar 2.333 KK, sedang jumlah kepala keluarga terkecil adalah Kelurahan Nitu sebesar 512 KK.

## **B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Kartu Tanda penduduk ( KTP ) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin. Dalam buku profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel 47 menyajikan jumlah wajib KTP el dan capaian perekaman KTP El.

Cakupan kepemilikan KTP-el merupakan salah satu target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Kabupaten/ Kota se-Indonesia (Nasional) bagi penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah. Tentunya kepemilikan KTP-el ini diawali dengan proses perekaman KTP-el.

**Tabel VI.2 Jumlah dan Capaian Pencetakan KTP Elektronik per Kelurahan**

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	56.471	59.318	115.789	54.069	56.959	111.028	95,89	2.402	2.359	4.761	4,11
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	10.695	11.361	22.056	10.067	10.652	20.719	93,94	628	709	1.337	6,06
52.72.01.1001	Paruga	1.877	1.963	3.840	1.782	1.847	3.629	94,51	95	116	211	5,49
52.72.01.1002	Nae	1.500	1.652	3.152	1.436	1.576	3.012	95,56	64	76	140	4,44
52.72.01.1003	Sarae	1.805	1.895	3.700	1.656	1.756	3.412	92,22	149	139	288	7,78
52.72.01.1004	Tanjung	2.217	2.308	4.525	2.079	2.140	4.219	93,24	138	168	306	6,76
52.72.01.1013	Pane	942	1.045	1.987	898	986	1.884	94,82	44	59	103	5,18
52.72.01.1014	Dara	2.354	2.498	4.852	2.216	2.347	4.563	94,04	138	151	289	5,96
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	6.976	7.309	14.285	6.744	7.083	13.827	96,79	232	226	458	3,21
52.72.02.1004	Kumbe	1.392	1.479	2.871	1.350	1.439	2.789	97,14	42	40	82	2,86
52.72.02.1008	Lampe	560	601	1.161	551	576	1.127	97,07	9	25	34	2,93
52.72.02.1009	Dodu	1.167	1.213	2.380	1.132	1.174	2.306	96,89	35	39	74	3,11
52.72.02.1011	Nungga	866	903	1.769	832	866	1.698	95,99	34	37	71	4,01
52.72.02.1018	Kodo	788	859	1.647	761	838	1.599	97,09	27	21	48	2,91
52.72.02.1019	Oi Fo'o	775	785	1.560	741	758	1.499	96,09	34	27	61	3,91
52.72.02.1020	Lelamase	745	784	1.529	716	763	1.479	96,73	29	21	50	3,27
52.72.02.1021	Oimbo	683	685	1.368	661	669	1.330	97,22	22	16	38	2,78

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
<i>52.72.03</i>	<i>Asakota</i>	12.733	12.908	25.641	12.154	12.410	24.564	95,80	579	498	1.077	4,20
52.72.03.1001	Melayu	1.971	2.103	4.074	1.885	2.002	3.887	95,41	86	101	187	4,59
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.679	2.727	5.406	2.569	2.634	5.203	96,24	110	93	203	3,76
52.72.03.1003	Jatibaru	2.175	2.172	4.347	2.048	2.066	4.114	94,64	127	106	233	5,36
52.72.03.1004	Kolo	2.195	2.160	4.355	2.098	2.071	4.169	95,73	97	89	186	4,27
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.530	1.544	3.074	1.474	1.503	2.977	96,84	56	41	97	3,16
52.72.03.1006	Ule	2.183	2.202	4.385	2.080	2.134	4.214	96,10	103	68	171	3,90
<i>52.72.04</i>	<i>Raba</i>	14.208	15.159	29.367	13.692	14.712	28.404	96,72	516	447	963	3,28
52.72.04.1001	Penaraga	1.826	1.925	3.751	1.763	1.864	3.627	96,69	63	61	124	3,31
52.72.04.1002	Rontu	1.135	1.222	2.357	1.098	1.191	2.289	97,11	37	31	68	2,89
52.72.04.1003	Penanae	1.518	1.544	3.062	1.443	1.496	2.939	95,98	75	48	123	4,02
52.72.04.1004	Kendo	566	593	1.159	548	570	1.118	96,46	18	23	41	3,54
52.72.04.1005	Ntobo	1.418	1.465	2.883	1.367	1.426	2.793	96,88	51	39	90	3,12
52.72.04.1006	Nitu	562	569	1.131	534	544	1.078	95,31	28	25	53	4,69
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.399	1.525	2.924	1.342	1.485	2.827	96,68	57	40	97	3,32
52.72.04.1008	Rabandompu Timur	1.354	1.468	2.822	1.314	1.435	2.749	97,41	40	33	73	2,59
52.72.04.1009	Rite	850	900	1.750	822	869	1.691	96,63	28	31	59	3,37
52.72.04.1010	Rabandompu Barat	1.837	2.048	3.885	1.767	1.993	3.760	96,78	70	55	125	3,22
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.743	1.900	3.643	1.694	1.839	3.533	96,98	49	61	110	3,02

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.05	Mpunda	11.859	12.581	24.440	11.412	12.102	23.514	96,21	447	479	926	3,79
52.72.05.1001	Monggonao	1.473	1.551	3.024	1.433	1.506	2.939	97,19	40	45	85	2,81
52.72.05.1002	Sadia	1.354	1.426	2.780	1.284	1.367	2.651	95,36	70	59	129	4,64
52.72.05.1003	Santi	967	1.020	1.987	933	993	1.926	96,93	34	27	61	3,07
52.72.05.1004	Sambinae	1.251	1.286	2.537	1.200	1.251	2.451	96,61	51	35	86	3,39
52.72.05.1005	Penatoi	1.628	1.781	3.409	1.565	1.696	3.261	95,66	63	85	148	4,34
52.72.05.1006	Lewirato	744	728	1.472	720	703	1.423	96,67	24	25	49	3,33
52.72.05.1007	Mande	978	1.092	2.070	935	1.041	1.976	95,46	43	51	94	4,54
52.72.05.1008	Panggi	984	1.071	2.055	965	1.033	1.998	97,23	19	38	57	2,77
52.72.05.1009	Manggemaci	1.439	1.549	2.988	1.378	1.473	2.851	95,41	61	76	137	4,59
52.72.05.1010	Matakando	1.041	1.077	2.118	999	1.039	2.038	96,22	42	38	80	3,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Beragam permasalahan yang menyebabkan masyarakat belum mempunyai KTP-el dan perekaman KTP-el diantaranya adalah berada diluar domisili, lanjut usia, penyandang disabilitas, rendahnya tingkat kesadaran penduduk tentang pentingnya kepemilikan KTP. Berangkat dari permasalahan tersebut dan seiring dengan target nasional tentang kepemilikan KTP-el maka berbagai upaya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melalui inovasi-inovasi. Selain memberdayakan sumber daya yang ada pada Disdukcapil juga melibatkan *stakeholder* terkait yang dapat membantu dalam pencapaian target dimaksud.

Tabel VI.2 di atas menyajikan capaian kepemilikan KTP el dari total wajib KTP el. Dapat dilihat bahwa capaian kepemilikan KTP 95,89 %, dengan capaian tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Timur 96,79 % dan capaian terendah di Kecamatan Rasanae Barat 93,94 %. Perlu dorongan dan dukungan dari semua pihak menghimbau masyarakat untuk perekaman KTP el guna penerbitan KTP el yang bersangkutan.

## C. Penerbitan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta pencatatan sipil dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak; dan (6) pengesahan anak.

### 1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti syah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang ayah dan ibu sebagai orang tuanya.

Tabel VI.3 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Bima terhadap total penduduk Kota Bima. Dari tabel di bawah terlihat bahwa Penduduk Kota Bima yang memiliki akta kelahiran hanya 91.464 jiwa (56,61 %). Kepemilikan ini meningkat apabila dibandingkan dengan kepemilikan akte kelahiran tahun 2022, dimana kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2022 sebesar 54,86 %.

**Tabel VI.3 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir per Kelurahan**

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir			
		Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72</i>	<i>Kota Bima</i>	<i>161.577</i>	<i>91.464</i>	<i>70.113</i>	<i>56,61</i>
<i>52.72.01</i>	<i>Rasanae Barat</i>	<i>30.611</i>	<i>16.343</i>	<i>14.268</i>	<i>53,39</i>
52.72.01.1001	Paruga	5.250	2.692	2.558	51,28
52.72.01.1002	Nae	4.319	2.378	1.941	55,06
52.72.01.1003	Sarae	5.122	2.726	2.396	53,22
52.72.01.1004	Tanjung	6.379	3.376	3.003	52,92
52.72.01.1013	Pane	2.671	1.404	1.267	52,56
52.72.01.1014	Dara	6.870	3.767	3.103	54,83
<i>52.72.02</i>	<i>Rasanae Timur</i>	<i>19.833</i>	<i>11.762</i>	<i>8.071</i>	<i>59,31</i>
52.72.02.1004	Kumbe	3.922	2.249	1.673	57,34
52.72.02.1008	Lampe	1.627	1.050	577	64,54
52.72.02.1009	Dodu	3.296	1.922	1.374	58,31
52.72.02.1011	Nungga	2.521	1.420	1.101	56,33
52.72.02.1018	Kodo	2.253	1.328	925	58,94
52.72.02.1019	Oi Fo'o	2.262	1.476	786	65,25
52.72.02.1020	Lelamase	2.082	1.221	861	58,65
52.72.02.1021	Oimbo	1.870	1.096	774	58,61
<i>52.72.03</i>	<i>Asakota</i>	<i>36.667</i>	<i>21.017</i>	<i>15.650</i>	<i>57,32</i>
52.72.03.1001	Melayu	5.833	3.295	2.538	56,49
52.72.03.1002	Jatiwangi	7.659	4.251	3.408	55,50
52.72.03.1003	Jatibaru	6.098	3.376	2.722	55,36
52.72.03.1004	Kolo	6.234	3.756	2.478	60,25
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	4.188	2.368	1.820	56,54
52.72.03.1006	Ule	6.655	3.971	2.684	59,67

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir			
		Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72.04</i>	<i>Raba</i>	40.416	23.076	17.340	57,10
52.72.04.1001	Penaraga	5.219	2.998	2.221	57,44
52.72.04.1002	Rontu	3.323	1.963	1.360	59,07
52.72.04.1003	Penanae	4.250	2.457	1.793	57,81
52.72.04.1004	Kendo	1.600	1.051	549	65,69
52.72.04.1005	Ntobo	3.953	2.316	1.637	58,59
52.72.04.1006	Nitu	1.561	980	581	62,78
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	4.072	2.191	1.881	53,81
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	3.810	2.066	1.744	54,23
52.72.04.1009	Rite	2.443	1.365	1.078	55,87
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	5.278	3.017	2.261	57,16
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	4.907	2.672	2.235	54,45
<i>52.72.05</i>	<i>Mpunda</i>	34.050	19.266	14.784	56,58
52.72.05.1001	Monggonao	4.095	2.205	1.890	53,85
52.72.05.1002	Sadia	3.790	2.088	1.702	55,09
52.72.05.1003	Santi	2.828	1.637	1.191	57,89
52.72.05.1004	Sambinae	3.612	2.104	1.508	58,25
52.72.05.1005	Penatoi	4.825	2.720	2.105	56,37
52.72.05.1006	Lewirato	2.014	1.055	959	52,38
52.72.05.1007	Mande	2.908	1.655	1.253	56,91
52.72.05.1008	Panggi	2.778	1.642	1.136	59,11
52.72.05.1009	Manggemaci	4.174	2.375	1.799	56,90
52.72.05.1010	Matakando	3.026	1.785	1.241	58,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Salah satu target kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara nasional adalah kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun, dimana target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah 97,00 %. Untuk pencapaian target tersebut dilakukan beberapa program dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0-17 tahun melalui inovasi-inovasi terkait.

**Tabel VI.4 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun per Kelurahan**

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72</i>	<i>Kota Bima</i>	<i>50.826</i>	<i>50.233</i>	<i>593</i>	<i>98,83</i>
<i>52.72.01</i>	<i>Rasanae Barat</i>	<i>9.498</i>	<i>9.350</i>	<i>148</i>	<i>98,44</i>
52.72.01.1001	Paruga	1.567	1.542	25	98,40
52.72.01.1002	Nae	1.299	1.293	6	99,54
52.72.01.1003	Sarae	1.589	1.563	26	98,36
52.72.01.1004	Tanjung	2.043	1.999	44	97,85
52.72.01.1013	Pane	756	753	3	99,60
52.72.01.1014	Dara	2.244	2.200	44	98,04
<i>52.72.02</i>	<i>Rasanae Timur</i>	<i>6.140</i>	<i>6.081</i>	<i>59</i>	<i>99,04</i>
52.72.02.1004	Kumbe	1.178	1.164	14	98,81
52.72.02.1008	Lampe	514	511	3	99,42
52.72.02.1009	Dodu	1.030	1.022	8	99,22
52.72.02.1011	Nungga	831	825	6	99,28
52.72.02.1018	Kodo	657	652	5	99,24
52.72.02.1019	Oi Fo'o	770	764	6	99,22
52.72.02.1020	Lelamase	609	600	9	98,52
52.72.02.1021	Oimbo	551	543	8	98,55

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72.03</i>	<i>Asakota</i>	12.207	12.048	159	98,70
52.72.03.1001	Melayu	1.953	1.929	24	98,77
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.484	2.456	28	98,87
52.72.03.1003	Jatibaru	1.955	1.923	32	98,36
52.72.03.1004	Kolo	2.080	2.051	29	98,61
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.246	1.225	21	98,31
52.72.03.1006	Ule	2.489	2.464	25	99,00
<i>52.72.04</i>	<i>Raba</i>	12.344	12.213	131	98,94
52.72.04.1001	Penaraga	1.626	1.587	39	97,60
52.72.04.1002	Rontu	1.060	1.049	11	98,96
52.72.04.1003	Penanae	1.335	1.327	8	99,40
52.72.04.1004	Kendo	496	492	4	99,19
52.72.04.1005	Ntobo	1.211	1.206	5	99,59
52.72.04.1006	Nitu	492	487	5	98,98
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.287	1.275	12	99,07
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.083	1.069	14	98,71
52.72.04.1009	Rite	769	768	1	99,87
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.562	1.545	17	98,91
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.423	1.408	15	98,95

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.05	Mpunda	10.637	10.541	96	99,10
52.72.05.1001	Monggonao	1.176	1.168	8	99,32
52.72.05.1002	Sadia	1.131	1.123	8	99,29
52.72.05.1003	Santi	928	922	6	99,35
52.72.05.1004	Sambinae	1.170	1.158	12	98,97
52.72.05.1005	Penatoi	1.573	1.551	22	98,60
52.72.05.1006	Lewirato	609	602	7	98,85
52.72.05.1007	Mande	926	919	7	99,24
52.72.05.1008	Panggi	794	791	3	99,62
52.72.05.1009	Manggemaci	1.322	1.310	12	99,09
52.72.05.1010	Matakando	1.008	997	11	98,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Berkat kerja sama dan bantuan semua pihak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 98,83 %.

## 2. Akta Kematian

Setiap kematian warga Negara wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana pencatatan sipil setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sesuai amanat Undang-Undang 24 tahun 2013 pasal 44 tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan amanat Undang-undang tersebut di atas maka penerbitan akte kematian merupakan salah satu target capain yang harus dicapai oleh setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Penerbitan Akta Kematian ini sangat berhubungan erat sekali terhadap valid atau tidaknya *database* kependudukan karena apabila kematian setiap warga negara tidak dilaporkan untuk diterbitkan akte kematiannya maka akan muncul masalah dikemudian hari dimana data masyarakat yang bersangkutan masih tercatat aktif/hidup. Untuk percepatan pencatatan kematian penduduk Kota Bima yang telah meninggal dunia dilaksanakan melalui beberapa inovasi dan program, salah satu nya adalah melalui inovasi “Warda Warta”/Wara Bidan Wara Akta. Inovasi ini bekerja sama dengan seluruh bidan di Kota Bima guna mendapatkan informasi/data jumlah penduduk lahir mati untuk dikonsolidasikan dengan data dari Dikes.

**Tabel VI.5 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Akta Kematian
1	Rasanae Barat	263
2	Rasanae Timur	140
3	Asakota	195
4	Raba	374
5	Mpunda	244
Total		<b>1.216</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Akta Kematian sangat berguna untuk mengurus santunan kematian, hak waris, kepegawaian, asuransi dan peristiwa perdata lainnya. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital mempermudah masyarakat dalam mengurus Akta Kematian melalui gadget dalam genggamannya langsung.

Sementara untuk penerbitan akte kematian dapat dilakukan setelah persyaratan untuk menerbitkan akte kematiannya dilengkapi oleh keluarga maupun kader percepatan akta yang telah ditunjuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 3. Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan yang muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinannya.

Dari tabel VI.6 dapat dilihat bahwa penduduk yang memiliki akta perkawinan 54.786 jiwa (73,22 %) dari jumlah penduduk berstatus kawin 74.825 jiwa. Angka kepemilikan akta perkawinan tertinggi berada di Kecamatan Asakota sebanyak 13.337 jiwa (78,37 %) dan terendah di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 9.108 jiwa (69,35 %).

**Tabel VI.6 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perkawinan per Kelurahan**

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber-Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72</i>	<i>Kota Bima</i>	<i>74.825</i>	<i>54.786</i>	<i>20.039</i>	<i>73,22</i>
<i>52.72.01</i>	<i>Rasanae Barat</i>	<i>13.134</i>	<i>9.108</i>	<i>4.026</i>	<i>69,35</i>
52.72.01.1001	Paruga	2.254	1.567	687	69,52
52.72.01.1002	Nae	1.830	1.321	509	72,19
52.72.01.1003	Sarae	2.146	1.501	645	69,94
52.72.01.1004	Tanjung	2.731	1.813	918	66,39
52.72.01.1013	Pane	1.104	750	354	67,93
52.72.01.1014	Dara	3.069	2.156	913	70,25
<i>52.72.02</i>	<i>Rasanae Timur</i>	<i>9.945</i>	<i>6.989</i>	<i>2.956</i>	<i>70,28</i>
52.72.02.1004	Kumbe	1.874	1.277	597	68,14
52.72.02.1008	Lampe	797	565	232	70,89
52.72.02.1009	Dodu	1.637	1.132	505	69,15

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber-Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.02.1011	Nungga	1.270	859	411	67,64
52.72.02.1018	Kodo	1.126	784	342	69,63
52.72.02.1019	Oi Fo'o	1.197	824	373	68,84
52.72.02.1020	Lelamase	1.154	782	372	67,76
52.72.02.1021	Oimbo	890	766	124	86,07
<i>52.72.03</i>	<i>Asakota</i>	<i>17.017</i>	<i>13.337</i>	<i>3.680</i>	<i>78,37</i>
52.72.03.1001	Melayu	2.498	1.832	666	73,34
52.72.03.1002	Jatiwangi	3.529	2.950	579	83,59
52.72.03.1003	Jatibaru	2.943	2.021	922	68,67
52.72.03.1004	Kolo	2.888	2.055	833	71,16
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	2.120	1.714	406	80,85
52.72.03.1006	Ule	3.039	2.765	274	90,98
<i>52.72.04</i>	<i>Raba</i>	<i>19.077</i>	<i>13.743</i>	<i>5.334</i>	<i>72,04</i>
52.72.04.1001	Penaraga	2.260	1.607	653	71,11
52.72.04.1002	Rontu	1.555	1.153	402	74,15
52.72.04.1003	Penanae	1.944	1.373	571	70,63
52.72.04.1004	Kendo	841	607	234	72,18
52.72.04.1005	Ntobo	2.046	1.472	574	71,95
52.72.04.1006	Nitu	847	560	287	66,12
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.873	1.412	461	75,39
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.817	1.180	637	64,94
52.72.04.1009	Rite	1.162	857	305	73,75
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	2.493	1.828	665	73,33
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	2.239	1.694	545	75,66

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber-Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.05	Mpunda	15.652	11.609	4.043	74,17
52.72.05.1001	Monggonao	1.898	1.456	442	76,71
52.72.05.1002	Sadia	1.722	1.262	460	73,29
52.72.05.1003	Santi	1.301	953	348	73,25
52.72.05.1004	Sambinae	1.770	1.286	484	72,66
52.72.05.1005	Penatoi	2.095	1.602	493	76,47
52.72.05.1006	Lewirato	922	698	224	75,70
52.72.05.1007	Mande	1.294	924	370	71,41
52.72.05.1008	Panggi	1.321	1.052	269	79,64
52.72.05.1009	Manggemaci	1.895	1.365	530	72,03
52.72.05.1010	Matakando	1.434	1.011	423	70,50

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

#### 4. Akta Perceraian

Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah Akta Perceraian. Bila Akta Perkawinan non-muslim dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Muslim) maka proses perceraianya melalui Pengadilan Agama.

**Tabel VI.7 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perceraian per Kelurahan**

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Cerai			
		Penduduk ber-Status Cerai	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72</i>	<i>Kota Bima</i>	<i>3.979</i>	<i>2.814</i>	<i>1.165</i>	<i>70,72</i>
<i>52.72.01</i>	<i>Rasanae Barat</i>	<i>949</i>	<i>629</i>	<i>320</i>	<i>66,28</i>
52.72.01.1001	Paruga	161	107	54	66,46
52.72.01.1002	Nae	133	85	48	63,91
52.72.01.1003	Sarae	156	106	50	67,95
52.72.01.1004	Tanjung	196	134	62	68,37
52.72.01.1013	Pane	113	69	44	61,06
52.72.01.1014	Dara	190	128	62	67,37
<i>52.72.02</i>	<i>Rasanae Timur</i>	<i>408</i>	<i>276</i>	<i>132</i>	<i>67,65</i>
52.72.02.1004	Kumbe	121	86	35	71,07
52.72.02.1008	Lampe	24	18	6	75,00
52.72.02.1009	Dodu	60	36	24	60,00
52.72.02.1011	Nungga	35	23	12	65,71
52.72.02.1018	Kodo	34	22	12	64,71
52.72.02.1019	Oi Fo'o	29	17	12	58,62
52.72.02.1020	Lelamase	24	14	10	58,33
52.72.02.1021	Oimbo	81	60	21	74,07
<i>52.72.03</i>	<i>Asakota</i>	<i>854</i>	<i>643</i>	<i>211</i>	<i>75,29</i>
52.72.03.1001	Melayu	152	108	44	71,05
52.72.03.1002	Jatiwangi	166	134	32	80,72
52.72.03.1003	Jatibaru	161	134	27	83,23
52.72.03.1004	Kolo	137	80	57	58,39
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	110	89	21	80,91
52.72.03.1006	Ule	128	98	30	76,56

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Cerai			
		Penduduk ber-Status Cerai	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72.04</i>	<i>Raba</i>	<i>974</i>	<i>671</i>	<i>303</i>	<i>68,89</i>
52.72.04.1001	Penaraga	137	87	50	63,50
52.72.04.1002	Rontu	100	75	25	75,00
52.72.04.1003	Penanae	103	75	28	72,82
52.72.04.1004	Kendo	36	28	8	77,78
52.72.04.1005	Ntobo	77	62	15	80,52
52.72.04.1006	Nitu	17	11	6	64,71
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	98	61	37	62,24
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	96	64	32	66,67
52.72.04.1009	Rite	55	37	18	67,27
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	133	91	42	68,42
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	122	80	42	65,57
<i>52.72.05</i>	<i>Mpunda</i>	<i>794</i>	<i>595</i>	<i>199</i>	<i>74,94</i>
52.72.05.1001	Monggonao	88	65	23	73,86
52.72.05.1002	Sadia	82	69	13	84,15
52.72.05.1003	Santi	51	32	19	62,75
52.72.05.1004	Sambinae	68	49	19	72,06
52.72.05.1005	Penatoi	139	100	39	71,94
52.72.05.1006	Lewirato	46	36	10	78,26
52.72.05.1007	Mande	80	64	16	80,00
52.72.05.1008	Panggi	67	49	18	73,13
52.72.05.1009	Manggemaci	118	91	27	77,12
52.72.05.1010	Matakando	55	40	15	72,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

Dari tabel VI.7 dapat dilihat bahwa penduduk yang memiliki akta perceraian 2.814 orang (70,72 %) dari jumlah penduduk berstatus cerai hidup 3.979 orang. Persentase kepemilikan akta perceraian tertinggi berada di Kecamatan Asakota sebanyak 643 orang (75,29 persen) dan terendah di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 629 orang (66,28 persen).

#### **D. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak**

Jumlah kepemilikan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Pencatatan pengakuan, pengesahan, pengangkatan anak ini merupakan kesadaran masyarakat untuk mengurus dasar legalitas peristiwa yang berdampak pada hak keperdataan anak dan menghindari permasalahan di kemudian hari.

**Tabel VI.8 Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan & Pengangkatan Anak**

No	Peristiwa	Jumlah Pencatatan
1	Pengakuan Anak	0
2	Pengesahan Anak	4
3	Pengangkatan Anak	5
4	Perubahan Nama	5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023

## E. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan untuk anak usia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari. Adapun kepemilikan KIA pada tahun 2023 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel VI.9 berikut ini. Sesuai dengan program pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan maka pada tahap awal Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima ditargetkan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk tahapan berikutnya baru ditargetkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak yang direncanakan antara lain sebagai salah satu bukti diri, sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, transaksi keuangan di perbankan, dll.

Di Kota Bima ada fasilitas dari mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima dan diikat dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU), memperoleh discount/potongan harga tertentu sesuai MOU masing-masing. Jumlah mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima sejumlah 3 mitra:

1. Outdoormu Adventure Store
2. Kolam Renang Bima Tirta
3. Bimbingan Belajar Prime Generation Cabang Kota Bima
4. Global Mart Kota Bima

Jika dilihat pada tabel VI.9 di bawah ini total kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Bima sebanyak 29.419 anak atau setara dengan 60,93 persen. Capaian persentase tertinggi berada pada kecamatan Raba sebesar 67,62 persen (7.904 anak) dan capaian persentase terendah jatuh pada Kecamatan Rasanae Barat yakni sebesar 55,55 persen atau setara dengan 5.029 anak dari 9.053 anak wajib KIA.

**Tabel VI.10 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak per Kelurahan**

Kode	Wilayah	Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
		Wajib KIA	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72</i>	<i>Kota Bima</i>	<i>48.280</i>	<i>29.419</i>	<i>18.861</i>	<i>60,93</i>
<i>52.72.01</i>	<i>Rasanae Barat</i>	<i>9.053</i>	<i>5.029</i>	<i>4.024</i>	<i>55,55</i>
52.72.01.1001	Paruga	1.494	872	622	58,37
52.72.01.1002	Nae	1.234	713	521	57,78
52.72.01.1003	Sarae	1.503	815	688	54,22
52.72.01.1004	Tanjung	1.962	894	1.068	45,57
52.72.01.1013	Pane	723	483	240	66,80
52.72.01.1014	Dara	2.137	1.252	885	58,59
<i>52.72.02</i>	<i>Rasanae Timur</i>	<i>5.836</i>	<i>3.592</i>	<i>2.244</i>	<i>61,55</i>
52.72.02.1004	Kumbe	1.107	660	447	59,62
52.72.02.1008	Lampe	485	398	87	82,06
52.72.02.1009	Dodu	970	486	484	50,10
52.72.02.1011	Nungga	794	510	284	64,23
52.72.02.1018	Kodo	630	441	189	70,00
52.72.02.1019	Oi Fo'o	741	504	237	68,02
52.72.02.1020	Lelamase	584	327	257	55,99
52.72.02.1021	Oimbo	525	266	259	50,67
<i>52.72.03</i>	<i>Asakota</i>	<i>11.600</i>	<i>6.597</i>	<i>5.003</i>	<i>56,87</i>
52.72.03.1001	Melayu	1.862	1.022	840	54,89
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.357	1.237	1.120	52,48
52.72.03.1003	Jatibaru	1.867	1.066	801	57,10
52.72.03.1004	Kolo	1.957	1.131	826	57,79
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.177	748	429	63,55
52.72.03.1006	Ule	2.380	1.393	987	58,53

Kode	Wilayah	Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
		Wajib KIA	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72.04</i>	<i>Raba</i>	<i>11.688</i>	<i>7.904</i>	<i>3.784</i>	<i>67,62</i>
52.72.04.1001	Penaraga	1.550	1.004	546	64,77
52.72.04.1002	Rontu	1.008	632	376	62,70
52.72.04.1003	Penanae	1.258	908	350	72,18
52.72.04.1004	Kendo	468	334	134	71,37
52.72.04.1005	Ntobo	1.130	773	357	68,41
52.72.04.1006	Nitu	463	310	153	66,95
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.214	827	387	68,12
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.038	702	336	67,63
52.72.04.1009	Rite	731	501	230	68,54
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.484	1.036	448	69,81
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.344	877	467	65,25
<i>52.72.05</i>	<i>Mpunda</i>	<i>10.103</i>	<i>6.297</i>	<i>3.806</i>	<i>62,33</i>
52.72.05.1001	Monggonao	1.126	674	452	59,86
52.72.05.1002	Sadia	1.068	733	335	68,63
52.72.05.1003	Santi	883	577	306	65,35
52.72.05.1004	Sambinae	1.119	646	473	57,73
52.72.05.1005	Penatoi	1.497	794	703	53,04
52.72.05.1006	Lewirato	571	374	197	65,50
52.72.05.1007	Mande	880	494	386	56,14
52.72.05.1008	Panggi	757	516	241	68,16
52.72.05.1009	Manggemaci	1.249	878	371	70,30
52.72.05.1010	Matakando	953	611	342	64,11

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, diolah.

# BAB VII

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Data kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan berkelanjutan. Dinamika penduduk yang tinggi, menjadikan data sebagai sumber data harus terus di *update*. Pembangunan yang berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

### A. Kesimpulan

#### 1. Aspek Kuantitas

- a. Jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan terus-menerus, dan luas wilayah Kota Bima tetap. Walaupun data terbaru luas wilayah tetap yaitu 222,25 km<sup>2</sup>.
- b. Meskipun secara nasional jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, namun proporsi jumlah penduduk Kota Bima jenis kelamin perempuan lebih besar dari laki-laki, hal ini berimplikasi pada pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan *Gender*, Indeks Pemberdayaan *Gender* dan Indeks Kesenjangan *Gender*. Usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, mengindikasikan jumlah kepala keluarga perempuan pada usia lanjut akan cenderung lebih besar. Kelompok perempuan kepala keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam kebijakan sosial pemerintah, maka diperlukan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok ini.

- c. Pada tahun 2023 ini Kota Bima sudah mengalami “Bonus Demografi” yaitu dimana jumlah penduduk yang produktif lebih besar dari usia non produktif. Usia produktif di Kota Bima mencapai 67,48 %, hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kondisi ini, dapat dijadikan peluang bagi daerah untuk memajukan kesejahteraan warganya dengan syarat masyarakat usia produktif ini memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM baik pendidikan & pelatihan, kesehatan, kemampuan komunikasi hingga penguasaan teknologi serta penyediaan lapangan pekerjaan perlu didukung semua *stakeholder* daerah sehingga kelompok umur produktif ini dapat tertampung dalam pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
- d. Kepala Keluarga yang mempunyai status pekerjaan belum/tidak bekerja berjumlah 3.739 KK, padahal kepala keluarga sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan mencari pendapatan keluarga. Kelompok ini hendaknya dijadikan prioritas dalam kebijakan pemerintah, agar tidak berimplikasi pada permasalahan sosial lainnya.

## 2. Aspek Kualitas

- a. Angka kematian bayi di Kota Bima tahun 2023 sebesar 6,86 yang berarti terjadi kematian bayi sebanyak 17 bayi per seribu kelahiran hidup. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi, maka oleh karena itu peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, dan pendekatan perilaku hidup sehat harus tetap ditingkatkan.
- b. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bima yang tercatat dalam *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima berjumlah 556 jiwa, meskipun hanya 0,34 % dari jumlah penduduk tetap perlu adanya kebijakan untuk penyediaan akses terutama fasilitas umum dan kebijakan pemerintah daerah, dengan harapan kelompok disabilitas ini agar tetap bisa bersosialisasi seperti warga normal lainnya. Perlu diperhatikan bahwa data tersebut adalah jumlah penyandang disabilitas yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima,

- c. Penyebab perceraian penduduk yang terbesar karena pertengkaran dan perselisihan. Hal tersebut diperlukan kebijakan dan sosialisasi agar kesadaran kehidupan berumah tangga meningkat sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

### 3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kepemilikan dokumen kependudukan warga Kota Bima terus ditingkatkan dengan pelayanan jemput bola dan sosialisasi ke masyarakat, sehingga warga merasa tenang dan nyaman secara hukum dan keperdataan. Hal tersebut menjadi tantangan bersama yang memerlukan intervensi kebijakan di kalangan internal pemerintah kota dan warga sendiri. Masyarakat harus diedukasi tentang pemahaman dan kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi dan ter *update*, sehingga pendokumentasian data kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil dilaksanakan dengan tertib. Aparatur SDM instansi pelaksana data kependudukan perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diorientasikan pada keakuratan dan ketelitian verifikasi formulir agar konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2023 sebesar 100 %, akan tetapi yang tercetak hanya 99,88%.  
Kepemilikan KK sering menjadi dasar identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Posisi kepala keluarga seorang perempuan dan lansia terkadang rentan terlewatkan untuk akses program sosial. Kevalidan dan *updating* data dalam Kartu Keluarga ini sangat menentukan prioritas kebijakan sosial yang diambil pemerintah. Hal tersebut menjadikan kebijakan yang diambil tepat dan menysasar kepada masyarakat.
- b. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran terutama usia 17 tahun ke atas dan Kartu Identitas Anak (KIA), masih diperlukan dan dijadikan prioritas dalam menentukan program penuntasan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut sangat diperlukan karena menjadi dokumen hukum seseorang dalam urusan keperdataan dan urusan publik.

- c. Program peningkatan pencatatan dokumen kependudukan untuk akta kematian dan akta kelahiran yang diperluas untuk semua umur diharapkan berhasil meningkatkan pemahaman arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kesadaran warga masyarakat.

#### 4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan

Tantangan yang dihadapi untuk pembangunan daerah berwawasan kependudukan di Kota Bima :

- a. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya *updating* data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *updating* data dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang *update* dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah kualitas data kependudukan yang dihasilkan. Setiap ada peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dilaporkan, maka data akan semakin valid, akurat sehingga pengambilan kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran
- b. Pemanfaatan data yang belum terintegrasi antara data penduduk yang diakses instansi eksternal yang mempunyai instansi vertikal di tingkat pusatnya dengan data penduduk yang bersangkutan menjadikan kurang efektifnya sistem. Hal tersebut diperlukan sistem yang mutakhir terintegrasi, sehingga ketika penduduk melaporkan perubahan datanya, maka data yang diakses oleh instansi eksternal (milik instansi vertikal) dapat *update* secara langsung.
- c. Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk semua penduduk dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum maksimal, diperlukan kebijakan dan kerja sama dengan OPD/instansi/kelurahan/PKK/Sekolah dan pihak swasta sehingga cakupan akta kelahiran dan KIA untuk semua penduduk Kota Bima juga meningkat.

d. Koordinasi antar lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data diperlukan peningkatan secara terus-menerus. Pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama (Kementerian Agama), pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi oleh Kementerian Hukum & HAM, pelayanan KK-KTP dan akta belum terkoneksi seluruhnya.

## B. Implikasi Kebijakan

### 1. Kebijakan validasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perlu pengoptimalan upaya penyajian kelengkapan data kependudukan, akurasi dan validitas data. Dukungan data dari dinas/OPD lain sangat dibutuhkan agar akurasi dan kelengkapan data dapat tersaji dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi *stakeholder* dan pihak pengambil kebijakan yang berkepentingan dengan data kependudukan.

### 2. Kebijakan penataan ruang dan penyediaan sarana prasarana berwawasan kependudukan

Terkait perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang dan distribusi kepadatan penduduk sekiranya harus ada lebih banyak kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana prasarana kebutuhan warga kota baik sarana prasarana perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Proyeksi proporsi dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dijadikan rujukan perencanaan daya tampung dan daya dukung wilayah.

### 3. Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan

Perkiraan penambahan dan pengurangan penduduk dapat dijadikan acuan dalam kebijakan penyediaan pangan dan sumber kebutuhan energi daerah.

#### 4. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kota Bima sudah mengalami “Bonus Demografi”. Hal tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena hal ini dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus tepat sehingga masa “Bonus Demografi” yang sedang berjalan dapat dimanfaatkan dengan baik.

#### 5. Kebijakan di bidang Sosial

Penduduk yang menyandang disabilitas, keluarga miskin, perceraian dan perempuan sebagai kepala rumah tangga dapat dijadikan pertimbangan penyusunan kebijakan penanganan masalah sosial. Permasalahan sosial merupakan permasalahan bersama yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat. Disabilitas, status sosial ini memerlukan kebijakan yang berpihak kepada mereka sehingga tetap dapat bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

